

EKONOMI

**Risma Nurhaini Munte, Mansur, Suharno, Sutrisno,
Dessy Evianti, Krispina Fenanlampir, Tri Widayati,
Posma Sariguna Johnson Kennedy, Nova Suryani,
Arief Yanto Rukmana, Jeferson Tanesab,
Delila Angelina Nahak Seran, Muhammad Yusuf,
Muhammad Hatta, Fabiola Bulimasena Luturmas**



EKONOMI

Risma Nurhaini Munte

Mansur

Suharno

Sutrisno

Dessy Evianti

Krispina Fenanlampir

Tri Widayati

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Nova Suryani

Arief Yanto Rukmana

Jeferson Tanesab

Delila Anggelina Nahak Seran

Muhammad Yusuf

Muhammad Hatta

Fabiola Bulimasena Luturmas



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKONOMI

Penulis :

Risma Nurhaini Munte
Mansur
Suharno
Sutrisno
Dessy Evianti
Krispina Fenanlampir
Tri Widayati
Posma Sariguna Johnson Kennedy
Nova Suryani
Arief Yanto Rukmana
Jeferson Tanesab
Delila Angelina Nahak Seran
Muhammad Yusuf
Muhammad Hatta
Fabiola Bulimasena Luturmas

ISBN : 978-623-198-437-1

Editor : Diana Purnama Sari, S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekonomi ini.

Buku Ini Membahas Pengantar bisnis, Sejarah pemikiran ekonomi, Ekonomi pembangunan, Perekonomian di Indonesia, Manajemen resiko dan analis kredit perbankan, Pengantar akuntansi, Teori ekonomi makro, Manajemen risiko dan analis kredit perbankan, Ekonomi public, Ekonomi koperasi dan kewirausahaan, Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, Ekonomi moneter, Evaluasi proyek pembangunan, Kebanksentralan, Ekonomi perencanaan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENGANTAR BISNIS.....	1
1.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Bisnis	1
1.2 Lingkungan Bisnis	4
1.2.1 Pihak-Pihak Dalam Pengelolaan Bisnis.....	4
1.2.2 Maksud dan Tujuan Bisnis.....	5
1.2.3 Tingkatan Partisipasi.....	6
1.4 Bentuk Kepemilikan Bisnis	11
1.5 Etika Bisnis	13
1.6 Sistem Perekonomian Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis	15
1.7 Peluang Dan Trend Bisnis Masa Depan	15
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.2 Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Kontroversi.....	22
2.2.1 Kontroversi Teori Ekonomi.....	22
2.2.2 Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi	24
2.3 Pemikiran Ekonomi Pra-Klasik	27
2.3.1 Pemikiran-pemikiran Ekonomi Pra-Klasik.....	27
2.3.2 Pemikiran Ekonomi Markantilisme.....	29
2.3.3 Pemikiran Ekonomi Fisokrat.....	30
2.4 Pemikiran Ekonomi Klasik.....	31
2.4.1 Teori Adam Smith	31
2.4.2 Teori David Ricardo	31
2.4.3 Teori Thomas Robert Malthus.....	32
2.5 Ekonomi Sosial	33
2.5.1 Kritik Terhadap Pemikiran Ekonomi Klasik.....	34
2.5.2 Jhon Stuart Mill	35

2.5.3 Ekonomi Sosialis: Utopia dan Ilmiah	35
2.6 Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik	38
2.6.1 Teori Utilitas Marginal – Karl Menger (Jerman, 1840-1921)	39
2.6.2 Teori Keseimbangan Umum – Leon Walras (Prancis, 1834-1930)	40
2.6.3 Teori Titik Equilibrium - Alfred Marshall (Britania, 1842-1924)	40
2.6.4 Aliran Sejarah	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44
BAB 3 EKONOMI PEMBANGUNAN	47
3.1 Pendahuluan.....	47
3.2 Teori Pembangunan Ekonomi	48
3.2.1 Mazhab Historismus.....	48
3.2.2 Mazhab Analitis.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB 4 PEREKONOMIAN DI INDONESIA	73
4.1 Pendahuluan.....	73
4.2 Perekonomian Indonesia di Masa Lampau	74
4.2.1 Era Soekarno (1945-1967)	74
4.2.2 Era Pemerintahan Soeharto (1967-1998).....	75
4.2.3 Era Bj. Habibie (1998-1999).....	76
4.2.4 Era Abdurrahman Wahid (1999-2001)	77
4.2.5 Era Megawai Soekarno Putri (2001-2004).....	77
4.2.6 Era Soesilo Bambang yudhyono (2004-2014).....	78
4.2.7 Era Joko Widodo (2014-sekarang)	79
DAFTAR PUSTAKA.....	83
BAB 5 MANAJEMEN RISIKO DAN ANALIS KREDIT PERBANKAN	85
5.1 Pendahuluan.....	85
5.2 Klasifikasi dan Kategori Risiko.....	89
5.3 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko	92
5.4 Strategi dan Tahapan Dalam Melakukan Manajemen Risiko	94

5.5 Manajemen Risiko Perbankan	97
5.5.1 Manajemen Risiko Kredit	97
5.5.2 Manajemen Risiko Likuiditas	101
5.5.3 Manajemen Risiko Operasional	103
5.6 Analis Kredit Perbankan.....	106
5.6.1 Penilaian dan Pengawasan Kredit.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	117
BAB 6 PENGANTAR AKUNTANSI	119
6.1 Pendahuluan.....	119
6.2 Pengertian Akuntansi.....	120
6.2.1 Tujuan Akuntansi	121
6.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi.....	121
6.3 Pengguna Informasi	123
6.4 Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum (<i>Generally Accepted Accounting Principles, GAAP</i>).....	125
6.5 Proses Akuntansi	125
6.6 Fungsi Akuntansi dalam Bisnis.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128
BAB 7 EKONOMI MAKRO	129
7.1 Pendahuluan.....	129
7.2 Isu Utama Dalam Analisis Makro Ekonomi	130
7.3 Masalah Utama Dalam Perekonomian	130
7.4 Kebijakan Makroekonomi	136
7.4.1 Kebijakan ekonomi fiskal.....	136
7.4.2 Kebijakan Moneter	139
7.4.3 Kebijakan Sisi Penawaran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BAB 8 EKONOMI INTERNASIONAL: PENGARUH KEKUASAAN HEGEMONIK	143
8.1 Pendahuluan.....	143
8.2 Ekonomi Internasional dan Penting untuk Mempelajarinya.....	146
8.3 Pengaruh Kekuasaan Hegemonik terhadap Ekonomi dan Politik Internasional	149

8.4 Situasi Ekonomi Internasional 1919-1939.....	152
8.5 Situasi Ekonomi Internasional setelah Perang Dunia II ..	155
8.6 Implikasi Kebijakan	158
8.7 Kesimpulan.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
BAB 9 EKONOMI REGIONAL	165
9.1 Pendahuluan.....	165
9.2 Tujuan dan Manfaat Ekonomi Regional	168
9.3 Konsep Wilayah (Region) Dalam Ilmu Ekonomi Regional.....	169
9.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional	172
9.5 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	175
9.6 Teori Sektor (<i>Sector Theory of Growth</i>)	178
9.7 Struktur Industri dan Pertumbuhan Wilayah (<i>Industrial Structure and Regional Growth</i>).....	179
DAFTAR PUSTAKA.....	180
BAB 10 EKONOMI KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN... 181	
10.1 Pendahuluan.....	181
10.2 Permasalahan Koperasi	182
10.3 Manajemen Koperasi.....	184
10.4 Kewirausahaan Koperasi	185
10.5 Klasifikasi Koperasi di Indonesia.....	189
10.5.1 Koperasi Konsumen	189
10.5.2 Koperasi Produsen	189
10.5.3 Koperasi Jasa.....	190
10.5.4 Koperasi Simpan Pinjam.....	190
10.5.5 Koperasi Serba Usaha	190
10.6 Kewirausahaan dan Pertumbuhan Ekonomi	190
10.7 Kewirausahaan Sebagai Inovator Pencipta Lapangan Pekerjaan.....	193
10.8 Ekosistem Kewirausahaan dalam mengembangkan kewirausahaan.....	194
10.9 Kesimpulan.....	195
DAFTAR PUSTAKA.....	197

BAB 11 EKONOMI KEPENDUDUKAN	203
11.1 Pendahuluan.....	203
11.2 Konsep Ekonomi Kependudukan.....	204
11.3 Fertilitas	205
11.4 Mortalitas.....	207
11.5 Migrasi	210
DAFTAR PUSTAKA.....	215
BAB 12 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN.....	217
12.1 Pendahuluan.....	217
12.3 Evaluasi Proyek Pembangunan.....	219
12.3.1 Aspek Dalam Evaluasi Proyek Pembangunan.....	221
12.4 Aspek – Aspek Persiapan Dan Tahapan Evaluasi Proyek Pembangunan.....	221
12.4.1 Persiapan Evaluasi Proyek.....	221
12.4.2 Langkah-Langkah Penilaian Proyek.....	223
12.5 Lembaga yang membutuhkan Evaluasi Proyek.....	224
DAFTAR PUSTAKA.....	226
BAB 13 KEBANK SENTRALAN	227
13.1 Pendahuluan.....	227
13.2 Bank Sentral.....	227
13.2.1 Sejarah Bank Sentral.....	228
13.2.2 Fungsi, Tugas dan Peran Bank Sentral.....	229
13.3 Wewenang Bank Sentral	231
13.4 Kebijakan Moneter	232
13.5 Peran Bank Sentral Dalam Kestabilan Keuangan	234
DAFTAR PUSTAKA.....	238
BAB 14 KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN	239
14.1 Pendahuluan.....	239
14.2 Pengertian Perencanaan.....	239
14.3 Pengertian Pembangunan	241
14.4 Konsep Dasar Perencanaan	242
14.5 Pentingnya Perencanaan Pembangunan	247
14.6 Bagaimana melakukan perencanaan?	255

14.6 Jenis-jenis Perencanaan	257
14.7 Pendekatan Perencanaan Pembangunan.....	266
DAFTAR PUSTAKA.....	269
BAB 15 EKONOMI MARITIM.....	271
15.1 Pendahuluan.....	271
15.2 Ekonomi	271
15.3 Maritim	273
15.4 Ekonomi Maritim	274
15.4.1 Peranan Sektor Maritim	275
15.4.2 Manfaat Sektor Maritim.....	276
15.5 Sektor Pelayaran	277
15.5.1 Insfrastruktur Pelayaran.....	277
15.5.2 Industri Perkapalan	278
15.6 Pemberlakuan Asas Cabotage	278
DAFTAR PUSTAKA.....	281

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Pandangan Lama Hubungan Risiko dan Timbal Hasil	88
Gambar 5.2. Pandangan Baru : Risiko Harus Dikelola Secara Optimal	89
Gambar 5.3. Kategori Risiko	91
Gambar 5.4. Sumber Risiko Operasional	104
Gambar 7.1. Bentuk Umum Siklus Ekonomi.....	131
Gambar 14.1. Hubungan Perencanaan dan Pembangunan	242
Gambar 14.2. Keterkaitan PPN dan PPD.....	247
Gambar 14.3. Koordinasi Perencanaan.....	267

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tahap Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pra-Klasik.....	27
Tabel 3.1. Perkiraan Rostow masa tinggal landas di beberapa negara	55
Tabel 5.1. Pengukuran Rasio Likuiditas	111
Tabel 5.2. Pengukuran Rasio Leverage.....	111
Tabel 5.3. Pengukuran Rasio Aktivitas	112
Tabel 5.4. Pengukuran Rasio Rentabilitas.....	113
Tabel 5.5. Pengukuran Rasio Coverage	113

BAB 1

PENGANTAR BISNIS

Oleh Risma Nurhaini Munthe

1.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Bisnis

Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa (Ebert & Griffin, 2009). Bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Perusahaan, pasar swalayan, rumah sakit, konsultan, pasar tradisional, dan sebagainya, semuanya merupakan organisasi bisnis. Bisnis dapat pula berarti individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain (Ferrell *et al.*, 2011). Bisnis juga merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan. Bisnis dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) serta usaha informal lainnya. Sementara itu, orang yang mengusahakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur.

Tujuan utama bisnis adalah melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit (Madura, 2007). Tujuan bisnis tersebut merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dan dari bisnis yang mereka lakukan, serta merupakan cerminan berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan (produksi,

pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan seterusnya).

Tujuan bisnis ini akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Secara umum tujuan bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Dalam jangka panjang, tujuan bisnis yang akan dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Sebenarnya, kata bisnis dapat pula mengacu pada suatu aktivitas yang dilakukan individu atau organisasi setiap hari. Namun demikian, pengertian bisnis tersebut selalu dibatasi oleh hasil yang didapatkan, yang mungkin tidak selalu berupa barang atau layanan dan mendapatkan keuntungan dalam arti uang. Bisnis dapat pula menghasilkan manfaat bagi pemilik bisnis maupun orang lain. Yang penting, dalam bisnis terdapat kegiatan individu, kelompok, atau organisasi, kegiatan tersebut menciptakan manfaat atau nilai tambah, dan kegiatan tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak terkait.

Menurut Brown dan Clow (2008), kegiatan bisnis yang harus dilakukan dalam mengembangkan produk antara lain:

- a) Mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan
- b) Mengevaluasi permintaan produk dan jasa
- c) Mendapatkan dana atau modal kerja
- d) Mengelola produksi barang atau jasa
- e) Memasarkan barang atau jasa
- f) Membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses

Ada berbagai jenis bisnis. *Manufaktur* merupakan jenis bisnis yang menghasilkan barang yang berasal dari beberapa bahan mentah yang diolah menjadi barang tersebut dan mendapatkan keuntungan. Bisnis jasa merupakan bisnis yang menghasilkan layanan atau produk yang bersifat tidak berwujud yang mendapatkan keuntungan dari pembayaran atas layanan

yang diterima pelanggan. Agen, pedagang besar, pengecer, atau distributor lainnya merupakan jenis bisnis yang merupakan perantara antara produsen dan konsumen. Pada umumnya mereka membeli barang dari produsen kemudian dijual ke konsumen akhir dengan mendapatkan keuntungan. Kebanyakan toko-toko yang ada di sekitar kita melakukan bisnis dengan melaksanakan bisnis ini. *Bisnis pertanian* adalah bisnis yang menghasilkan barang hasil pertanian seperti padi, jagung, ketela, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. *Pertambangan* merupakan bisnis yang menghasilkan bahan tambang, seperti minyak bumi batubara, dan sebagainya. *Bisnis transportasi* merupakan bisnis jasa yang memberikan layanan angkutan kepada masyarakat. Bisnis ini menjual layanan berupa kenyamanan, ketepatan waktu, dan keramahan kepada para pelanggan. *Bisnis properti*, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual atau menyewakan rumah atau bangunan lainnya serta menjual interior dan eksterior rumah dan bangunan lainnya tersebut. Masih banyak lagi berbagai jenis bisnis yang ada di sekitar kita yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Menurut Ferrell et al.(2011), ada tiga kegiatan utama bisnis, yaitu manajemen, pemasaran, dan keuangan. Pemilik organisasi bisnis harus menyediakan sumber daya modal untuk memulai bisnis tersebut. Pemilik harus mampu mengelola bisnisnya dengan menggunakan karyawan atau sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimilikinya. Pemilik bisnis harus mampu mengelola bisnisnya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan.

Mengapa kita harus mempelajari bisnis? Belajar bisnis dapat membantu kita mengembangkan keahlian dan memperoleh pengetahuan untuk mempersiapkan karir di masa mendatang, apakah yang akan kita lakukan di masa mendatang? Kita akan mengikuti bisnis orang lain atau bekerja pada orang lain, atautkah kita akan berbisnis sendiri dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan

keuntungan? Selain itu, kita dapat mengambil keputusan, bisnis apa yang akan kita tekuni.

Berbagai bidang bisnis menawarkan kesempatan karir yang menarik dan menantang, seperti manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi, keuangan, produksi dan operasi, pedagang besar atau pengecer, dan sebagainya. Mempelajari bisnis juga dapat membantu memahami secara lebih baik berbagai kegiatan bisnis yang penting untuk menyediakan barang dan layanan yang tepat, baik dalam kualitas maupun harga. Kegiatan bisnis akan membantu kita mendapatkan keuntungan yang tidak hanya penting bagi bisnis secara individual, namun penting pula bagi organisasi, perekonomian lokal, maupun perekonomian global. Tanpa adanya keuntungan yang diperoleh, kegiatan bisnis akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya, dalam membeli bahan baku, menggaji karyawan, mendapatkan modal, dan membuat barang atau memberikan layanan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, para pebisnis selalu berusaha agar perusahaan atau bisnisnya tersebut mendapatkan keuntungan.

1.2 Lingkungan Bisnis

1.2.1 Pihak-Pihak Dalam Pengelolaan Bisnis

Berdasarkan tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam aktivitas bisnis, SDM yang terlibat dalam bisnis dikategorikan menjadi:

a) **Pemilik modal Pihak**

Pihak yang menyediakan dana sehingga kegiatan operasional dan aktivitas organisasi dapat berjalan dengan lancar.

b) **Manajer Orang**

Orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola organisasi bisnis sehingga akan mencapai tujuan yang direncanakan oleh pemilik modal.

c) Tenaga kerja

Merupakan pengelola proses produksi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk yang berkualitas.

d) Konsumen

Konsumen merupakan pengguna produk yang dihasilkan oleh organisasi bisnis. Konsumen merupakan kelompok potensial yang akan menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh organisasi bisnis.

1.2.2 Maksud dan Tujuan Bisnis

Bisnis tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Ada beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai suatu organisasi bisnis, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Contohnya produk sepeda motor untuk sarana transportasi yang mudah dan fleksibel
2. Keuntungan usaha. Semua organisasi bisnis menginginkan keuntungan secara finansial atas usah yang mereka lakukan.
3. Pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Contoh organisasi bisnis dengan tujuan ini adalah PT Perhutani yang melakukan Reboisasi dan penghijauan untuk kelestarian usaha dimasa datang
4. Mengatasi berbagai risiko. Contoh usaha ini adalah biro jasa keamanan, lembaga asuransi
5. Tanggung jawab sosial. Banyak usaha yang mulai peduli terhadap lingkungan sosial selain mengejar keuntungan. Contohnya produk mobil ramah lingkungan, produk plastik daur ulang.

1.2.3 Tingkatan Partisipasi

Bisnis Ada beberapa tingkatan partisipasi bisnis dalam lingkungan ekonomi global, yaitu:

- 1) Domestik, organisasi bisnis terbatas pada lingkungan lokal dan belum memasarkan ke luar negeri sehingga masih terbatas dalam sat negara.
- 2) Internasional, seiring perkembangan usaha dan mulai jenuhnya pasar domestik sebagai akibat ketatnya persaingan, organisasi bisnis dapat memperluas pangsa pasar ke negara lain yaitu memasuki pasar internasional.
- 3) Multinasional, perusahaan internasional yang membangun pabrik diluar negeri akan memasuki fase perusahaan multinasional jika dia memiliki sejumlah pabrik di berbagai negara yang berbeda. Tujuannya untuk memaksimalkan perpaduan biaya produksi yang murah dengan biaya distribusi yang murah.
- 4) Global, seiring dengan banyaknya perusahaan global, maka beberapa perusahaan mulai memilih suatu lokasi pabrik diberbagai negara dan melakukan sinergi antar pabrik untuk memproduksi produk secara efektif, efisien dan fleksibel

Lingkungan Bisnis

Adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan di luar badan usaha atau industri yang memengaruhi kegiatan organisasi. Lingkungan bisnis meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial dan persaingan.

1. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi sistem ekonomi tempat perusahaan tertentu beroperasi. Kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis nyata. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka konsumsi dan permintaan cenderung meningkat, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang menurun mengakibatkan

konsumsi dan permintaan menurun. Besaran sensitifitas atas pertumbuhan ekonomi tiap-tiap industri berbeda. Perusahaan sebagai bagian dari lingkungan ekonomi perlu mencermati situasi dan kondisi ekonomi. Manajemen perlu bersikap antisipatif terhadap peluang dan ancaman lingkungan makro khususnya lingkungan ekonomi. Ada beberapa faktor ekonomi yang perlu diperhatikan perusahaan karena akan berpengaruh terhadap jalannya bisnis. Faktor ekonomi tersebut adalah:

a. Produk Domestik Bruto dan Produk Nasional

Bruto Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) adalah total produk yang dihasilkan semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik sebagai warga negara maupun bukan. Dalam perhitungan PDB akan dimasukkan semua output, baik yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdiam di Indonesia. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tidak termasuk dalam hitungan PDB. Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) adalah total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam perhitungan PNB akan dimasukkan semua output yang dihasilkan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun luar negeri. Output warga negara asing tidak termasuk dalam perhitungan PNB.

Pertumbuhan PNB (dan atau PDB) sering dikenal dengan istilah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh kuat terhadap dunia bisnis. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan mendorong daya beli. Dengan demikian pertumbuhan

ekonomi yang tinggi akan meningkatkan peluang bisnis, meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Sebaliknya jika PNB rendah maka akan berdampak negatif terhadap dunia bisnis.

b. Tingkat pengangguran

Pengangguran adalah tingkat tidak adanya pekerjaan bagi orang yang secara aktif mencari pekerjaan dalam suatu sistem ekonomi. Bila tingkat pengangguran rendah, berarti kurang tersedianya tenaga kerja untuk direkrut oleh bisnis. Ketika bisnis bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tawaran tenaga kerja yang tersedia, bisnis menaikkan upah yang ingin mereka bayar. Jika upah terlalu tinggi, bisnis akan menanggapi dengan mempekerjakan lebih sedikit pekerja, akibatnya pengangguran meningkat.

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi berdampak terhadap menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Penyebab Inflasi dapat dibedakan menjadi:

- 1) *Cost-push inflation (market power inflation)*: Tingginya harga disebabkan oleh tingginya biaya.
- 2) *Demand-pull inflation*: Tingginya harga disebabkan oleh kuatnya permintaan pelanggan atas produk.

Selain itu inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya

defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

d. Suku bunga

Permintaan atas barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor suku bunga. Peningkatan suku bunga cenderung merubah pola konsumsi. Konsumsi cenderung menurun dan menabung cenderung meningkat. Dari sisi perusahaan, peningkatan suku bunga mendorong biaya meningkat dan pada akhirnya harga jual juga meningkat.

2. Lingkungan Teknologi

Pengertian teknologi merujuk pada semua cara yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka, termasuk pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik dan komunikasi. Terdapat dua kategori umum dari teknologi yang berhubungan dengan bisnis:

a) Teknologi produk dan jasa

Teknologi ini digunakan dalam proses penciptaan barang atau jasa. Teknologi tidak hanya digunakan dalam manufacturing saja, tetapi juga pada penyedia jasa. Teknologi baru, termasuk internet, menimbulkan revolusi pada hampir setiap aspek bisnis. Mulai dari cara pelanggan dan perusahaan berinteraksi hingga dimana, kapan dan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka. Teknologi merupakan basis persaingan untuk beberapa perusahaan, khususnya

mereka yang tujuannya menjadi pemimpin teknologi pada industri mereka.

b) Teknologi proses bisnis

Teknologi proses bisnis digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan pada operasi internal (seperti akuntansi) dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konstituen eksternal, seperti pemasok dan pelanggan.

3. Lingkungan Hukum-Politik

Lingkungan ini mencerminkan hubungan antara bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk regulasi pemerintah. Sistem hukum ikut menentukan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi. Selain itu berbagai perwakilan pemerintah mengatur bidang-bidang penting seperti praktek periklanan, pertimbangan keamanan dan kesehatan serta standar perilaku yang dapat diterima. Sentimen pro atau anti bisnis dalam pemerintah dapat memengaruhi lebih lanjut kegiatan bisnis. Selama periode sentimen pro bisnis, perusahaan lebih mudah bersaing dan tidak terlalu memperhatikan isu anti trust. Sebaliknya selama periode sentimen anti bisnis, perusahaan mengalami kegiatan persaingan lebih dibatasi. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan perusahaan internasional adalah stabilitas politik. Tidak ada bisnis yang ingin membuka perusahaan di negara lain kalau hubungan dagang dengan negara tersebut tidak stabil.

4. Lingkungan Sosio-Budaya

Lingkungan sosial mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografik dari masyarakat dimana sebuah organisasi beroperasi. Proses sosio-budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang dihargai dan diterima masyarakat. Pilihan dan selera

pelanggan bervariasi sepanjang dan dalam batas-batas nasional. Pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam Negara yang sama dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu (cara memilih gaya, warna dan selera berubah-ubah sepanjang musim). Faktor sosio-budaya juga mempengaruhi bagaimana perasaan pekerja tentang pekerjaan dan organisasi mereka. Dalam beberapa budaya pekerjaan membawa makna sosial yang penting, ditempat lain pekerjaan hanyalah sarana untuk satu tujuan dan orang hanya memperhatikan soal upah dan keamanan kerja.

1.4 Bentuk Kepemilikan Bisnis

Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Dengan demikian setiap bentuk kepemilikan bisnis, sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam memilih bentuk perusahaan, antara lain jenis usaha yang dijalankan (perdagangan, industri, dsb), ruang lingkup usaha, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, besarnya resiko pemilikan, batas-batas pertanggung jawaban terhadap utang-utang perusahaan, besarnya investasi yang ditanamkan, cara pembagian keuntungan, jangka waktu berdirinya perusahaan, dan peraturan pemerintahan.

Berdasarkan kegiatannya, bisnis dapat dikelompokkan menjadi:

1. Manufaktur, yaitu bisnis yang menghasilkan produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti kendaraan.

2. Bisnis jasa, yaitu bisnis yang menghasilkan barang yang tidak berwujud, dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah konsultan hukum, psikolog, jasa pendidikan.
3. Pengecer dan distributor, merupakan pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen merupakan distributor atau pengecer.
4. Bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang menghasilkan barang-barang mentah, seperti tanaman pertanian, perkebunan, atau mineral tambang.
5. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Bisnis ini dapat dilihat pada sektor perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan masih banyak lagi bisnis finansial lainnya.
6. Informasi adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual (intellectual property). Bisnis informasi ini dapat dilihat misalnya pada perusahaan pertelevisian, radio, surat kabar, majalah, buku, dan berbagai jenis informasi lainnya yang dapat digunakan.
7. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik, seperti listrik dan air yang biasanya didanai oleh pemerintah dan merupakan perusahaan yang dimonopoli oleh pemerintah.
8. Bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah, dan bangunan.
9. Bisnis transportasi adalah bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain.

Setiap bisnis dimiliki oleh satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa jenis kepemilikan. Semua wirausahawan harus mampu memutuskan bentuk legal kepemilikan bisnisnya. Ada tiga jenis kepemilikan bisnis yang bersifat tradisional, yaitu perusahaan perseorangan, kemitraan, dan korporasi (Fry *et al.*, 2000; Ebert & Griffin, 2009; Ferrell *et al.*, 2011). Memulai bisnis bisa merupakan kegiatan yang mudah. Kita dapat memulai bisnis dengan memberikan layanan di rumah seperti membuka bengkel, rumah makan atau katering, mengembangkan website, atau mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang disebut perusahaan perseorangan.

1.5 Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan prinsip dan standar yang menentukan perilaku dalam organisasi bisnis (Ebert & Griffin, 2009). Etika bisnis juga merupakan standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan di lingkungan kerja (Boone & Krtz, 2005).

Kegiatan bisnis harus mempertimbangkan isu-isu sosial yang terkait dengan etika bisnis ini yang meliputi bagaimana keputusan yang diambil dapat memengaruhi lingkungan, karyawan, dan pelanggan. Isu-isu tersebut terkait dengan tanggung jawab sosial, filosofi, kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diarahkan pada kesejahteraan sosial sebagai tujuan utamanya.

Etika bisnis juga dipertegas dengan iklim etika dalam organisasi. Kode perilaku dan standar etika dapat memainkan peran yang signifikan dalam bisnis yang dilakukan dengan cara yang benar. Dalam bisnis, seperti dalam kehidupan manusia, keputusan mengenai benar atau salah pada situasi tertentu tidak selalu melibatkan pilihan yang jelas. Penerimaan terhadap perilaku dalam bisnis ditentukan tidak hanya oleh organisasi tetapi juga para pemangku kepentingan seperti pelanggan, pesaing, peraturan

pemerintah, kelompok peminatan, dan masyarakat umum. Etika bisnis ini mirip dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral.

Etika bisnis dapat membangun kepercayaan di antara individu dan dalam hubungan bisnis. Penyusunan kepercayaan dan keyakinan tersebut sangat sulit dicapai oleh organisasi yang mempunyai reputasi yang tidak etis. Isu-isu etika merupakan permasalahan, situasi, atau kesempatan yang dapat diidentifikasi yang memerlukan orang untuk memilih diantara berbagai kegiatan yang dapat dievaluasi sebagai benar atau salah, etis atau tidak etis. Dalam bisnis, pilihan tersebut melibatkan keuntungan dan siapa yang melakukannya. Isu-isu etika tidak dibatasi hanya untuk organisasi atau perusahaan yang berorientasi keuntungan (*for-profit organization*), namun juga pada organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan.

Isu etika meliputi semua bidang kegiatan organisasi termasuk pemerintah. Penilaian negatif atau tidak etis terhadap organisasi dapat memengaruhi kemampuan organisasi membangun hubungan dengan pelanggan, pemasok, investor, karyawan, dan masyarakat secara umum. Perilaku etis menunjukkan keyakinan individual dan norma-norma sosial mengenai apa yang baik dan apa yang benar. Perilaku tidak etis menunjukkan keyakinan individual dan norma-norma sosial mengenai apa yang salah dan apa yang tidak benar. Etika memang didasarkan pada keyakinan individual dan konsep-konsep sosial. Oleh karena itu, etika tersebut bervariasi diantara individu, situasi, dan budaya. Individu dapat saja mengembangkan kode etik yang merefleksikan sikap dan keyakinan yang luas tanpa melanggar standar umum.

Selanjutnya, etika bisnis dimulai dari etika individu, yaitu individu yang berperan sebagai manajer, karyawan, dan berbagai posisi lainnya dalam organisasi. Kode etika setiap personil ditentukan oleh kombinasi berbagai faktor yang disusun dan disaring dalam kehidupannya. Etika bisnis seringkali juga disebut sebagai etika organisasional dengan memperhatikan individu yang

bekerja di dalamnya dan lingkungan pasar yang kompetitif (Harrison, 2005).

1.6 Sistem Perekonomian Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis

Lingkungan ekonomi merupakan lingkungan yang dapat menjaga kelangsungan bisnis. Perekonomian merupakan studi mengenai bagaimana sumber daya didistribusikan untuk memproduksi barang dan memberikan layanan dalam sistem sosial. Sumber daya yang dimaksud dapat meliputi sumber daya alam (tanah, air, mineral, hutan, dan sumber daya lain yang tidak dapat dibuat oleh manusia), sumber daya manusia (tenaga kerja dengan kemampuan fisik dan mental yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang dan memberikan layanan), dan sumber daya keuangan (dana atau modal yang diperlukan dalam memperoleh sumber daya alam dan manusia yang digunakan dalam menghasilkan barang dan memberikan layanan). Ketiga sumber daya ini sering disebut sebagai faktor-faktor produksi.

1.7 Peluang Dan Trend Bisnis Masa Depan

Sebelum menginvestasikan waktu dan uang, titik utama para pebisnis atau wirausahawan/wirausahawati adalah menyusun perencanaan bisnis (business plan) yang disusul dengan pengembangan strategi bisnis dan menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan. Perencanaan bisnis tersebut meliputi penyusunan sasaran atau tujuan, peramalan penjualan, dan perencanaan keuangan.

Perencanaan bisnis menjelaskan kesesuaian antara kemampuan dan pengalaman wirausaha dan persyaratan untuk menghasilkan dan atau memasarkan produk. Hal ini dapat menentukan strategi produksi dan pemasaran, elemen-elemen hukum dalam organisasi, serta keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, peramalan penjualan harus disusun berdasarkan

logika dan hasil penelitian, serta menunjukkan pemahaman mengenai pasar yang ada, kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan cara yang digunakan untuk memenangkan persaingan. Selain itu, perencanaan keuangan menunjukkan rencana para pebisnis untuk mengubah semua kegiatan ke dalam bentuk rupiah. Hal ini mendasari penyusunan laporan keuangan perusahaan, neraca laba rugi, peta keseimbangan atau pulang pokok, dan anggaran yang menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan sebelum membuka dan melakukan bisnis.

Dalam satu tahun, hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, banyak bermunculan bisnis baru. Pada umumnya, mereka merupakan satu unit bisnis yang kecil. Kecenderungan yang ada saat ini adalah munculnya perdagangan via internet atau yang disebut sebagai electronic commerce. Hal ini disebabkan internet mampu menyediakan cara baru yang mendasar dalam bisnis dan memahami bahwa para pebisnis telah mampu menciptakan dan mengembangkan bisnis baru mereka secara lebih cepat dari sebelumnya. Kecenderungan kedua adalah banyak bisnis yang didirikan oleh orang-orang yang meninggalkan perusahaan besar atau korporasi dan telah memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis sebelumnya pindah dari tempat bekerja mereka dan mendirikan bisnis baru.

Bisnis yang didirikan oleh orang-orang yang telah berpengalaman dan memiliki banyak relasi tersebut akan dengan mudah tumbuh dan berkembang menjadi bisnis besar. Selain itu, akhir-akhir ini banyak bisnis yang didirikan oleh para wanita yang memiliki semangat berwirausaha dan memiliki modal yang cukup. Pada umumnya, para wanita tersebut merupakan individu yang memiliki semangat kerja tinggi, ulet, teliti, dan berhati-hati. Oleh karena itu, pada umumnya para wanita wirausaha ini berhasil dalam memulai dan mengembangkan bisnisnya karena ketelitian dan keuletannya. Kebanyakan bisnis baru bersifat kecil dan terbatas pada perdagangan lokal, namun dengan ketekunan,

kegigihan, keuletan, dan ketelitian para pemilik bisnis, maka bisnis kecil yang tumbuh juga dapat merambah pasar internasional.

Bisnis kecil yang baru berdiri tidak luput dari ancaman kegagalan. Ada beberapa penyebab kegagalan bisnis kecil yang baru memulai usahanya, seperti pengalaman atau kompetensi manajerial, kelalaian, sistem pengendali yang lemah, atau karena kekurangan modal. Kegagalan yang disebabkan oleh pengalaman atau kurangnya kompetensi ini disebabkan para pemilik dan pelaku bisnis tidak mampu mengestimasi keahlian manajerialnya atau terlalu overestimate. Pada umumnya, mereka terlalu yakin bahwa bekerja keras saja akan mendatangkan kesuksesan. Para pemilik dan pelaku bisnis atau manajer yang gagal adalah karena mereka tidak tahu bagaimana harus membuat keputusan mengenai bisnis dan tidak memahami prinsip-prinsip manajemen. Selain itu, ketika pemilik dan pelaku bisnis memutuskan untuk membuka bisnis baru, maka mereka harus mempunyai komitmen terhadap waktu dan usaha. Hal ini seringkali dilupakan.

Para pemilik dan pelaku bisnis tidak akan sukses jika mereka tidak mau menyediakan waktunya secara penuh untuk menjalankan bisnisnya dan hanya mempercayakan bisnisnya pada orang lain. Selain itu, sistem pengendalian yang efektif akan mendorong bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mampu menghindarkan manajer dari permasalahan serius dalam bisnis. Beberapa bisnis mengalami kegagalan karena mereka gagal dalam mengelola kebijakan pengendalian kredit atau kurang pengendalian dalam proses produksi. Beberapa pemilik dan pelaku bisnis juga terlalu optimis dalam mengumpulkan keuntungan di awal kegiatan bisnisnya.

Bisnis yang baru didirikan membutuhkan kerja keras dan komitmen dari pemiliknya, serta kesediaan pemilik meluangkan waktu dan tenaganya untuk melaksanakan bisnis tersebut. Selain itu, para pemilik bisnis baru harus mampu meramalkan permintaan terhadap produk yang ditawarkannya dengan selalu melakukan analisis pasar dan tetap mengawal kondisi tersebut

untuk produk baru yang diperkenalkan ke pasar. Keberhasilan bisnis baru juga tidak terlepas dari kompetensi pemilik bisnisnya. Oleh karena itu, keahlian dan ketrampilan pemilik dan pelaku bisnis atau manajer perlu selalu diperbarui dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau belajar dari keberhasilan masa lalu dan keberhasilan rekan bisnisnya. Selain itu, para manajer dan pemilik bisnis harus mampu meluangkan waktunya dalam menjalin relasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung keberhasilan bisnisnya (stakeholder). Satu hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan pemilik dan pelaku bisnis atau manajer dalam memulai bisnisnya adalah faktor keberuntungan yang dimilikinya.

Bisnis mempunyai lima fungsi kunci, yaitu fungsi manajemen, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi akuntansi, dan fungsi sistem informasi (Madura, 2007). *Fungsi manajemen* adalah mengelola karyawan beserta berbagai sumber daya lainnya untuk digunakan dalam organisasi. *Fungsi pemasaran* berarti melaksanakan fungsi pengembangan produk dan layanan, penentuan harga, distribusi, dan promosi kepada pelanggan. *Fungsi keuangan* berarti melaksanakan fungsi mencari dan menggunakan sumber dana untuk kegiatan operasional bisnis. *Fungsi akuntansi* merupakan fungsi merangkum dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengambil berbagai macam keputusan. *Fungsi sistem informasi* meliputi penggunaan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan prosedur yang secara bersama-sama menyediakan informasi yang tepat bagi karyawan dan bagi fungsi lain dalam mengambil keputusan.

Kelima fungsi tersebut saling terkait dan terintegrasi dalam organisasi atau perusahaan. Fungsi pemasaran menentukan jenis produk atau layanan yang disampaikan kepada pelanggan. Fungsi manajemen mengelola sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk atau layanan yang diharapkan pelanggan dalam fungsi pemasaran. Fungsi keuangan bertindak mengadakan berbagai fasilitas dan melakukan pembayaran terhadap pembelian bahan,

mesin, dan peralatan lainnya untuk menghasilkan produk dan layanan tersebut. Dalam setiap proses, fungsi sistem informasi selalu membuat data yang akurat dan dapat diakses semua pihak yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, sedangkan fungsi akuntansi bertindak membuat rangkuman dan analisis mengenai kondisi keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D. W. 2016. Pengantar Bisnis.
- Boone, L.E. dan Kurtz, D.L. 2005. Contemporary Business, 11th edition. Canada.
- Ebert, R.J. dan Griffin, R.W. 2009. Business Essentials. 7th edition. Singapore: Prentice Hall – Pearson Education International
- Ferrell, O.C.; Hirt, G.A.; dan Ferrell, L. 2011. Business: A Changing World. 8 th edition. United States: McGraw-Hill & Irwin
- Fry, F.L.; Stoner, C.R.; dan Hattwick, R.E. 2000. Business: An Integrative Approach, 2nd edition. Singapore: Irwin-McGraw Hill
- Madura, J. 2007. Introduction to Business, 4th edition. Australia: Thomson SouthWestern
- Purwanto, E. 2020. Pengantar Bisnis: Era Revolusi Industri 4.0.

BAB 2

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI

Oleh Mansur

2.1 Pendahuluan

Sejak lahir, manusia kepada kebutuhan yang banyak sekaligus dengan keterbatasannya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan yang terbatas tersebut melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ada beberapa hal yang harus dipecahkan oleh ilmu ekonomi, antara lain bagaimana mensinergikan sumber daya yang ada dapat menghasilkan produk-produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan; kemudian berapa banyak produk dan jasa yang harus dihasilkan; dan bagaimana cara mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ilmu ekonomi yang kemudian menjadi harapan baru untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu semua orang setuju dengan alasan bahwa tentu saja tidak semua persoalan kebutuhan manusia ini hanya menyangkut masalah ekonomi saja. Problematika lain seperti agama, ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan dan sebagainya tentu juga ada kebutuhan. Dan hal ini perlu diselesaikan dengan baik. Sementara itu persoalan-persoalan yang selanjutnya dapat diselesaikan dengan baik maka biasanya akan melahirkan persoalan-persoalan yang tumbuh berikutnya. Apa akibatnya semua ini bagi kita?

Dari sinilah kemudian dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang mampu menjawab banyak hal. Seperti yang kita pahami, bahwa sistem ekonomi adalah interaksi dari bagian-bagian ekonomi yang kecil para konsumen dan produsen ke dalam bagian ekonomi yang lebih luas di suatu daerah tertentu. Dari sinilah perlu

kita pahami bersama tentang pemikiran-pemikiran ekonomi Sejak awal perkem-bangannya hingga pemikiran-pemikiran ekonomi terkini.

2.2 Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Kontroversi

Secara simpel, teori dapat dipahami sebagai suatu abstrak dari kenyataan di mana abstraksi berisikan faktor anggapan dan prediksi. Dengan demikian teori dalam ekonomi berisikan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi dorongan dan arah ekonomi (Siregar and Hardana 2022). Kajian teori ekonomi dan hubungannya dalam mencari solusi akan kontinu dilaksanakan oleh para pakar ekonomi dari waktu ke waktu. Tentu saja para pakar ekonomi tidak sekaligus menjadi pengkaji ekonomi disebabkan alasan-alasan ini. *Pertama*, sebagian pakar ada yang kadang menjadi praktisi ekonomi sehingga pemikirannya tidak lagi menggunakan teori dan lebih bersifat aplikatif, yang berakibat mandul dalam melahirkan pemikiran original. *Kedua*, situasi dan kondisi yang tidak mensupport terhadap telaah-telaah tentang problematika ekonomi walaupun aktivitasnya masih bergelut dengan problematika perekonomian yang sedang berlangsung (Suprpto 2021).

Pelopor utama penelitian ekonomi adalah Jan Tinbergen, pada era setelah terjadinya Perang Dunia II. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana metode ini khususnya di dalam penelitian ekonomi menggabungkan Matematika, Statistik dan Teori Ekonomi menjadi Ilmu Ekonomi. Sementara, Metode Kualitatif juga berkembang karena kekurangan Metode Kuantitatif yang selalu berubah dalam menerangkan variabel (Rahadi 2020).

2.2.1 Kontroversi Teori Ekonomi

Pemikir ekonomi yang paling dikenal sejak awal dekade adalah Adam Smith dengan bukunya yang terkenal dengan judul

The Wealth Of Nation pada Tahun 1776. Buku ini dijadikan buku babon, sehingga dengannya Adam Smith dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Dengan terbitnya buku induk ini di awal-awal periode, bukannya tidak ada konsep-konsep ekonomi yang dijadikan acuan pada era sebelumnya. Tersebut misalnya, Kitab Hammurabi pada Tahun 1700 SM dari Babilonia yang menyebutkan di dalamnya cara-cara menjalankan ekonomi pada masyarakat Yunani. Di dalam kitab tersebut konsep ekonomi masih bercampur-baur dengan hal-hal yang berkaitan dengan etika, sosial, dan politik, sehingga tidak secara jelas dan tersusun secara sistematis dan mendalam adanya pemikiran ekonomi pada saat itu. Di dalam buku tersebut lebih menitikberatkan dan lebih berpedoman pada etika. Sedangkan para pengusaha yang terjun langsung dalam kegiatan ekonomi memiliki pandangan dan kesimpulan yang berbeda dengan para filsuf, terutama dalam motivasi dan tujuan dalam ekonomi (Daud 2021).

Pandangan yang berbeda antara filsuf dan praktisi menyebabkan terjadinya konflik pendapat dan melahirkan mazhab atau paham ekonomi yang berbeda pula. Sementara, saat ini pemekaran keilmuan ini yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dosen dan Profesor dipraktikkan dengan cara menyampaikan hasil-hasil penelitian ekonomi pada mahasiswanya. Hal ini dapat memberikan peluang untuk pemekaran teori-teori yang dikembangkan menjadi mata kuliah baru. Dengan luasnya bahasan Ilmu Ekonomi maka para pelaku ekonomi sangat bervariasi dalam menjelaskan sebuah teori dengan batasan atau asumsi yang berbeda-beda.

Ada tiga paham ekonomi yang berpengaruh, diantaranya yaitu Ekonomi Liberal, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Campuran. Sebuah negara ataupun rakyatnya secara umum dapat menentukan mazhab ekonomi yang disukai dan selaras dengan kondisi dan daerah negaranya masing-masing. Setiap hasil kajian ekonomi akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi sebuah negara. Untuk itu, perlu suatu pemerintahan sebuah negara yang

luas dalam menentukan kebijakannya agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan arah kebijakannya sehingga akan berimplikasi yang sangat jauh. Jadi, kontroversi bukan hanya terjadi pada tataran teori akan tetapi sudah memasuki tataran dunia ekonomi praktis.

Penyebab kontroversi, paling tidak disebabkan oleh tiga hal. Yang *pertama*, perumusan hipotesis yang tidak mudah. *Kedua*, praktik perekonomian yang luas tanpa batas. *Ketiga*, terikat dengan aspek nilai atau etika. Untuk itu, perlu pandangan lain tentang adanya rekonsiliasi teori ekonomi. Rekonsiliasi ini merupakan suatu proses penyelarasan teori ekonomi yang terjadi perbedaan pandangan. Teori ekonomi dapat bertahan dan memperoleh pengakuan dari masyarakat apabila mampu menjelaskan dan mengatasi problem-problem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, suatu teori ekonomi akan lenyap secara otomatis jika tidak mampu mengungkapkan gejala ekonomi pada kehidupan nyata. Jadi, setiap teori harus mampu menjadi solusi dalam setiap problematika yang berlangsung dalam masyarakat (Suprpto 2021).

2.2.2 Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi

Sejatinya, kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak sebelum masa klasik seperti di era Kerajaan Babilonia, Yunani kuno, Cina, dan Mesir. Pada masa itu para pelaku ekonomi telah membahas dan mengenal kegiatan ekonomi dan tokohnya seperti Plato dan Aristoteles di mana mereka hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan empat tokoh ekonomi utama, yaitu Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall dan John Mynard Keynes (Suprpto 2021).

1. Adam Smith (1723-1790)

Telah kita kenal bersama bahwa Adam Smith adalah pelopor dan pakar utama dalam Mazhab Klasik yang dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi melalui mahakaryanya, yaitu *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth of Nation*.

Karyanya tersebut diterbitkan pada tahun 1776 dan dijadikan buku standar pertama di bidang Pemikiran Ekonomi. Sebetulnya, Adam Smith merupakan Guru Besar dalam Ilmu Filsafat di Universitas Glasgow. Dilahirkan di Kirkaldy, Skotlandia pada tahun 1723, dengan perhatian penuh pada bidang Logika dan etika yang di kemudian hari diarahkan fokus kepada masalah ekonomi. Gagasan utamanya adalah mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Dalam sistem ekonomi ini mengarah kepada keseimbangannya sendiri dan diatur oleh *Invisible hand*, dan tugas pemerintah hanyalah melindungi rakyat menegakkan keadilan dan menyediakan sarana dan prasarana umum. Adam Smith mengalami perjalanan ilmiah ke Eropa setelah berhenti mengajar filsafat di Universitas Glasgow, kemudian berkenalan dengan Quesnay, Turgot, dan Voltair. Perjalanan tersebut menghabiskan waktu 10 tahun dan kemudian kembali ke Kirkaldy dan mengajar kembali di kampusnya, Universitas Glasgow yang kemudian melahirkan sebuah judul buku *The Theory Of Moral Sentiments*, terbit 17 tahun mendahului buku *The Wealth Of Nation* (Smith 2010).

2. David Ricardo (1772-1823)

Dilahirkan pada tahun 1772 di Inggris dan tidak pernah mengikuti pelajaran formal di Perguruan Tinggi. Merupakan seorang praktisi dari keluarga pedagang sebagai *stock broker* yang terkenal dengan bukunya *Principles Of Political Ekonomi And Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817. Mengembangkan teori nilai yang terkenal dengan *Labor Theory Of Value*. Memiliki kemampuan komunikasi dan pergaulan yang luas mengantarkannya berkenalan dengan James mill, Jeremy Bentham, dan Jean Baptiste Say. Sebagai salah satu pakar Mazhab Klasik, Ricardo dikenal sebagai seorang pemikir yang paling menonjol. Kelebihannya adalah karena kecermatannya dalam berpikir, dan metode pendekatannya hampir seluruhnya menggunakan deduktif.

Ada 4 pokok perangkat teori yang dikembangkan oleh Ricardo, yaitu (1) teori tentang nilai dan harga barang, (2) teori tentang distribusi pendapatan, (3) teori tentang perdagangan internasional, (4) teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi (Aprilia 2021).

3. Alfried Marshall (1842-1924)

Merupakan tokoh perintis pemikiran ekonomi neo-klasik dan seorang Guru Besar dari Universitas Cambridge dan mengampu mata kuliah Ekonomi Politik. Sebagai ekonom juga menjadi komentator dalam masalah-masalah pemerintahan. Karyanya yang paling terkenal adalah *The Principles Of Economics* terbit tahun 1890. Pemikirannya merupakan sintesa antara pemikiran pemula dari Marginalis dan pemikiran klasik tentang teori nilai. Menurutnya, mekanisme pasar dilahirkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Kedua kekuatan ini bekerja seperti dua mata gunting. Ongkos produksi merupakan pendukung aspek penawaran dan teori kepuasan marginal adalah sisi permintaan (Suprpto 2021).

4. John Maynard Keynes (1883-1946)

Dilahirkan pada Tahun 1883, seorang ahli ekonomi politik dan logika. Menerbitkan buku yang berjudul *Scope And Method Of Political Economy*, pada Tahun 1891. Kemudian menerbitkan buku lagi dengan judul *The General Theory Of Employment Interest And Money*, pada 45 tahun kemudian. Di samping mengajar di Cambridge dalam Mata Kuliah Ekonomi, juga seorang Editor pada *Economic Journal* selama sekitar 35 tahun. Namanya sangat dikenal dan memiliki jabatan setara Menteri Keuangan. Setelah berhenti bekerja di Kementerian lalu menulis buku *Economic Consequences Of The Peace*. Telah banyak menulis buku dengan pemikiran yang menggugah teori-teori sebelumnya sehingga berakibat berhentinya Keynes dari Menteri Keuangan karena dipersonanongratakan. Merupakan murid dari Marshall, sehingga dibesarkan dalam tradisi Cambridge di mana Keynes mengembangkan teori

ekonomi makro yang dikembangkan sebelumnya oleh para pemikir Neo-Klasik (Davidson 2015).

2.3 Pemikiran Ekonomi Pra-Klasik

Pemikiran-pemikiran ekonomi pada pra-klasik memiliki rentang waktu yang panjang dan di dalam buku ini akan menjelaskan sesingkat mungkin. Sebagai gambaran awal bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tahap Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pra-Klasik

Masa Purba (500 tahun sebelum Masehi)
Yunani Kuno (Plato, Aristoteles, Stoics)
Skolastik (Thomas aquinas: 1225 -1247)
Merkantilisme (1500 -1800)
Fisiokrat (1750 -1780)

Sumber: Diadaptasi dari Suprpto (2021)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kegiatan ekonomi sudah ada sejak zaman Masa Purba. Pada era tersebut kegiatan ekonomi sangat sederhana. Baru pada masa Yunani Kuno lebih sistematis.

2.3.1 Pemikiran-pemikiran Ekonomi Pra-Klasik

Aristoteles dan Plato merupakan tokoh filsuf yang merintis pemikiran ekonomi. Pemikiran Plato adalah tentang pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja ini membagi tiga golongan masyarakat. *Pertama*, sebuah negara akan maju apabila membagi kerja apa yang lahir secara alamiah dalam masyarakat. Plato membaginya dengan tiga bagian. *Pertama*, golongan rakyat jelata dan karyawan. *Kedua* penjaga dan pelaksana urusan negara

dan tidak punya kepentingan untuk mengejar harta, sehingga dengan demikian betul-betul mengabdikan kepada negara. *Ketiga*, para filsuf dan pejabat tinggi negara yang mengawasi undang-undang dan membuatnya serta mereka harus selalu memperdalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Aristoteles yang merupakan murid Plato memiliki pemikiran yang terkenal tentang teori nilai dan harga. Teori ini merupakan pengembangan dari teori pertukaran barang (*exchange commodities*) sedangkan teori harga adalah pengembangan dari pemikiran kegunaan uang dalam pertukaran barang.

Pada abad ke-15 di Eropa terjadi proses dimulainya industrialisasi. Cabang ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Ekonomi mulai bermunculan, yaitu cabang Ilmu Sosial yang dengannya melahirkan Aliran Skolastik. Paham ini dipengaruhi oleh Ajaran Gereja yang mengaitkan antara analisis ekonomi dengan etika dan memberikan perhatian yang besar terhadap prinsip keadilan. Tokoh pelopor dalam Aliran Skolastik ini adalah ST. Albertus Magnus (1206-1280) dan ST. Thomas Aquinas (1225-1274). Salah satu pandangan Albertus yang paling terkenal adalah tentang pemikiran harga yang adil dan pantas (*just price*) di mana harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Untuk menciptakan suatu produk, penetapan harga atas biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk pengorbanan lain saat membuat produk dianggap memenuhi syarat harga yang adil dan pantas. Apabila melanggar etika dan menetapkan harga yang tidak pantas, maka hal tersebut tidak layak dihormati (Hasibuan and Armayani 2020).

Sedangkan tokoh kedua, yaitu Thomas Aquinas seorang Filsuf dan Teolog dari Italia salah satu ajaran Thomas dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles dan ajaran Injil. Pandangannya yang terkenal adalah ketidaksetujuannya tentang harga barang dan bunga uang yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi dan Kaum Romawi. Pada saat itu diizinkan menjual barang dengan harga melampaui di atas harga yang pantas dan membelinya di

bawah harga yang pantas. Ketidaksetujuannya juga terjadi dalam pengenaan bunga terhadap uang yang dipinjamkan. Karena menurut Thomas, bunga uang itu adalah riba. Alasannya, Karena mendapatkan laba dari proses meminjamkan uang tanpa melalui usaha memunculkan adanya bunga tersebut disebutnya sebagai ketidakadilan dan itulah yang disebut dengan riba.

Pandangan tentang riba ini, juga dianalisis oleh kaum Merkantilisme dan Fisiokrat terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi suatu negara dan perilaku ekonomi masyarakat. Pemikiran kaum Merkantilisme dan Fisiokrat melahirkan kebijakan dalam mengon-trol kegiatan ekonomi seperti kebijakan fiskal, ekspor-impor barang dan jasa, proteksi, memajukan industri dan moneter. Pemikiran kaum merkantilis berorientasi pada industri dan perdagangan. Karenanya, Adam Smith menyebut kelompok ini dengan *Mercantile system* atau *sistem of commerce*. Merkantilis berjaya di Eropa pada abad ke-16 sampai 17. Tokoh-tokoh aliran ini diantaranya William Petty, Thomas Mun, Colbert, Crowell dan Cantillon.

Fisiokrat lahir sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran Mazhab Merkantilisme menurut kaum Fisiokrat sumber kekayaan yang sebenarnya adalah sumber daya alam. Kritik yang dilontarkan oleh kaum fisik terhadap pemikiran merkantilis bahwa Prancis akan hancur karena kegiatan industri, perdagangan, akan tetapi kekuatan alam lah yang produktif. kegiatan perbankan juga bukanlah kegiatan yang produktif. Tokoh-tokoh Mazhab Fisiokrat yang terkenal di antaranya adalah William Petty, John Lockema turgot, Francois Quiz Nai, dan Richard cantillon (Suprpto 2021).

2.3.2 Pemikiran Ekonomi Markantilisme

Aliran merkantilisme dianut banyak negara Eropa, diantaranya adalah Belanda, Prancis, Spanyol, Inggris dan Portugis. Paham ini menegakkan pada perdagangan Luar Negeri, sehingga perdagangan mereka tidak hanya dilakukan di negara-negara Eropa tetapi juga sampai di Indonesia. Negara-negara Eropa

menjalankan misi perdagangan ke Indonesia awalnya adalah untuk merebut rempah-rempah, dan perkembangan berikutnya adalah mengamankan jalur perdagangan yang pada akhirnya terjadi penjajahan. Ada tiga pokok Ajaran Merkantilisme, *pertama*, surplus neraca perdagangan. *Kedua*, kuantitas uang, dan mekanisme aliran logam mulia. Dan *ketiga*, tentang proteksi industri (Adilah 2021).

2.3.3 Pemikiran Ekonomi Fisokrat

Sekilas mengenai industrialisasi di Perancis menjelang berakhirnya zaman Merkantilis di awal tahun 1756, bahwa perbedaan dengan kaum Merkantilis adalah ketika mereka menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Namun kaum Fisokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang nyata nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran *physiocratism*, dengan istilah “*physiocrats*”, berasal dari Bahasa Yunani, dari kata “*physis*” artinya adalah alam, dan “*cratain*” atau “*cratos*” berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti “Supremasi Alam”, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam merupakan sumber dari kekayaan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Mereka percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh dengan harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri saja manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing (Galuh, Utami, and Widiyanti 2022).

Ada tiga hal yang membuat Kaum Fisiokrat terkenal, yaitu:

1. Pengikut aliran Fisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah cara yang bersifat objektif ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyuruh dan lengkap.

2. Aliran ini mencetuskan istilah "*laissez faire*" yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik.
3. Kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional, dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat.

2.4 Pemikiran Ekonomi Klasik

Pada teori ekonomi klasik ini ada tiga pendapat para ahli, yang terkenal, yaitu dari teori Adam Smith, teori dari David Ricardo dan juga teori dari Thomas Robert Malthus.

2.4.1 Teori Adam Smith

Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian di suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi, jika ada penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan untuk proses produksi barang dan jasa. Semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Negara yang mengami pertumbuhan ekonomi ditandai dua faktor, yaitu pertumbuhan pendduduk dan pertumbuhan output total (Smith 2010).

2.4.2 Teori David Ricardo

Bila Adam Smith memiliki teori bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lain halnya dengan Teori David Ricardo. David menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar atau hingga dua kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Dari melimpahnya tenaga kerja ini akan membuat upah tenaga kerja turun. Karena semakin banyak penawaran atas tenaga kerja, maka

perusahaan akan mudah dalam mencari tenaga kerja. Sehingga memberikan tawaran upah yang lebih rendah kepada tenaga kerja.

Karena upah tenaga kerja yang rendah, maka nantinya tenaga kerja hanya bisa memenuhi kebutuhan yang primer saja. Dan tidak ada perkembangan dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga, hal ini akan memperlambat kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, pada tahap ini perekonomian mengalami stagnasi. Dan tidak ada pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulan dari teori ini penambahan penduduk juga harus diimbangi dan dikontrol sehingga tidak terlalu melimpah (Aprilia 2021).

2.4.3 Teori Thomas Robert Malthus

Dalam teorinya, Thomas Robert Maltus menyatakan, bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membuat jumlah pangan yang tersedia menjadi terbatas. Karena pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah pangannya. Untuk itu menurut teori malkus pertumbuhan penduduk bertumbuh dua kali lipat. maka pertumbuhan penduduk bertambah menurut deret ukur, yaitu: 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Sedangkan jumlah pangan bertambah menurut deret hitung, yaitu: 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena jumlah penduduk yang penduduk terus tumbuh hingga dua kali lipat, sedangkan jumlah pangan yang tersedia didapat dari sumber daya alam yang ada dan sumber daya alam ini juga terbatas, akibatnya jumlah pangan yang tersedia tidak dapat mengimbangi jumlah penduduk yang bertambah sehingga jumlah pangan yang ini terbatas dari sumber makanan yang ada tidak akan cukup untuk menghidupi penduduk dan membuat pertumbuhan ekonomi mengalami stagnan (Muna and Qomar 2020).

Jadi, pada Teori Ekonomi Klasik ini pendapat para ahli mengkaitkannya dengan pertumbuhan penduduk di mana Adam Smith menyatakan penambahan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pernyataan ini bertentangan dengan David Ricardo dan Thomas Robert Paulus yang

berpendapat bahwa penambahan penduduk akan membuat perekonomian mengalami stagnan yang berarti suatu negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi.

2.5 Ekonomi Sosial

Selanjutnya, kita akan membahas seputaran ekonomi sosialisme. Dan tentunya kita harus tahu dulu, apa ekonomi sosialisme itu. Ekonomi sosialisme merupakan ekonomi yang sepenuhnya diatur oleh negara. Biasanya sistem ekonomi sosialisme ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat, karena semuanya itu diatur oleh negara. Ciri-ciri dari ekonomi sosialisme itu yaitu semua alat dan sumber produksi dimiliki oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Kemudian pemerintah melakukan perencanaan tersebut yang menyangkut tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu, perekonomian negara menggantikan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi liberal (Effendi 2019).

Ekonomi sosialisme ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yaitu tidak adanya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. Dengan kata lain, pemerintah tersebut bersifat adil kepada seluruh masyarakatnya. Pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Kekurangannya, yaitu kurangnya kebebasan dalam kita berkegiatan ekonomi pada masyarakat tersebut, karena semuanya diatur oleh pemerintah. Selain itu, kita harus tahu dari mana datangnya ekonomi sosial di dunia ini. Sistem ekonomi sosialis ini muncul akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh Revolusi Industri. Revolusi Industri ini memang memberikan keberkahan buat pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak para pekerja justru malah semakin miskin.

2.5.1 Kritik Terhadap Pemikiran Ekonomi Klasik

Kritik terhadap sistem ekonomi sosialis dapat dilihat berdasarkan konsep dan asas yang membangun sistem ekonominya. Antara lain yang pertama yaitu konsep materialisme, yang *kedua* asas yang membangun sistem ekonomi sosialis.

Kita akan membahas kritik terhadap konsep materialisme. Materialisme sendiri merupakan paham yang berpendapat bahwa membedakan benda dua yang menjadi sebab segala yang ada dan terjadi di dunia ini, di mana materi bersifat *azali*. Paham ini juga mengesampingkan Agama dan menganggap agama sebagai candu. Dari segi konsep berpikir di atas nampak bahwa materialisme tidak sesuai dengan logika, tetapi materi. Hal ini karena materi dianggap sebagai ujung asal segalanya, termasuk pemikiran. Adanya materi lebih dahulu dibandingkan akal atau pikiran. Di satu segi materialisme juga berlawanan dengan fitrah manusia yang memiliki naluri Agama. akibat dari paham semacam ini maka kehidupan manusia dipisahkan dengan tuhan nya secara mutlak yang menyebabkan manusia hidup tanpa aspek kerohanian. Inilah yang menjadi ciri khas dari sistem sosialisme. Begitu pula aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek yang lainnya.

Kemudian kritik terhadap asas yang membangun sistem ekonomi sosialis. Yang *pertama*, yaitu kritik terhadap ide kesetaraan. Dari segi kesetaraan yang hendak diwujudkan dalam sosialisme yaitu kesetaraan barang dan jasa atau kesetaraan total. Ide ini jelas mustahil diwujudkan, karena konsep ini merupakan khayalan atau hipotesis yang mengada-ngada. Karena kesetaraan dari segi bahwa antara a dan b mesti sama, itu tidak mungkin terjadi. Sehingga kesetaraan ini benar-benar tidak akan mungkin terjadi. *Kedua*, kritik terhadap ide menghapuskan kepemilikan individu. Mengenai penghapusan kepemilikan individu ini secara mutlak juga bertentangan dengan fitrah manusia (Galuh, Utami, and Widiyanti 2022).

2.5.2 Jhon Stuart Mill

Pada tahun 1848 Jhon Stuart Mill mempublikasikan buku teksnya yang berjudul *Principle of political Economy* yang diterbitkan hingga edisi ke-32. Pada halaman 155 buku ini, menyatakan bahwa hukum produksi ditetapkan secara objektif, namun buku distribusi adalah Variabel. Pada halaman 159 dia menambahkan bahwa jika harus memilih antara komunisme dan semua tawaran dengan keadaan masyarakat sekarang, masyarakat yang penuh ketidakadilan dan penderitaan maka semua kesulitan besar atau kecil atau komunisme tak lebih adalah debu di dalam rekening. Dapat disimpulkan, bahwa buku *Principle of political Economy* sangat Ricardian, yang menfokuskan pada pendapatan bukan pada pertumbuhan (Suprpto 2021).

Jhon Stuart Mill adalah cendekiawan besar, tokoh liberal klasik dan pendukung aliran ekonomi klasik. Mill mendorong kebebasan personal dan membela hukum pasar yang merupakan landasan makro ekonomi klasik. Keberatan terhadap moralitas yang dipaksakan intoleransi dan negara beragama. Ia juga seorang *abolisionis* yang mendukung hak perempuan untuk memilih. Mill terkenal dengan ketidakkonsistennya dan kontradiksinya. Mengapa begitu, karena ia membela kebebasan berusaha, tetapi ia mengaku sosialis. Ia berselingkuh dengan sosialisme sepanjang karirnya, mendukung perubahan revolusioner dalam kultur *viktorian*, mencemaskan perkembangan penduduk, dan mendukung Teori Distribusi Ricardo.

2.5.3 Ekonomi Sosialis: Utopia dan Ilmiah

Gagasan sosialisme awal ini yang kemudian oleh Karl Max itu disebut sebagai Sosialisme Utopis atau Sosialisme Utopia. Jadi orang-orang yang kita sebut pemikir-pemikir sosialisme awal sebagai sosialisme itu karena dia mengkritik pemikiran-pemikiran mereka dan menciptakan sosialisme baru (Rahman 2017).

Sosialisme Utopis ini sebenarnya pada prinsipnya menginginkan masyarakat yang stabil. Mereka menginginkan

masyarakat yang setara. Mereka menginginkan masyarakat yang *equal*. Mereka menginginkan masyarakat yang tidak ada ketimpangan, tidak ada kaya, Tidak ada miskin. Semua orang sama, tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang merasa bodoh. Kenapa bisa muncul pemikiran seperti ini? Sebenarnya pemikiran sosialisme ini pada awalnya muncul sebagai respon dari Revolusi Perancis itu sendiri.

Pasca Revolusi Perancis itu kemudian muncul pemikiran sosialisme ini. Karena pasca terjadinya Revolusi Perancis itu terjadi distrupsi yang begitu besar di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan *distrupction sociaty* itu adalah masyarakat yang justru menjadi rusak karena kemajuan-kemajuan itu. Ada banyak akibat-akibat sosial yang diciptakan oleh Revolusi Perancis. Misalnya dengan penggunaan mesin, maka banyak tenaga kerja yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada banyak orang yang menjadi penganggur. Di satu sisi muncul golongan-golongan kaya baru itu, yang menjadi kaya lataran Revolusi Perancis. Dia terlibat dalam proses industrialisasinya. Tapi ada orang yang kemudian menjadi justru semakin miskin, sebab dia tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja dan sebagainya. Sehingga muncul ketimpangan yang sangat ekstrim dan itu berlaku secara alamiah, tidak ada unsur tanggung jawab pemerintah. Karena itu, sosialis berkembang berdasarkan oleh sebab-akibat. Muncullah pemikir-pemikir baru yang memberikan gagasan baru bahwa seharusnya kehidupan tidak seperti itu (Deliarnov 2016).

Mereka juga menerbitkan buku-buku yang kemudian punya pengaruh yang luas di masyarakat. Pengaruh yang luas di masyarakat inilah yang kemudian menjadikan dia sebagai salah satu arus pemikiran dan salah satu mazhab yang penting pada masanya. Dia berhasil menciptakan masyarakat, pengikut-pengikut yang dipengaruhi, bahwa seharusnya kehidupan sosial masyarakat itu seperti ini. Yaitu, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang yang menjadi bos dan anak buah, tidak

ada orang yang lebih superior dan interior. Tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Itulah prinsip pemikiran awalnya sosialis.

Pemikir utama dari sosialisme awal ini, atau sekarang disebut Sosialisme Utopis, yang paling menonjol itu adalah Robert Owen namanya. Dalam pemikiran-pemikirannya menuliskan bahwa masyarakat itu tidak seharusnya saling berkompetisi, tetapi masyarakat itu seharusnya saling supportif satu sama lain. Kemudian dari pemikiran Owen ini, dia melakukan berbagai langkah yang membuatnya semakin populer, dan pemikirannya menjadi semakin populer juga. Dia menjual semua asetnya lalu kemudian digunakan untuk memberdayakan masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi *egaliter*. Dia membentuk suatu komunitas yang tidak ada satupun pengikutnya itu yang miskin. Jadi, keuntungan-keuntungan usahanya dia berikan kepada karyawannya, anggota komunitasnya dan sebagainya. Sehingga, dia menjadi sangat populer pada masanya dan pemikiran-pemikirannya juga menjadi berkembang sangat luas, diikuti oleh banyak orang.

Pemikiran Robert Owen ini kemudian menjadi semakin sempurna ketika Charles Fourier (1772) menulis sebuah tulisan kayak Novel. Di bukunya bercerita tentang sebuah pulau yang diberi nama Pulau Utopia. Pulau Utopia ini sebenarnya adalah imajinasi. Istilah Utopia pertama itu muncul diperkenalkan olehnya, karena dia bikin cerita bahwa di Pulau itu masyarakatnya hidup dengan cara tertentu yang berbeda. Fourier menjelaskan di bukunya itu, bagaimana masyarakat hidup dalam sebuah pulau yang disebut Pulau Utopia itu dengan pandangan-pandangan Robert Owen, dan pandangannya dia juga. Sehingga orang ketika membaca novel itu membayangkan, seharusnya kehidupan itu seperti ini. Sehingga dia banyak pengikut. Arus pemikiran ini menjadi penting pada masanya. Karena dia datang sebagai pemikir alternatif dari revolusi yang sedang berkembang (Maruta 2014).

2.6 Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik

Kritik Karl Marx kepada aliran klasik melahirkan sosialisme. Kebencian Karl Marx pada kapitalisme melahirkan mazhab sosialisme, melahirkan ekonomi sistem ekonomi sosialisme. Meski gagasan-gagasannya banyak ditolak dan ramalan keruntuhan kapitalisme Utopia, namun sosialisme mampu membuat kapitalisme berhasil membenahi dirinya. Jadi kapitalisme mampu memperbaiki dirinya memulai dirinya ini karena habis-habisan oleh Karl Marx. sehingga kemudian kapitalisme berubah wujud menjadi Neo-Klasik. Sosialisme tidak laku di negara-negara kapitalisme yang paling maju, sebagaimana ramalan Karl Marx. Karl Marx meramalkan sosialisme akan maju di Inggris, Jerman, Amerika, tapi justru di Inggris, Jerman, Amerika itu tidak laku. Melainkan berkembang di Rusia oleh Lenin. itupun sekarang juga tenggelam juga. Itulah ide sosialisme (Magnis-Suseno 1999).

Pemikir yang mampu memperbaiki cacat kapitalisme pasca kritikan Marx disebut Mazhab Neo-Klasik. Misalnya Karl Menger (1840-1921) di Austria, Leon Walras di Lausanne Swiss, Alfred Marshal dari Cambridge University Inggris, Friedrich List, WW. Rostow dari Oxford Britania, Marx Weber di Berlin Jerman, dan lain lain. Meskipun mereka itu melakukan penelitian tempat yang berbeda-beda, di Austria, yang di Swiss, ada yang di Inggris, Jerman, namun hasil kesimpulan penelitiannya sama. Yaitu, mengatakan bahwa teori Marx tentang *Surplus Labor Value* tidak berhasil menjelaskan nilai komoditas, dan tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada ilmu pengetahuan. Karena teori Marx tentang *Surplus Labor Value* itu akan memunculkan akibat demotivasi dimana tidak adanya motivasi sama sekali pada manusia. manusia dilarang rakus adalah sesuatu yang tidak mungkin. Makanya kemudian tidak menyumbangkan ilmu pengetahuan secara signifikan. Bedanya dengan teori klasik, kalau teori klasik banyak menitikberatkan pembahasannya pada: faktor-faktor ekonomi, peraturan kerja, struktur formal organisasi, rasionalitas tujuan,

yang intinya pada *minded* pada materi harus bebas karena kerakusan tadi, maka pada teori Neo-Klasik banyak menekankan pentingnya aspek sosial, etika, psikologi, spiritual, emosi dan sebagainya. Di situ ada pergeseran paradigma dalam pekerjaan bisnis, dari *materi minded* (karena kerakusan seseorang) menuju *materi-immateri*. Ada unsur kasihan, ada unsur kemanusiaannya, etika, psikologi dan lain sebagainya (Aravik, Hamzani, and Khasanah 2022).

2.6.1 Teori Utilitas Marginal – Karl Menger (Jerman, 1840-1921)

Menurut Karl Menger, tambahan konsumsi suatu barang akan meningkatkan total utilitas, tetapi tambahan konsumsi secara terus-menerus bisa mengakibatkan tambahan total utilitas semakin mengecil. Seseorang lapar kemudian dia makan maka akan menambah kegunaan dari barang itu. Jika makan satu sendok kemudian masih belum kenyang, bahkan 2 sendok masih belum kenyang, terus tambah sepiring belum juga kenyang, tiga piring, sampai kalau pada titik tertentu maka nilai kegunaan dari makanan itu akan menurun, akan mengecil. Pertumbuhan yang semakin memenuhi ini disebabkan oleh menurunnya utilitas marginal. Jadi kalau digambarkan garis sepertikurva yang berbentuk mirip gunung, maka pada titik puncak inilah utilitas marginal. Ilustrasinya, ketika lapar dia makan, satu sendok, dua sendok, satu piring, dua piring, tiga piring. Begitu puncaknya kenyang, disitulah utilitas marginal. Kemudian akan menurun, makan, minum, sehingga utilitas marginal akan bertambah banyak barang yang dikonsumsi itu malah akan menurunkan pertumbuhan yang semakin mengecil. Ini disebabkan oleh menurunnya utilitas marginal akibat bertambah banyaknya barang yang dikonsumsi. utilitas marginal menurun akibat turunnya selera. Jadi dia memperhatikan selera, nafsu, dan hasrat terhadap barang akibat pertamanya konsumsi barang tersebut (Galuh, Utami, and Widiyanti 2022).

2.6.2 Teori Keseimbangan Umum – Leon Walras (Prancis, 1834-1930)

Leon Walras menguraikan bahwa perubahan suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam ekonomi tersebut secara menyeluruh. Dalam bukunya Ia menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. jadi dia lebih dianggap sebagai Bapak Ekonometrika. Cara menjelaskannya dengan logika bilangan; ekonometrika. Ekonomi-trika itu adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomika adalah ilmu yang mencakup: teori ekonomi teori matematika, dan teori statistik dalam satu kesatuan sistem yang bulat. ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema-teorema teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel dengan data empirik. Itulah ekonometrika: ekonomi dan matematika, tambah statistika (Susilo 1999).

2.6.3 Teori Titik Equilibrium - Alfred Marshall (Britania, 1842-1924)

Kemudian Alfred Marshall dia mengeluarkan Teori Titik *Equilibrium* jadi menurut ekonomi klasik harga itu kan ditentukan oleh pengorbanan yang menghasilkan barang. Pengorbanan tenaga kerja untuk menghasilkan barang itu jauh seberapa banyak. Maka ini berarti orientasinya ke teori klasik. orientasinya ke sisi penawaran. harga diperlukan dari sisi penawaran. Sementara neoklasik orientasinya ke sisi permintaan. Mereka kemudian ada ada adopsi sedikit karena pengaruh sosialisme sehingga teori neoklasik ini memperhatikan permintaan. Tapi bagi Marshall, harga itu ditentukan oleh dua sisi kekuatan di pasar, yaitu kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan. Ketika kekuatan *supply* dan kekuatan *demand* bertemu maka disitulah muncul *equilibrium*. Maka pasar menjadi normal, persaingannya sehat; menjadi pasar yang sempurna. Makanya kemudian Marshall dianugerahi sebagai

bapaknya ekonomi neo-klasik (SastroAtmodjo, Sukrisno, and Susilowati 2021).

2.6.4 Aliran Sejarah

Aliran sejarah ini, tokoh-tokohnya ada Friedrich List, Bruno Hildebrand, WW. Rostow, Marx Weber dan Bunde Veblen. Teori-teori ekonomi lahir dari kecerdasan para filsuf yang berhasil menarasikan berbagai fenomena ekonomi dalam sejarah kehidupan. Menurut aliran sejarah teori ekonomi tidak bisa dilepaskan dari fenomena sosial sejarah di masyarakat yang memproduksinya. Jadi menurut aliran sejarah ini ekonomi tidak bisa dilepaskan tidak bisa dilepaskan dari fenomena sosial yang memproduksinya. Meski tidak memiliki kesimpulan khas tentang perekonomian suatu masyarakat, karena berbeda-beda mereka itu dalam memandang sosial masyarakatnya masing-masing, tapi mereka menyumbang metode berpikir induktif bukan deduktif seperti gagasan aliran klasik dan klasik. Jadi kalau klasik berani untuk mengatakan agar negara tidak terlibat dalam perekonomian, tapi kalau menurut induktif (Aliran Sejarah) negara harus terlibat dalam perekonomian. tapi induktif sifatnya berbasis pada empirisme masyarakat atau fenomena masyarakat masing-masing. Menurut aliran sejarah, perilaku ekonomi seseorang tidak sekedar termotivasi oleh kerakusan (*hedonisme*) atau nilai manfaat marginal suatu barang (*utilitarianisme*), tapi juga dipengaruhi oleh sosial, tradisi, agama, adat istiadat di sekitar tempat seseorang itu hidup (Darmawati 2020).

1. Friedrich List, mengatakan bahwa perkembangan ekonomi hanya akan terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan organisasi politik dan kebebasan perorangan. Perkembangan ekonomi menurut List, melalui 5 tahapan: tahapan primitif, kemudian tahapan berternak, tahapan pertanian, tahapan industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-

tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkan pada cara produksi, sehingga menentukan alat produksinya apa.

2. Hildebrand, mengatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada acara produksi. Jadi karakter sejarah itu priodik per priodik. Apabila menurut List, perkembangan ekonomi itu didasarkan pada periode primitif, beternak, pertanian, dan dari cara produksinya, tapi menurut Hildebrand bukan pada cara produksi atau cara konsumsi melainkan pada cara distribusi. Maka kemudian ada perekonomian barter. Kalau produksi hanya memperhatikan perusahaan; kalau konsumsi karena hanya memperhatikan konsumen, tapi dengan distribusi justru memperhatikan dua pihak tadi. Makanya ada istilah perekonomian barter, perekonomian uang dan perekonomian kredit. Namun Hildebrand tidak menjelaskan proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya. Selain itu, Hildebrand juga tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analisis di bidang ilmu ekonomi.
3. WW. Rostow, menurutnya proses pembangunan ekonomi itu bisa diterapkan ke dalam 5. Dan ini menginspirasi Indonesia pada masa orde baru oleh Bapak pembangunan kita Bapak Presiden Suharto. Diantaranya, (1) Masyarakat Tradisional, (2) Prasyarat untuk tinggal landas, (3) Tinggal landas, (4) Menuju ke Kedewasaan, (5) Masa konsumsi tinggi.
4. Marx Weber, menurutnya sebab akibat dalam sejarah tidak selamanya didasarkan pada motif-motif ekonomi belaka. Weber menunjukkan bahwa ide-ide religius dan etis, justru memiliki pengaruh dalam proses pematangan kapitalisme di tengah masyarakat masyarakat Eropa. Sementara kapitalisme sulit memantapkan diri di dunia bagian Timur oleh karena perbedaan religi dan filosofi hidup dengan yang di Barat. Weber menunjukkan bahwa golongan Protestan

terutama kaum Calvinis menduduki tempat teratas dari kaum Katolik. Sebagai analogi Weber memberikan gambaran, bahagia menurut Protestan itu ketika bisa makan kenyang, sementara menurut Katolik bahagia itu tidak bisa tidur nyenyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, Azizah Nur. 2021. "Sejarah Konsep Pemikiran Merkantilisme."
- Aprilia, Aninda. 2021. "Teori Ekonomi David Ricardo."
- Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah. 2022. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit NEM.
- Darmawati, Darmawati. 2020. *Etika Bisnis Islam*. Bening Media Publishing.
- Daud, Nahu. 2021. *Pemikiran Dan Perbandingan Sistem Ekonomi*. Zifatama Jawa.
- Davidson, Paul. 2015. *John Maynard Keynes*. DUNCKER UND HUMBLOT.
- Deliarnov. 2016. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Syamsul. 2019. "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6 (2): 147–58.
- Galuh, Ajeng Kartika, Anisa Fitria Utami, and Dwi Retno Widiyanti. 2022. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasibuan, and Reni Ria Armayani. 2020. "Buku Ajar Perekonomian Indonesia."
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maruta, Heru. 2014. "Sejarah Sistem Ekonomi." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3 (1): 647–58.

- Muna, Titin Izzatul, and Mohammad Nurul Qomar. 2020. "Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2 (1): 1–14.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2020. "Konsep Penelitian Kualitatif plus Tutorial NVivo." *PT. Filda Fikrindo, Bogor*.
- Rahman, M Taufiq. 2017. "Fenomena Sosialisme Kontemporer1."
- SastroAtmodjo, Sunarno, Andy Sukrisno, and Eka Susilowati. 2021. *Teori Ekonomi Mikro*. Media Sains Indonesia.
- Siregar, Budi Gautama, and H Ali Hardana. 2022. *Metode Penelitian EKonomi Dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.
- Smith, Adam. 2010. *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Harriman House Limited.
- Suprpto, M S. 2021. "Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Kontroversi."
- Susilo, Y Sri. 1999. "Model Keseimbangan Umum Terapan: Suatu Gambaran Umum." *Economic Journal of Emerging Markets*, 1–10.

BAB 3

EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh Suharno

3.1 Pendahuluan

Kita mengenal ekonomi pembangunan yang diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang yang menitikberatkan pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung peningkatan kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi Pembangunan juga merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi yang secara khusus mempelajari masalah-masalah pembangunan yang telah, sedang, dan akan terjadi di negara-negara berkembang. Pengembangan tersebut meliputi perbankan, keuangan, industri, dan bisnis.

Selain itu, juga disajikan analisis berbagai persoalan ekonomi untuk kemudian mencari dan menemukan solusi atas berbagai persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian memberikan kesiapan kepada setiap komponennya untuk menjadi perencana di bidang pembangunan ekonomi sehingga dapat turut menciptakan kesejahteraan bersama. Berdasarkan hal tersebut, ekonomi pembangunan berusaha menyajikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi pembangunan dalam menjalankan roda perekonomiannya guna terciptanya perekonomian yang berkualitas dan kuantitas.

Untuk itu, dengan diadakannya ekonomi pembangunan sebagai bagian dari upaya diskusi yang terus berkembang

sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah ilmu di bidang ekonomi pembangunan. Tidak seperti di banyak bidang ekonomi lainnya, pendekatan dalam ekonomi pembangunan dapat menggabungkan faktor sosial dan politik untuk menyusun rencana tertentu. Juga tidak seperti banyak bidang ekonomi lainnya, tidak ada konsensus tentang apa yang harus dipahami siswa. Pendekatan yang berbeda dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konvergensi atau non-konvergensi ekonomi di seluruh rumah tangga, wilayah, dan negara (Todaro, 2006; Suharno, 2023).

3.2 Teori Pembangunan Ekonomi

3.2.1 Mazhab Historismus

Mazhab Historismus ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Fenomena ekonomi adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah. Mazhab ini mendominasi pemikiran ekonomi di Jerman selama abad XIX sampai awal XX. Mazhab Historis berpendapat bahwa kaum klasik adalah "mekanis". Mengkritisi pemikiran para ekonom klasik karena sempitnya pendekatan (*approach*) terhadap kehidupan ekonomi yang didasarkan atas suatu psikologi hedonistik. Mengharuskan adanya suatu metode induktif.

1. *Friedrich List* (Cara Produksi)

List dipandang sebagai pelopor yang meletakkan landasan bagi pertumbuhan pemikiran ekonomi mazhab Historismus ini. Menurut List, sistem liberalisme yang *laissez-faire* dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya akan terjadi, jika dalam masyarakat ada

kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan.

Perkembangan ekonomi, menurut List, melalui 5 tahap yaitu tahap primitif, beternak, pertanian, pertanian dan industri pengolahan (manufacturing), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkan pada "cara produksi"-nya.

Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian masih kurang efisien.

2. Bruno Hildebrand (Cara Distribusi)

Pemikiran Hildebrand selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. Sebagai kritiknya terhadap List, Hildebrand mengatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada "cara produksi" ataupun "cara konsumsi", tetapi pada "cara distribusi" yang digunakan. Oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

- a. Perekonomian Barter (natura)
- b. Perekonomian Uang
- c. Perekonomian Kredit

Sayangnya, Hildebrand tidak menjelaskan proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya. Selain itu, Hildebrand juga ternyata tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analitis di bidang ilmu ekonomi.

3. Karl Bucher (Produksi & Distribusi)

Pendapat Bucher merupakan sintesa dari pendapat List dan Hildebrand. Menurut Bucher, perkembangan ekonomi melalui 3 tahap yaitu:

- a. Produksi untuk kebutuhan sendiri (subsistem)

- b. Perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas
- c. Perekonomian nasional di mana peran pedagang menjadi semakin penting.

4. Walt Whitman Rostow

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (*linear stages model*).

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu :

- a. Masyarakat tradisional (*the traditional society*),
- b. Prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*),
- c. Tinggal landas (*the take-off*),
- d. Menuju kekedewasaan (*the drive to maturity*), dan
- e. Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*)

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah: Karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik, yang terjadi.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

- (1) Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
- (2) Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
- (3) Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.
- (4) Perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap pertasi perorangan dan sebagainya).

1) Masyarakat Tradisional

Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif (yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton) dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun. Tingkat produktivitas per pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumberdaya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini, struktur sosialnya bersifat hirarkhis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil. Maksudnya adalah bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengan nenek moyangnya.

Sementara itu kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa

walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para tuan tanah yang ada di daerah tersebut. Kebijakan pemerintah pusat selalu dipengaruhi oleh pandangan para tuan tanah di daerah tersebut.

2) Tahap Prasyarat Tinggal Landas

Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*selfsustained growth*). Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak. Pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang *born free* (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, di mana negara-negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara-negara tersebut yang terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap prasyarat tinggal landas.

Seperti telah diungkapkan di muka, Rostow sangat menekankan perlunya perubahan-perubahan yang multidimensional, karena tidak yakin akan kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan akan dapat dengan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan. Menurut pendapat tersebut tingkat tabungan yang tinggi akan mengakibatkan tingkat investasi tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional. Namun

menurut Rostow pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itulah yang akan memungkinkan terjadinya kenaikan tabungan dan penggunaan tabungan itu sebaik-baiknya.

Perubahan-perubahan yang dimaksudkan Rostow misalnya kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan moderen dan membuat penemuan-penemuan baru yang dapat menurunkan biaya produksi. Disamping itu harus ada pula orang-orang yang menggunakan penemuan baru tersebut untuk memodernisir cara produksi dan harus didukung pula dengan adanya kelompok masyarakat yang menciptakan tabungan dan meminjamkannya kepada wiraswasta (*entrepreneurs*) yang inovatif untuk meningkatkan produksi dan menaikkan produktivitas. Singkatnya, kenaikan investasi yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya bukan semata-mata tergantung kepada kenaikan tingkat tabungan, tetapi juga kepada perubahan radikal dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, perubahan teknik produksi, pengambilan resiko, dan sebagainya.

Selain hal-hal di atas, Rostow menekankan pula bahwa kenaikan tingkat investasi hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan.

Menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Sementara itu pembangunan prasarana, menurut Rostow, dapat menghabiskan sebagian besar dari dana investasi. Investasi di bidang prasarana ini mempunyai 3

ciri yaitu tenggang waktu antara pembangunannya dan pemetikan hasilnya (*gestation period*) sangat lama, pembangunannya harus dilakukan secara besar-besaran sehingga memerlukan biaya yang banyak, dan manfaat pembangunannya dirasakan oleh masyarakat banyak. Berdasarkan sifatnya ini, maka pembangunan prasarana terutama sekali harus dilakukan pemerintah.

Selain hal-hal yang diungkapkan di atas, Rostow juga menunjukkan bentuk perubahan dalam kepemimpinan pemerintahan dari masyarakat yang mengalami transisi. Untuk menjamin terciptanya pembangunan yang teratur, suatu kepemimpinan baru haruslah mempunyai sifat nasionalisme yang reaktif (*reactive nationalism*) yaitu bereaksi secara positif atas tekanan-tekanan dari negara maju. Rostow yakin bahwa tanpa adanya tekanan atau hinaan dari negara-negara maju, modernisasi yang terjadi Tahap Tinggal Landas

3) Tahap tinggal landas

Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Menurut taksiran Rostow, masa tinggal landas di beberapa negara adalah seperti tampak pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Perkiraan Rostow masa tinggal landas di beberapa negara

Negara	Tahun	Tahapan
Inggris	1783 – 1802	Industri tekstil
Perancis	1830 -1860	Jaringan jalan kereta api
Belgia	1833 -1860	-
Amerika Serikat	1843 -1860	Jaringan jalan kereta api
Jerman	1850 -1873	Jaringan jalan kereta api
Swedia	1868- 1890	Industri kayu
Jepang	1878 -1900	Industri sutera
Rusia	1890 -1914	Jaringan jalan kereta api
Kanada	1896 -1914	Jaringan jalan kereta api
Argentina	1935	Industri substitusi impor
Turki	1937	-
India	1952	-
China	1952	-

Sumber: *The Stages of Economic Growth* (1960)

Dari Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa: sebagian besar negara Barat mencapai masa tinggal landas pada abad yang lalu, kecuali Inggris, yang sudah mencapainya seabad sebelumnya. Masa tinggal landas itu berkisar antara 20 - 30 tahun.

Rostow mengemukakan 3 ciri utama dan negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas yaitu: Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Bersih (*Net National Product/NNP*).

Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (*leading sectors*).

Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

Di sini juga termasuk kemampuan negara tersebut untuk mengerahkan sumber-sumber modal dalam negeri, karena kenaikan tabungan dalam negeri peranannya besar sekali dalam menciptakan tahap lepas landas. Inggris dan Jepang, misalnya mencapai masa tinggal landas tanpa mengimpor modal (bantuan luar negeri) sama sekali. Menurut Rostow perkembangan sektor pemimpin (*leading sector*) berbeda-beda untuk setiap negara. Pada negara Inggris, tekstil katun merupakan sektor pemimpin pada masa tinggal landasnya, sedangkan perkembangan jaringan jalan kereta api memegang peranan yang sama di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada, dan Rusia. Pada negara Swedia, sektor pemimpin adalah industri kayu, di Jepang sutera, dan Argentina adalah industri substitusi impor barang-barang konsumsi.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tahap tinggal landas tidak satu sektor ekonomipun yang baku untuk semua negara yang dapat menciptakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, suatu negara tertentu tidak dapat hanya sekadar mencontoh pola perkembangan sektor pemimpin negara-negara lain. Namun demikian, ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan sektor pemimpin yaitu:

- a. Harus ada kemungkinan untuk perluasan pasar bagi barang-barang yang diproduksi yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang dengan cepat.
- b. Dalam sektor tersebut harus dikembangkan teknik produksi yang modern dan kapasitas produksi harus dapat diperluas.

- c. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pembangunan sektor pemimpin.
- d. Pembangunan dan transformasi teknologi sektor pemimpin haruslah dapat menciptakan kebutuhan akan adanya perluasan kapasitas dan modernisasi sektor-sektor lain.

4) Tahap Menuju Keketidewasaan

Tahap menuju ketidewasaan ini diartikan Rostow sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi moderen pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga oleh kebijaksanaan pemerintah.

Dalam menganalisis karakteristik tahap menuju ke ketidewasaan, Rostow menekankan analisisnya kepada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sekarang sudah maju. Ia juga menunjukkan bahwa di tiap-tiap negara tersebut jenis-jenis sektor pemimpin pada tahap sesudah tinggal landas adalah berbeda dengan yang ada pada tahap tinggal landas. Di Inggris, misalnya, industri tekstil yang telah mempelopori pembangunan pada tahap tinggal landas telah digantikan oleh industri besi, batu bara dan peralatan teknik berat. Sedangkan di Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman di mana pembangunan jaringan jalan kereta api memegang peranan penting pada tahap tinggal landas, telah digantikan oleh industri baja dan industri peralatan berat pada tahap menuju ke ketidewasaan.

Selanjutnya Rostow mengemukakan pula karakteristik non-ekonomis dari masyarakat yang telah mencapai tahap menuju ke kedewasaan sebagai berikut:

Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanian menurun.

Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha-pemilik.

Kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi.

5) Tahap Konsumsi Tinggi

Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi.

Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat (negara) yaitu:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini dapat berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.
- b. Menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif.
- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

Beberapa Kritik terhadap Teori Rostow: beberapa kritik yang muncul terhadap teori Rostow ini antara lain berkaitan dengan adanya tumpang tindih tahapan, periode jangka waktu tahap tinggal landas yang meragukan, adanya masyarakat yang tidak melalui tahap tradisional.

3.2.2 Mazhab Analitis

1) Aliran Klasik

Menurut aliran klasik pertumbuhan ekonomi liberal disebabkan adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi yang sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan.

Kemajuan teknologi disebabkan adanya akumulasi kapital atau kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan kapital. Adanya akumulasi kapital akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja melalui mekanisme yang lebih baik sehingga produktivitas tenaga kerja dapat bertambah. Kecepatan pembentukan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan. Sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), karena sumberdaya alam itu terbatas.

Meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan investasi, dan investasi (pembentukan kapital) akan menambah volume persediaan kapital (*capital stock*). Keadaan ini akan memajukan tingkat teknologi dan memperbesar jumlah uang yang beredar sehingga tingkat upah dapat naik dan selanjutnya kenaikan tingkat upah ini berarti meningkatnya kemakmuran penduduk. Tingkat kemakmuran akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berlakunya

hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Berlakunya hukum tersebut akan berakibat menurunnya tingkat keuntungan dan turunya tingkat keuntungan akan menurunkan akumulasi kapital kembali.

Teori-teori perkembangan dari beberapa penganut aliran Klasik diantaranya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.

❖ Adam Smith

Menurut Adam Smith, untuk berlangsung perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan produksi akan dapat meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Smith juga menitikberatkan pada “luas pasar”. Pasar harus seluas mungkin dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar sehingga pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurut Smith, sekali pertumbuhan itu mulai maka bersifat kumulatif, artinya apabila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas akan menaikkan penghasilan nasional dan memperbesar jumlah penduduk. Jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas and dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Dilain pihak naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi

kapital. Tetapi karena sumberdaya alam terbatas, maka keuntungan maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

❖ David Ricardo

Menurut David Ricardo ada tiga golongan masyarakat yaitu: golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Contohnya: golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan buruh tergantung pada golongan kapitalisme dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Golongan tuan hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakan.

Menurut David Ricardo apabila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka. Akibatnya berlaku hukum tambah hasil yang semakin berkurang. Selain itu ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam menolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.

Dalam pendapatan nasional, tampak bahwa upah dan sewa meningkat terus, sedangkan laba menurun dengan semakin berkembangnya waktu. Dalam pendapatan perkapita, upah selalu tetap pada tingkat batas, laba menurun dan sewa meningkat. Hal ini dikarenakan oleh

semakin langkanya sumberdaya tanah, sehingga sewa menjadi semakin mahal dan laba kurang.

Pendapatan nasional dibagi menjadi tiga bagian yaitu upah, sewa, dan keuntungan, masing-masing untuk pendapatan tenaga kerja (buruh), tuan tanah, dan kapitalis. Jadi maksud dari pembagian/penggolongan itu adalah untuk mengetahui unsur pendapatan yang manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi.

David Ricardo juga membedakan antara penerimaan bruto (*gross revenue*) dan penerimaan neto (*net revenue*). Penerimaan bruto adalah nilai pasar dari barang-barang akhir yang dibuat dalam suatu waktu tertentu. Penerimaan neto adalah pendapatan (*economic surplus*) yang memungkinkan adanya pertumbuhan selanjutnya. Adanya penerimaan bersih karena buruh dapat menghasilkan sesuatu yang melebihi suatu tingkat nilai yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi penerimaan neto yang menyebabkan adanya perkembangan ekonomi apabila digunakan untuk akumulasi kapital. Apabila penerimaan neto ini berkurang karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang berarti pembagian pendapatan menjadi lain bentuknya, sehingga keuntungan yang diterima oleh kapitalis berkurang dan perkembangan selanjutnya berhenti. Jadi penerimaan neto yang merupakan keuntungan ini akan semakin berkurang karena tanah-tanah terbatas dan pemanfaatannya akan bergeser.

2) Aliran Neo Klasik

- ❖ Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Robert Solow dan Trevor Swan)

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan

ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini menyebutkan bahwa: Pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital) dan tingkat kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi mempengaruhi output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu. Analisis model pertumbuhan Solow dibagi menjadi tiga tahap analisis, yaitu:

- Dengan asumsi angkatan kerja dan teknologi tetap
- Dengan asumsi hanya teknologi tetap, dan
- Dengan asumsi angkatan kerja dan teknologi berubah.

Menurut Neo-Klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi, dan demikian pula sebaliknya apabila tingkat bunga tinggi, maka investasi akan rendah. Sebagai akibat adanya investasi yang bertambah maka tingkat bunga naik yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah tabungan. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga turun dan harga barang- barang kapital kembali turun, hasrat menabung turun. Pada tingkat perkembangan ini, akumulasi modal berakhir, dan perekonomian statis atau tidak mengalami perkembangan (Suryana, 2000). Berbeda dengan pandangan klasik, bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber- sumber alam. Neoklasik yakin dengan kemajuan- kemajuan teknik dan perbaikan kualitas buruh cenderung meningkat pendapatan yang lebih tinggi

sehingga permintaan masyarakat akan meningkat dan seterusnya (Suryana, 2000).

Ada 4 (empat) anggapan yang melandasi model Neo-Klasik (Boediono, 2002) :

- a. Tenaga kerja (atau penduduk), L , tumbuh dengan laju tertentu, misal per tahun.
- b. Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dan output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$, apabila Q naik S juga naik, dan turun apabila Q turun.
- d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan $S = I = \Delta K$. Dalam model Neo-Klasik tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan S dan I .

Model pertumbuhan Neo-Klasik Solow (*Solow neoclassical growth model*), yang tertuang dalam “*A Contribution to The Economic Growth*”, merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, sehingga penggagasnya, Robert Solow dianugerahi hadiah di bidang nobel ekonomi. Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yaitu:

$$Y_{(t)} = K_{(t)}^{\alpha} (T_{(t)}L_{(t)})^{1-\alpha}$$

Penjelasan Y adalah output, K adalah modal, T adalah teknologi, dan L adalah tenaga kerja. Karena tingkat kemajuan teknologi (*total factor productivity*) ditentukan dengan eksogen, model neoklasik Solow terkadang juga disebut model pertumbuhan eksogen (*exogeneous growth model*). Usaha untuk memperbaiki kekurangan model Solow, dinyatakan dengan memecahkan *total factor productivity* dengan memasukkan variabel lain, dimana variabel ini dapat menjelaskan pertumbuhan yang terjadi.

Model pertumbuhan yang demikian disebut model pertumbuhan endogen (*endogeneous growth model*). Model pertumbuhan endogen menganggap bahwa perdagangan internasional penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dalam model ini perdagangan internasional diukur melalui aktivitas ekspor dan impor, yaitu:

$$Y = F(A_i, K_i, L_i)$$

Penjelasan Y adalah output, A adalah indeks produktivitas, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, i adalah tahun, sedang indeks produktivitas (A) adalah fungsi dari ekspor (X) dan impor (M), yaitu:

$$A_i = F(X_i, M_i)$$

Terdapat beberapa studi yang dilakukan untuk menyempurnakan model pertumbuhan ekonomi neoklasik dengan tujuan untuk memperjelas dan menambahkan dasar-dasar teoritis bagi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, salah satunya dilakukan oleh tiga ekonom yaitu Mankiw, Romer, dan Weil (Suryaningrum, 2000) yang menyatakan bahwa model pertumbuhan Solow hanya mampu menerangkan hubungan modal dan tenaga kerja saja, namun bukan besarnya (*magnitude*) hubungan tersebut sehingga dimasukkan variabel mutu modal manusia untuk membantu menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan tenaga kerja, yaitu:

$$Y_{(t)} = K_{(t)}^\alpha H_{(t)}^\beta (T_{(t)} L_{(t)})^{1-\alpha-\beta}$$

Penjelasan Y adalah output, K adalah modal, H adalah modal manusia, T adalah teknologi, dan L adalah tenaga kerja.

Menurut teori pertumbuhan Solow-Swan, secara garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu: Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun.

Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode.

Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$; apabila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.

Semua tabungan masyarakat di investasikan $S = I = \Delta K$.

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk di tabung dan kemudian di investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Boediono, 2002).

Menurut Solow, penawaran dan permintaan berperan penting dalam menentukan output suatu perekonomian. Oleh karena itu, komponen utama dari teori pertumbuhan Solow adalah fungsi produksi yang merupakan dasar dari penawaran dan fungsi konsumsi yang merupakan dasar dari permintaan. Ciri-ciri posisi keseimbangan teori pertumbuhan Neo-Klasik yaitu :

Ciri yang pertama adalah posisi keseimbangan jangka panjang (*Long run equilibrium*) akan tercapai apabila kapital per kapita, k , mencapai suatu tingkat yang stabil, artinya tidak berubah lagi nilainya. Apabila k konstan, maka keseimbangan jangka panjang tercapai. Hal ini merupakan ciri posisi keseimbangan yang pertama (Boediono, 2002).

Ciri yang kedua adalah mengenai laju pertumbuhan output, kapital dan tenaga kerja. Pada posisi long run equilibrium laju pertumbuhan output dapat disimpulkan dari ciri bahwa output per kapita adalah konstan dan penduduk tumbuh (p) sesuai dengan asumsi. Definisi output per kapita adalah output total tumbuh dengan laju jumlah penduduk per tahun (Boediono, 2002).

Ciri yang ketiga adalah mengenai stabilitas dari posisi keseimbangan tersebut. Posisi keseimbangan model Solow-Swan bersifat stabil, dalam arti bahwa apabila kebetulan

perekonomian tidak pada posisi keseimbangan, maka akan ada kekuatan-kekuatan yang cenderung membawa kembali perekonomian tersebut pada posisi keseimbangan jangka panjang (Boediono, 2002).

Ciri yang keempat menyangkut tingkat konsumsi dan tingkat tabungan (investasi). Tingkat tabungan (investasi) per kapita pada posisi keseimbangan adalah konstan. Apa yang tidak ditabung dikonsumsi, sehingga konsumsi per kapita juga konstan pada posisi equilibrium (Boediono, 2002).

Ciri yang kelima berkaitan dengan imbalan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi atau aspek distribusi pendapatan. Karena hanya ada dua macam faktor produksi (kapital dan tenaga kerja), maka output total akan habis terbagi antara para pemilik kapital dan pemilik faktor produksi tenaga kerja (Boediono, 2002).

3) Aliran Keynesian

❖ Harrod – Domar

Model teori ekonomi pembangunan ini diperkenalkan oleh Sir Roy F. Harrod (1900- 1978) dan Evsey Domar (1914 - 1997). Model ini dibangun berdasarkan pengalaman negara maju. Teori nya menelaah persyaratan pertumbuhan mantap (*steady growth*) yaitu pertumbuhan yang selalu menciptakan penggunaan barang-barang modal secara penuh

Teori ini memberi peran kunci pada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi terutama tentang watak ganda investasi yaitu :

- (a) Menciptakan pendapatan/ menambah permintaan efektif masyarakat
- (b) Memperbesar kapasitas produksi / menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang.

Harrod dan Domar sependapat dengan Keynes bahwa pertambahan produksi dan pendapatan nasional

bukan ditentukan oleh penambahan dalam kapasitas produksi tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian walaupun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan dibanding dengan masa sebelumnya.

Berbagai asumsi yang dipakai oleh teori ini adalah:

- a. Pada taraf permulaan perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan barang-barang modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya digunakan.
- b. Tidak ada campur tangan pemerintah
- c. Bekerja pada perekonomian tertutup tanpa perdagangan luar negeri
- d. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional dan keadaan ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik 0
- e. Kecondongan marginal menabung besarnya tetap, demikian juga perbandingan antara modal dengan jumlah produksi
- f. Tidak ada penyusutan barang modal yang dapat dipakai seumur hidup
- g. Tingkat harga umum konstan yaitu upah uang sama dengan tingkat pendapatan nyata
- h. Tidak ada perubahan suku bunga
- i. Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses produksi
- j. Modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal
- k. Dalam perekonomian hanya terdapat satu jenis produk

Jika rasio modal-output (*capital output ratio*) adalah k dan s adalah rasio tabungan nasional (*national saving ratio*) yang merupakan persentase dari output nasional yang ditabung dan bahwa jumlah investasi baru ditentukan oleh jumlah tabungan total, S , maka model pertumbuhan ekonominya menjadi:

a. Jika s adalah MPC maka

$$S = sY \dots\dots\dots 3.1$$

b. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga dapat ditulis persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \dots\dots\dots 3.2$$

Akan tetapi karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output Y , seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal output k maka

$$K = k \dots\dots\dots 3.3$$

$$Y$$

Atau

$$\Delta K = k \dots\dots\dots 3.4$$

ΔY

Atau akhirnya

$$\Delta K = k \Delta Y \dots\dots\dots 3.5$$

c. Terakhir, mengingat jumlah keseluruhan dari tabungan nasional (S) harus samadengan keseluruhan investasi (I) maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$S = I \dots\dots\dots 3.6$$

Dari persamaan 3.1. diketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan 3.2 dan persamaan 3.5 kita telah mengetahubahwasannya :

$$I = \Delta K = k \Delta Y$$

Dengan demikian, identitas tabungan yang merupakan persamaan modal dalam persamaan 3.6 adalah sebagai berikut

$$S = sY = k \Delta Y = \Delta K = I$$

Atau diringkas menjadi

$$sY = k \Delta Y \dots\dots\dots 3.7$$

Selanjutnya, apabila kedua sisi persamaan 3.7 dibagi mula-mula dengan Y dan kemudian dengan k, maka akan didapat :

$$\frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{s}{k} = \text{pertumbuhan ekonomi}$$

$$\frac{\Delta Y}{\Delta Y} = \frac{k}{k}$$

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan secara langsung atau secara “positif” berbanding lurus dengan rasio tabungan (yaitu semakin banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan maka pada akhirnya nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan) dan secara “*negative*” atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian (yaitu semakin besar rasio modal output nasional, atau k, maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah).

Kendala dari penerapan teori ini di negara berkembang adalah keterbatasan peluang untuk pembentukan modal baru. Oleh karena itu maka pemikiran inti “kendala modal” dijadikan alat pembenaran dan dimanfaatkan untuk mengabsahkan pengaliran modal dan bantuan teknis secara besar-besaran dari negara-negara maju ke sejumlah negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharno. 2023. *Hakikat dan Makna Pembangunan Ekonomi*. Global Eksekutif Teknologi
- Suryana, M.S., 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*.
- Suryaningrum, E. 2000. *Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. *Media Ekonomi dan Bisnis* Vol. 12 No. 1 hal 8-16. Semarang: FE UNDIP
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, edisi 9, jilid 1. Erlangga.
- Boediono. 2002. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4. Yogyakarta : BPFE.

BAB 4

PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh Sutrisno, S.Pd., M.Pd.

4.1 Pendahuluan

Ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan dunia adalah hal wajib untuk dipahami dan ditelusuri perkembangannya dari waktu ke waktu.

Anda telah membaca beberapa bab sebelumnya tentang sub pokok bagian yang berkaitan dengan ekonomi, diantaranya tentang sejarah pemikiran ekonomi, ekonomi pembangunan, matematika ekonomi, dan lain sebagainya. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang perekonomian Indonesia dipandang dari aspek masa lalu hingga masa kini. Hal ini penting sebagai landasan utama berpikir jangka panjang akan implementasi perbaikan ekonomi Indonesia ke depannya. Sebelum membahas lebih dalam tentang perkembangan perekonomian di Indonesia. Mari membahas secara garis besar perkembangan ekonomi di dunia.

Pasca terjadinya pandemi covid-19, meskipun perekonomian pada masa tersebut dihadapi dengan baik oleh berbagai negara, ekonomi global yang diharapkan mulai membaik ternyata belum sepenuhnya pulih, hal ini terjadi akibat adanya guncangan konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang muncul ke permukaan. Adanya Penyerangan Rusia ke Ukraina selain berakibat munculnya bencana kemanusiaan juga telah memperlambat ekonomi negara sekitar area peperangan disertai dengan dampak yang negatif terhadap dunia secara signifikan.

Berdasarkan buku perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia Triwulan II-IV yang dipublikasikan oleh deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

menyatakan bahwa sejak awal tahun 2022, negara-negara memberikan sanksi keuangan terhadap Negara Rusia. Disisi lain, sejak Agustus 2022 terjadi pembatasan pada impor batu bara oleh Uni Eropa dan pada awal tahun 2023 pembatasan impor minyak lintas laut Rusia. Hal ini akhirnya akan mengganggu rantai pasokan global dan mengakibatkan kenaikan harga komoditas secara signifikan. Di samping itu, peningkatan inflasi juga akan membuat para pembuat kebijakan, mengalami dilema antara mendukung pertumbuhan ekonomi atautkah mengendalikan tekanan harga yang semakin kuat. Biaya pinjaman juga akan meningkat pada pasar negara berkembang diikuti dengan kondisi keuangan yang akan semakin ketat secara global, hal tersebut menandakan bahwa kebijakan dalam merespon ketidakpastian ekonomi, dan inflasi akan mengalami kemunduran.

Selain itu, invasi Rusia ke Ukraina juga akan memperlambat pertumbuhan tiga mesin pertumbuhan utama dunia yaitu Amerika Serikat, Kawasan Euro, dan Tiongkok yang tentu saja akan turut mempengaruhi kondisi ekonomi domestik di negara berkembang seperti Indonesia.

4.2 Perekonomian Indonesia di Masa Lampau

Sebagaimana yang kita ketahui pertumbuhan ekonomi adalah indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan negara. Tentu saja dalam perjalanannya akan mengalami proses pasang surut perkembangan stimulasi ekonomi yang dipicu oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Berikut adalah perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang diambil dari berbagai sumber dan artikel JEO kompas.com.

4.2.1 Era Soekarno (1945-1967)

Pada era pemerintahan ini, Indonesia mengalami 3 fase perekonomian. Fase yang pertama adalah penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, yang kedua adalah memperkuat pilar

ekonomi, dan yang terakhir adalah fase krisis yang berakibat inflasi. PDB per Kapita Indonesia berada pada posisi sebesar Rp. 5.523.863 di awal pemerintahan. Lalu mengalami kenaikan sebesar 5,74 % di tahun 1961. Lalu ditahun selanjutnya stabil pada posisi yang sama 5,74 %, namun di tahun 1963 PDB mengalami penurunan menjadi - 2,24 %. Hal tersebut terjadi dikarenakan *cost* politik yang tinggi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit (- Rp1.565,6 miliar). Hingga akhirnya terjadi hiperinflasi 600% sampai tahun 1965. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif pada tahun 1964, yaitu sebesar 3,53 %. Begitu pula di tahun 1965, turun menjadi 1,08 %. Pada akhir era presiden Soekarno di tahun, akhirnya ekonomi Indonesia tumbuh 2,79 %.

4.2.2 Era Pemerintahan Soeharto (1967-1998)

Pada era pemerintahan/rezim presiden Soeharto adalah masa pemerintahan terlama diantara presiden Indonesia lainnya. dinamika perekonomian sangat terasa pada era ini. Ketika menjabat menjadi presiden kala itu, kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Awal pemerintahan di tahun 1967, presiden kemudian mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, yang berisi tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini dijadikan pintu besar bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Lalu pada tahun selanjutnya, Presiden Soeharto membuat Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun guna mendorong swasembada pangan. Akhirnya pada tahun 1970 program ini memberikan dampak signifikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 10,92 %.

Berdasarkan pendapat seorang ekonomi Indonesia Lana Soelistianingsih dalam artikel JEO kompas.com menjelaskan bahwa, pada era pemerintahan presiden Soeharto fokus ekonomi lebih terarah dengan sasaran utama yang ingin digenjot di bidang pertanian dan industri. Kebijakan ini berdampak positif terhadap

pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tumbuh sangat signifikan hingga tahun 1997. Pada tahun tersebut perekonomian Indonesia tumbuh dengan angka yang cukup menjanjikan yakni dikisaran angka 6-7 persen. Namun sangat disayangkan, selama presiden Soeharto memerintah, kebijakan sentralisasi menyebabkan terjadinya banyak penyelewengan, hingga akhirnya kondisi ekonomi mengalami penurunan perlahan dan menjadi 'keropos'. Imbasnya ketika terjadi gejolak ekonomi di tahun 1998, pondasi ekonomi Indonesia yang lemah ini tidak mampu lagi menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain hal tersebut peran Bank Indonesia (BI) juga menjadi lembaga yang tidak independen, karena hanya digunakan sebagai instrumen dalam menutup defisit pemerintahan. Ketika BI tidak bisa menghadapi krisis moneter, maka terjadilah inflasi tinggi hingga mencapai 80 %. Selain itu para negara bilateral juga turut menarik diri karena krisis pertumbuhan ekonomi menjadi - 13,13 %. Akhirnya, penandatanganan kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional atau *international monetary found* (IMF) tidak dapat dihindarkan. Utang negara dimulai dan permobakan sistem ekonomi juga berimbas pada segala lini.

4.2.3 Era B.J. Habibie (1998-1999)

Pada era Presiden Baharuddin Jusuf Habibie atau dikenal masyarakat sebagai era transisi negara pemerintahan berada pada kondisi pemulihan ekonomi. Pada tahun 1998 Posisi pertumbuhan ekonomi yang awalnya -13,13 % ditahun berikutnya mengalami perubahan menjadi 0,79 %. Presiden Habibie mengambil berbagai kebijakan dibidang moneter dan keuangan yang membawa perekonomian Indonesia menuju para era reformasi. Nilai tukar rupiah terus mengalami perkembangan yang sangat positif yang tidak pernah terjadi didalam sejarah perekonomian Indonesia. Perkembangsn tersebut khususnya dibidang moneter yakni dalam kurung waktu 3 bulan dari bulan Juni tahun 1998 nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan Rp 16.650/dollar AS menguat 9.650

basis poin menjadi Rp 7.000/dollar AS di bulan November 1998. Selain itu, peran Bank Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat fundamental yakni dengan mendapat status independen di luar eksekutif.

4.2.4 Era Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Setelah perjuangan presiden BJ. Habibie. Pemulihan ekonomi indonesia lalu dilanjutkan oleh presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2000 secara perlahan kondisi ekonomi tumbuh menjadi 4,92 %. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gusdur menetapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan Otonoda (otonomi daerah). Kebijakan ini dilakukan dengan cara pemerintah pusat mengalokasikan APBN secara berimbang antara pusat dan daerah dengan mentransfer sebagian alokasi APBN ke daerah. Selain itu Pemerintah pusat juga menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi pemasukan bagi daerah masing-masing. Namun, pada tahun 2001 kondisi ekonomi Indonesia terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 3,64 %.

4.2.5 Era Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

Pada era presiden Megawati, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dari 3,64 % menjadi 4,5 %. Lalu, pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 %, dan pada tahun 2004, di akhir pemerintahan presiden Megawati kondisi ekonomi Indonesia mengalami peningkatan lagi sebesar 5,03 %. Sisi lain dari era ini, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan di tahun 2001 sebesar 18,4 %, lalu di tahun 2002 sebesar 18,2 %, kemudian di tahun 2003 semakin mengalami penurunan sebesar 17,4 % dan di akhir tahun 2004 menjadi sebesar 16,7 %.

Salah satu Langkah konkrit yang ditempuh pemerintah pusat saat itu adalah memperketat perbankan dalam menerbitkan/mengeluarkan surat obligasi atau utang secara langsung. Pada kondisi ini, Indonesia mulai kembali terarah perekonomiannya meskipun Pada saat itu repelita tak ada lagi seperti di era presiden Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri karena bermunculannya pelaku-pelaku ekonom.

4.2.6 Era Soesilo Bambang yudhyono (2004-2014)

Pertumbuhan ekonomi dibawah pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif normal dan stabil, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahan SBY yaitu di tahun 2005 menjadi 5,69 %. Lalu ditahun 2006, terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan menjadi 5,5 %. Di tahun selanjutnya, perekonomian Indonesia tumbuh dikisaran 6 %, tepatnya 6,35 %. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi mengalami menjadi 6,01 %. Kondisi impor dan ekspor Indonesia cukup tinggi. Sehingga neraca perdagangan berimbang. Akan tetapi diakhir pemerintahan pada tahun 2009, yang juga merupakan awal dari periode kedua kepemimpinan presiden SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Hal ini diakibatkan oleh krisis keuangan global yang bukan hanya berdampak bagi perekonomian Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun tersebut, Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*) menaikkan *rate* sehingga harga komoditas global naik. Namun meski pun hal itu terjadi, Indonesia masih bisa 'eksis' menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun melambat. Pada tahun 2010, ekonomi Indonesia mulai meningkat kembali sekitar 6,22 %. Di tahun ini pemerintah mulai merancang rencana perbaikan perekonomian Indonesia secara jangka panjang. Lalu pada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,49 %, namun melambat kembali terhadap beberapa tahun selanjutnya. Di tahun 2012 menjadi 6,23 %, Tahun 2013 menjadi 5,56 %, dan 2014 menjadi 5,01 %.

4.2.7 Era Joko Widodo (2014-sekarang)

Pada era Presiden Joko Widodo, terjadi perombakan struktur APBN yaitu keuangan berfokus pada pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan daya saing. Namun, di masa pemerintahan presiden Jokowi selama empat tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak melampaui era presiden Soeharto. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali mengalami kerapuhan dalam sisi nilai mata uang. Rupiah mengalami pelemahan terhadap dollar Amerika Serikat. Padahal Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,88 %.

Konsep pembangun yang dilakukan pemerintahan Jokowi kurang terarah, dimana rencana pembangunan menengah yang tertuang dalam RPJMN hanya dijadikan dokumen pelengkap tanpa implementasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Dalam pemerintahan Jokowi ini berfokus kepada perbaikan infrastruktur guna mengejar ketertinggalan guna mempermudah akses kesemua pelosok negeri. Tentu saja hal ini tidak seperti konsep repelita yang terfokus dan mengutamakan pengawasan. Lalu pada tahun 2016, ekonomi Indonesia mulai mengalami pertumbuhan lagi sebesar 5,03 % dan tahun 2017 tumbuh menjadi 5,17 %.

Selanjutnya di tahun 2018 ekonomi tumbuh sebesar 5,17 %. Capaian pertumbuhan ekonomi ini menjadi prestasi dibidang ekonomi pemerintahan Jokowi dikarenakan tahun ini merupakan tahun pertumbuhan tertinggi. Dimana, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,08 %, investasi menyumbang porsi sebesar 6,01 % terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara ekspor sebesar 4,33 %, konsumsi lembaga non rumah tangga sebesar 10,79 %, konsumsi pemerintahan sebesar 4,56 %, dan impor sebesar 7,10 %. Total keseluruhan PDB pada tahun tersebut tercatat sebesar 3.927 dollar AS atau setara dengan 56 juta, sesuai kurs saat itu.

Pada tahun 2019, Indonesia mencatat ekonomi tumbuh menjadi sebesar 5,02 %. Akibat adanya perang dagang Amerika Serikat-Cina, harga komoditas yang fluktuatif serta terjadinya tensi geopolitik Timur Tengah, menyebabkan terjadinya penurunan kinerja ekonomi dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, dari data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada laman Kementerian Keuangan, Indonesia mengalami hal yang kurang bagus yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar - 2,07 %. Hal ini menyebabkan terjadinya deflasi atau penurunan harga barang secara umum dikarenakan perkembangan ekonomi memiliki pergerakan yang kurang stabil. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi ini, perekonomian Indonesia terus menunjukkan hal negatif atau kurang menjanjikan yakni pertumbuhan ekonomi turun sebesar 7,67% dari 5,04 % menjadi -2,63 % dikarenakan konsumsi rumah tangga di Indonesia tidak terkendali karena situasi yang terjadi. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah juga mengalami penurunan dari 3,25 % menjadi 1,94 %. Hal ini dikarenakan alokasi di bidang infrastruktur dikurangi oleh pemerintah dan meningkatkan anggaran untuk kesehatan. Begitu pula pada sektor investasi juga mengalami penurunan dari 3,25 % menjadi 1,94 %. Sementara untuk aktivitas perdagangan yaitu ekspor dan impor dengan pihak luar negeri juga mengalami penurunan pada ekspor, dari -0,87 % menjadi -7,70 % dan pada impor dari -7,69 % menjadi -17,71 %.

Pemerintah mengambil langkah dalam menghadapi kondisi tersebut yaitu melaksanakan kebijakan secara konsisten dan menjalin kerja sama dengan semua elemen bangsa.

Sementara pada tahun 2020, hasil publikasi Badan Pusat Statistik dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 % pada sisi produksi, sementara jasa kesehatan serta kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 %. Kemudian

dari sisi pengeluaran, aspek ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 %. Kepala BPS juga berujar bahwa seluruh aspek mengalami pertumbuhan kecuali sektor jasa keuangan.

Lalu untuk tahun 2021 secara akumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69 %. Produksi, mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46 %. Sedangkan pengeluaran pertumbuhan pengeluaran tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 %. Struktur ekonomi Indonesia pada tahun tersebut didominasi oleh sektor ekonomi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 57,89 % dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 %.

Dari hasil rilis yang dilakukan oleh BPD diperoleh data pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi berada diangka 5,31%. Hal yang sama pula disampaikan Airlangga Hartarto sebagai menteri koordinator perekonomian Republik Indonesia dalam laman BPS bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan signifikan jika dibandingkan pada masa pandemi covid melanda negeri ini. PDB [*produk domestik bruto*] pada sektor konsumsi juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,48%. Investasi juga mengalami pertumbuhan yang cukup menjanjikan yakni tumbuh menjadi 3,33 % dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai konsumen tumbuh menjadi 5,7 %. Namun konsumsi pemerintah masih mengalami -4,77%.

Sementara pada sisi penawaran (*supply*), semua sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2022 yaitu Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sebesar 16,99 % diikuti oleh sektor akomodasi serta sektor makan minum sebesar 13,81 %. Hal ini terjadi akibat meningkatnya mobilitas masyarakat seperti peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sementara sektor industri pengolahan sebagai PDB yang terbesar juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 %. Menteri perekonomian juga

mengungkapkan bahwa, secara geografis seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Jawa sebagai pulau memberikan kontribusi terbesar yakni dengan angka 56,48 % disusul Pulau Sumatera 22,04 %, pulau Kalimantan 9,23 %. Lalu, Pulau Sulawesi sebesar 7,03 % serta Maluku dan Papua juga tumbuh sebesar 2,50 % bersamaan dengan meningkatnya ekspor permintaan produk-produk komoditas unggulan masyarakat luar negeri.

Lalu pada tahun ini 2023, berdasarkan data dari laman [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id) menyatakan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan perekonomian Indonesia adalah salah satu negara yang paling kuat di tengah resesi ekonomi global. Tahun 2023 IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan dari 4,8% menjadi 5% dan akan terus mengalami pertumbuhan dalam posisi sehat hingga tahun 2024 menjadi 5,1%.

Jika dibandingkan pada ekonomi global saat ini, IMF meramalkan terjadi perlambatan ekonomi global dari 3,4% pada tahun 2022 akan turun menjadi 2,8% pada tahun 2023. Kemudian akan mengalami perubahan ke level 3,0% di 2024. Namun, momentum penguatan yang sempat terjadi di awal tahun, kini mulai mengalami penurunan karena terjadinya gejolak pada sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang terus menerus meningkat. Prediksi posisi inflasi global pada tahun 2023-2024 akan menjadi 7,0% dan 4,9%.

perkiraan, IMF melihat adanya potensi berbagai risiko perekonomian global akan didominasi dengan potensi tingginya ekonomi lalu mengalami penurunan yang tajam (*hard landing*), hal ini terjadi apabila risiko mengalami peningkatan. Risiko tersebut berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, eskalasi perang di Ukraina sebagai pemicu melonjaknya harga komoditas, fragmentasi geoekonomi serta tingkat inflasi inti yang semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Otler, Philip & Keller, K.L. 2009. Marketing Management, 13th ed. Jakarta: Erlangga
- Kotler, Philip & Keller, K.L. 2009. Marketing Management, 13th ed. Jakarta: Erlangga
- Otler, Philip & Keller, K.L. (2009). Marketing Management, 13th ed. Jakarta: Erlangga
- Ambaranie, N.K.M. 2018, Jejak Pertumbuhan *Indonesia dari Masa Ke Masa*, dilihat tanggal 16 Mei 2023, Kompas.com, <<https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>>.
- Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian PPN /BAPPENAS, 2022, Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia pada Triwulan II – IV Tahun 2022, dilihat tanggal 16 Mei 2023, <<https://www.bappenas.go.id/updateekonomiindonesiaduniashow>>, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Perlambatan Global dan Eskalasi Risiko, [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id), dilihat 20 Mei 2023, <<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/IMF-proyeksikan-ekonomi-Indonesia-tetap-solid>>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022, BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69 Persen Pada 2021, [Pressrelease.id](https://www.kominfo.go.id), dilihat 20 Mei 2023, <<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39835/bps-catat-ekonomi-indonesia-tumbuh-369-persen-pada-2021>>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2023, Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen, [menpan.go.id](https://www.menpan.go.id), dilihat 20 Mei 2023, <<https://www.menpan.go.id/site/berita->

terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen >.

Yenni, R.P. 2022, Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dilihat tanggal 20 Mei 2023, <
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>>.

BAB 5

MANAJEMEN RISIKO DAN ANALIS KREDIT PERBANKAN

Oleh Dessy Evianti

5.1 Pendahuluan

Pendirian perusahaan oleh para pemilik modal memiliki harapan dan tujuan untuk mendapatkan laba yang setinggi - tingginya. Manajemen perusahaan harus dapat memperhitungkan segala sesuatu dengan sebaik baiknya, agar harapan dan tujuan dapat menjadi kenyataan bukan sebaliknya yaitu menimbulkan kerugian. Oleh karenanya diperlukan suatu manajemen yang baik didalam perusahaan dalam memperhitungkan dan menangani kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan. Manajemen yang harus diperhatikan ini dikenal dengan manajemen risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Risiko ini muncul baik secara individual maupun perusahaan, risiko terjadi karena adanya kondisi ketidakpastian. Beberapa pengertian dari manajemen risiko diantaranya :

Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan penanganan risiko. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu dalam membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut (Djohanputro, 2013).

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan

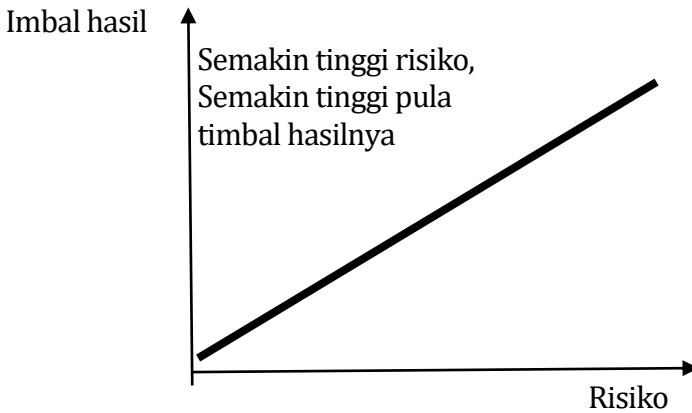
perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 2006).

Perusahaan harus memperhatikan secara konsisten 10 prinsip utama dalam mengelola manajemen risiko perusahaan (Aswad, 2007), (Supranto J, 2013) sebagai berikut:

1. Risiko ada dimana mana
Umumnya risiko datang dari sisi yang tidak kita duga danantisipasi sebelumnya serta dalam bentuk yang berbeda
2. Ancaman dan peluang
Risiko yang muncul bisa diawali dari peluang yang diperoleh perusahaan bahkan bisa muncul dari ancaman perusahaan , apakah pesaing perusahaan atau pemasok yang menyediakan kebutuhan bahan mentah/baku dan barang belum jadi, ataupun barang jadi yang akan langsung dijual.
3. Bersikap ambivalen terhadap risiko dan tidak selalu rasional tentang cara kita menilai dan menghadapi risiko
Dimana risiko sebagai bagian atas peluang dan bahaya yang dapat memberikan keuntungan. Didalam menghadapi risiko ada sisi ketakutan dalam menghadapinya namun tetap harus dihadapi dan diselesaikan.
4. Tidak semua risiko diciptakan sama
Risiko yang dihadapi antara satu individu dengan individu lain dan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya pasti akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan atas kemampuan serta sumber daya yang dimiliki oleh individu dan perusahaan tersebut.
5. Risiko bisa diukur
Risiko yang dihadapi perusahaan dan individu umumnya dapat diperhitungkan / diukur secara nilai.
6. Manajemen / penilaian risiko yang baik harus mengarah pada keputusan yang lebih baik
Dalam pengambilan keputusan harus dikaitkan hubungan antara akses risiko dengan hasil dari pengukuran risiko

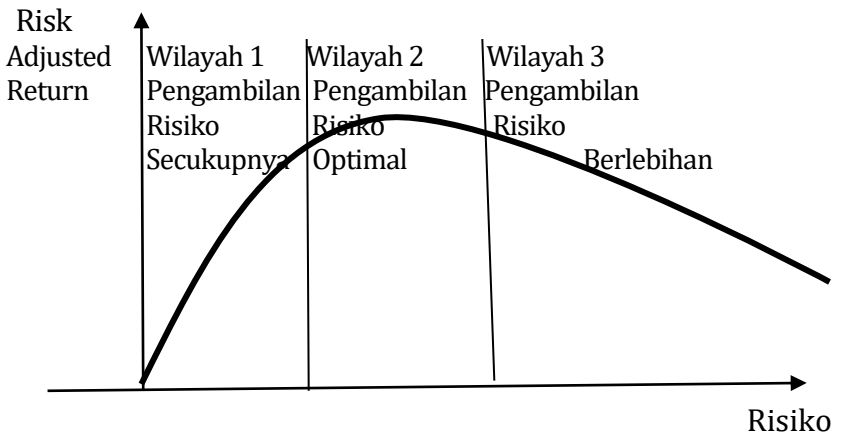
- dibandingkan dengan prosesnya. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan harus segera diselesaikan secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar.
7. Kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil dan risiko yang harus dieksploitasi.
Kemampuan perusahaan dalam menentukan posisi risiko tersebut merupakan salah satu bagian dari suksesnya perusahaan dalam manajemen resiko.
 8. Hasil manajemen risiko yang tinggi karena pengelolaan yang baik
Pengukuran hasil penanganan dari manajemen risiko selalu diukur dalam bentuk value
 9. Manajemen risiko adalah bagian dari pekerjaan setiap orang.
Risiko yang dihadapi oleh perusahaan merupakan tanggung jawab bersama dalam organisasi yang dipecahkan dan dihadapi secara bersama sama.
Karena kemajuan dan kemunduran perusahaan akan berdampak bagi seluruh karyawan perusahaan dan manajemen perusahaan.
 10. Risiko yang berhasil, mengambil organisasi tidak sampai di sana secara kebetulan.
Kemampuan menghadapi risiko bukan suatu kebetulan namun memerlukan penanganan secara konsisten dan kontinuitas.

Dalam manajemen risiko diketahui terdapat konsep risk dan return. Pandangan awal yang sudah bertahan cukup lama mengemukakan bahwa antara tingkat risiko dan tingkat imbal hasil memiliki hubungan yang searah/positif. Dimana semakin tinggi tingkat risiko maka akan semakin tinggi pula hasil / profit yang diperoleh oleh perusahaan. Pandangan lama ini tergambar dibawah ini (Hanafi M, 2009) :



Gambar 5.1. Pandangan Lama Hubungan Risiko dan Timbal Hasil
(Hanafi M, 2009)

Pandangan lama tersebut mulai bergeser seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi. dimana pandangan baru dikemukakan bahwa hubungan risiko dengan imbal hasil tidak bersifat linier tetapi non linier. Tergambar dibawah ini (Hanafi M, 2009).



Gambar 5.2. Pandangan Baru : Risiko Harus Dikelola Secara Optimal (Hanafi M, 2009)

5.2 Klasifikasi dan Kategori Risiko

Klasifikasi risiko untuk bank umum terdiri dari delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko strategis, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko reputasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dan pendapat lain risiko terdiri dari lima yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko bisnis dan risiko organisasional (Lam, James, 2007).

Sedangkan ada yang berpendapat bahwa risiko terdiri dari empat yaitu (Djohanputro, 2008) :

1. Risiko keuangan

Untuk risiko keuangan ini terdiri dari risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko permodalan

2. Risiko operasional

Untuk risiko operasional terdiri dari risiko sumber daya manusia, risiko produktivitas, risiko teknologi, risiko inovasi, risiko sistem dan risiko proses

3. Risiko strategis

Risiko ini terdiri dari risiko bisnis, risiko leverage operasi dan risiko transaksi strategis

4. Risiko eksternalitas

Khusus untuk risiko ini terdiri dari risiko lingkungan, risiko reputasi dan risiko hukum.

Dengan memahami kategori-kategori risiko , perusahaan dengan mudah akan dapat memahami dan menganalisa atas risiko yang sedang dihadapi.

Risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok (Iban Sofyan, 2005) sebagai berikut :

1. Risiko nonsistematis adalah risiko yang dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu proses diversifikasi atau tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko.
 2. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui diversifikasi.
- Hal ini umumnya risiko yang berhubungan dengan pasar atau kejadian yang dapat secara sistematis akan mempengaruhi posisi pasar.

Ada pendapat lain membagi risiko dibagi menjadi dua kelompok (Kasidi, 2010) sebagai berikut :

1. Risiko spekulatif

Merupakan suatu kondisi atau keadaan yang dihadapi perusahaan, apakah dapat memberikan suatu keuntungan atau suatu kerugian. Risiko spekulatif umumnya dikenal sebagai risiko bisnis (*business risk*).

Dicontohkan dengan seseorang yang menginvestasikan dananya pada saham perusahaan yang terlisting di Bursa Efek Indonesia, ada kemungkinan dana yang diinvestasikan dalam saham tersebut akan mengalami pergerakan kenaikan harga atau bahkan mengalami penurunan harga.

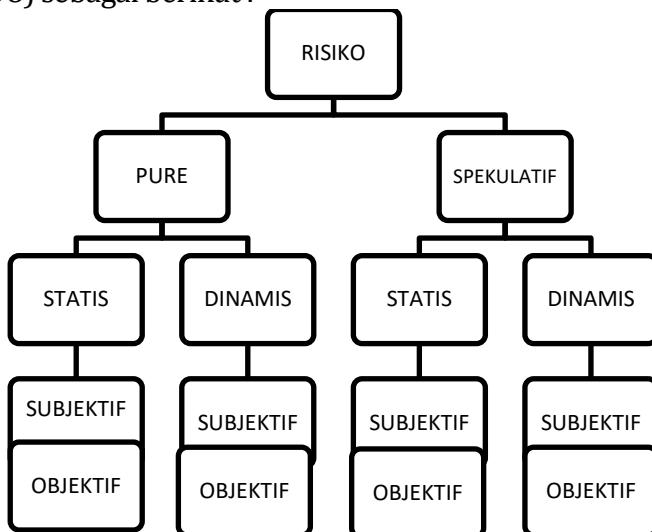
2. Risiko murni (*pure risk*)

Suatu kondisi atau keadaan yang hanya dapat mengakibatkan kerugian, atau tidak mengakibatkan kerugian dan tidak akan memberikan keuntungan.

Seperti terjadinya kebakaran, hal ini akan merugikan perusahaan karena semua barang-barang sebagian atau bahkan habis terbakar seluruhnya. Kondisi ini tidak akan merugikan dengan diikutsertakannya aset perusahaan dalam asuransi, sehingga kerugian dapat diminimalisasi.

Perbedaan dari kedua risiko tersebut diatas adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam risiko spekulatif sedangkan dalam risiko murni tidak diperoleh keuntungan tersebut.

Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang bisa saja menimbulkan kerugian, yang digambarkan (H Abbas Salim, 1998) sebagai berikut :



Gambar 5.3. Kategori Risiko (H Abbas Salim, 1998)

5.3 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Dalam hal meminimalisir kerugian yang dihadapi oleh perusahaan perlu dibentuk dan dikelola dengan baik manajemen risiko. Analisis yang terukur dan penempatan personil yang memiliki analisis yang kuat didalam bagian manajemen risiko akan memudahkan perusahaan dalam mengelola operasional usahanya. Tujuan dengan adanya manajemen risiko (Mahmudi, 2010) sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan perusahaan
Perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan lancar, dimana analisis atas risiko bisnis yang dihadapi sudah dilakukan secara kontinuitas.
2. Menyusun kerangka kerja yang jauh dari risiko
Dengan adanya kerangka kerja ini akan memudahkan proses dan tahapan yang dilakukan dalam operasional perusahaan. Dimana sudah terukur mengenai waktu pemesanan atas bahan baku, produksi dan pendistribusian.
3. Memperkecil kemungkinan risiko yang akan terjadi
Meskipun sudah dilakukan analisis secara mendalam dan penentuan dalam operasional, risiko perusahaan tetap akan ada dan tidak bisa dihindari, namun kondisi yang dihadapi tidaklah serumit dan sebesar apabila tidak adanya manajemen risiko yang diterapkan perusahaan dikarenakan antisipasi sudah disusun sebelumnya.
4. Meningkatkan efektivitas manajemen.
Organisasi/perusahaan yang sudah memiliki dan menyusun manajemen risiko, operasional perusahaannya akan berjalan secara efektif.
5. Membantu pengambilan keputusan bagi perusahaan
Dengan adanya penyusunan risiko yang diperkirakan akan terjadi pada organisasi oleh bagian manajemen risiko memudahkan perusahaan dalam menentukan langkah

bisnis yang akan dijalankan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

6. Meningkatkan kinerja perusahaan

Dengan operasional yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat, maka peluang perusahaan dapat segera dijalankan dan akan meningkatkan kinerja perusahaan dari segi finansial yaitu dalam hal pendapatan perusahaan.

7. Memberikan pemahaman terkait risiko yang mungkin terjadi

Manajemen perusahaan terutama pemilik perusahaan akan memperoleh informasi secara detail atas risiko yang dihadapi perusahaan saat ini maupun masa mendatang.

8. Menjamin sasaran pencapaian perusahaan

Target yang ditetapkan perusahaan pada bulan maupun tahun berjalan akan dimudahkan dalam pencapaiannya karena adanya konsolidasi yang baik secara internal pada manajemen perusahaan atas implementasi dari informasi risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan.

Diterapkannya manajemen risiko , akan diperoleh manfaat atas penerapannya oleh perusahaan (Mahmudi, 2010) sebagai berikut :

1. Memudahkan perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat atas masalah sulit yang dihadapi oleh perusahaan.
2. Membantu dalam memberikan masukan atas keputusan yang diambil terkait cara kerja yang aman dari risiko.
3. Memberikan dan menyediakan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan.
4. Memberikan analisis yang tepat dan terukur secara cermat dan tepat atas pilihan alternatif yang akan dijalankan perusahaan.

5. Dapat memberikan informasi terkait estimasi biaya yang akan dikeluarkan atas risiko yang akan atau sedang dihadapi perusahaan.
6. Membantu pembuat keputusan dalam mempersiapkan dan menghadapi risiko maupun ancaman yang akan dihadapi perusahaan.
7. Memberikan pendapat secara logis karena adanya analisis yang mendalam atas risiko tersebut.
8. Mengurangi kerugian atas risiko yang tidak terduga yang akan terjadi dan sudah diperkirakan sebelumnya.
9. Memberikan informasi atas proses perencanaan strategi baru dalam mengurangi ancaman dan mencari peluang yang baru untuk perusahaan.

5.4 Strategi dan Tahapan Dalam Melakukan Manajemen Risiko

Dalam pengelolaan operasionalnya, perusahaan akan menghadapi risiko dengan tingkat yang berbeda – beda. Bagaimanapun perusahaan harus siap menghadapi hal tersebut dan diperlukan cara dan strategi dalam melakukan manajemen risiko.

Beberapa strategi manajemen risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Sugi Priharto, 2021) sebagai berikut :

1. Penghindaran risiko
Hal ini merupakan cara yang paling sederhana dalam mengelola manajemen risiko. Dimana perusahaan dapat menghindari risiko tersebut dengan mengabaikan keuntungan bisnis yang akan diperoleh.
2. Pengurangan risiko (mitigasi risiko)
Perusahaan menganalisis atas risiko yang dihadapi dan melakukan pemilihan skala prioritas atas risiko yang harus diselesaikan secara cepat agar tidak berdampak terhadap proses lainnya.

Seperti misalnya , terjadi keterlambatan pembayaran ke vendor , yang apabila ditunda akan menimbulkan beban bunga dan bahkan tidak adanya pengiriman bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Sedangkan proses produksi berkaitan dengan persediaan barang yang harus segera dikirimkan ke konsumen, karena adanya perjanjian terkait waktu pengiriman barang.

3. Penerimaan risiko (retensi risiko)

Beberapa perusahaan yang sudah cukup besar dan memiliki alokasi dana yang mencukupi , pada umumnya dalam tingkatan tertentu mereka akan menerima tingkat/ nilai risiko yang akan diterima, dimana hal ini tidak akan mengganggu kelancaran operasional perusahaan baik dari proses produksi sampai pengiriman persediaan barang ke konsumen.

Hal ini dimaksudkan pada perusahaan yang menginvestasikan dananya dalam proyek – proyek tertentu dalam lini bisnis yang sejenis ataupun tidak sejenis.

4. Pembagian risiko

Strategi manajemen risiko ini terkait dengan pembagian risiko apakah ditingkat para pemegang saham, tingkat departemen dalam perusahaan, maupun dengan vendor/ pemasok perusahaan.

Umumnya pembagian risiko ini bila terjadi karena adanya kondisi diluar prediksi perusahaan / force majeure seperti gempa, resesi ekonomi yang melanda dunia, wabah penyakit yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses produksi.

Kerugian yang dihadapi dibahas secara bersama – sama dan dialokasikan sesuai proporsinya.

5. Pengalihan risiko

Risiko yang akan dihadapi perusahaan dapat dialihkan ke perusahaan lain dengan cara perusahaan ikut serta dalam asuransi. Apakah asuransi properti seperti gedung (bila

terjadi kebakaran) , kendaraan operasional (bila terjadi tabrakan, pencurian, kerusakan, kebakaran) dan asuransi dalam pengiriman barang. Namun ada cost/biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulan/tahunnya. Biaya asuransi yang sudah dikeluarkan bila tidak terjadi risiko maka biaya tersebut tidak dapat kembali/hangus. Namun nilai asuransi yang dikeluarkan tidaklah sama dengan nilai properti yang diasuransikan. Karena adanya cost/biaya tambahan ini maka perlu diperhitungkan dengan baik anggaran biaya asuransinya dan tentukan pilihan mana yang akan dijalankan.

Dalam pengelolaan manajemen risiko, diperlukan tahapan – tahapan yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa tahapan dalam melakukan manajemen risiko (Sugi Priharto, 2021) sebagai berikut :

1. Tetapkan konteks masalahnya
Dalam hal ini perusahaan harus menentukan akar permasalahannya.
2. Identifikasi
Dilakukan identifikasi atas potensi risiko yang dihadapi. Dalam identifikasi ini diperlukan pengetahuan dan pemahaman perihal organisasi, sistem operasional manajemennya, kekuatan dan kelemahan perusahaan terutama yang berhubungan dengan keuangan, proses manufaktur , pasar dimana perusahaan tersebut beroperasi, lingkungan hukum, politik, sosial dan ekonomi.
3. Penilaian
Setelah tingkat risiko dapat diidentifikasi dilakukan penilaian risiko, dimana penilaian risiko harus dapat memberikan informasi kepada manajemen organisasi agar dapat mempelajari risiko utama yang dihadapi dan menentukan keputusan yang akan dilakukan. Penyajian temuan penilaian risiko ini sangat penting terutama untuk

dibahas ditingkat manajemen atas, karena menyangkut kondisi utama dari perusahaan.

4. Penanganan risiko

Setelah diputuskan langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi risiko sesuai dengan tingkat kerugian yang dihadapi, segera dilakukan penanganan risiko. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan transfer risiko, penghindaran risiko, retensi risiko maupun pengendalian risiko.

5.5 Manajemen Risiko Perbankan

Manajemen risiko yang perlu diperhatikan oleh perbankan diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional.

5.5.1 Manajemen Risiko Kredit

Sebagai lembaga keuangan sumber pendapatan yang terbesar adalah pemberian kredit. Oleh karenanya pengelolaan dan pencairan kredit yang diberikan harus benar benar dilakukan analisis secara mendalam untuk meminimalisir risiko yang akan diterima dari kegiatan bisnisnya.

Jenis kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan sebagai berikut (Irham, 2014) :

1. Berdasarkan jenisnya
 - a. Kredit konsumtif (*consumptive credit*) merupakan kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadinya dalam pembiayaan atas pembelian barang dan jasa.
 - b. Kredit produktif (*productive credit*) merupakan kredit yang diberikan digunakan untuk tujuan produktif yang menimbulkan manfaat karena dari bentuknya , tempatnya, maupun waktu dan kepemilikan serta digunakan untuk ekspansi kegiatan bisnisnya.

Kredit ini terdiri dari :

1) Kredit investasi (*investment credit*)

Merupakan kredit yang diajukan untuk digunakan dalam pembelian barang-barang modal (*capital goods*)

2) Kredit modal kerja (*working capital credit*)

Merupakan kredit yang diajukan untuk pembelian bahan baku ataupun kebutuhan suku cadang untuk kegiatan operasional usahanya

Contoh : kepemilikan ruko , toko perabot mebel , toko bahan bangunan dan lain – lainnya.

2. Jangka waktunya

Dibedakan menjadi tiga jenis kredit :

a. Kredit jangka pendek (*short term credit*)

Merupakan kredit dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Contoh : kredit modal kerja

b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Merupakan kredit dengan jangka waktu 1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun

Contoh : pembelian mesin ringan secara kredit untuk proses produksi

c. Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Merupakan kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun

Contoh : kredit pemilikan rumah

3. Berdasarkan jaminannya

a. Kredit yang tidak menggunakan jaminan (*unsecured loan*) merupakan kredit yang diberikan berdasarkan asas kepercayaan.

b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) merupakan kredit yang diberikan dengan menggunakan jaminan yang berwujud maupun tidak berwujud.

4. Berdasarkan kualitas

a. Kredit performing

Merupakan kredit yang dikategorikan pada dua kualitas yaitu kualitas lancar dan kualitas yang harus mendapatkan perhatian khusus.

Umumnya kredit kualitas lancar dilihat dari pembayaran utang yang selalu tepat waktu dan pembayarannya sesuai dengan nilai yang jatuh tempo. Sedangkan untuk kualitas yang mendapatkan perhatian khusus dimana debitur menghadapi beberapa kali keterlambatan dalam pembayaran utang jatuh temponya

b. Kredit nonperforming

Merupakan kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kredit dengan kualitas yang diragukan serta kredit macet (bad debt)

Dengan pemberian jenis kredit tersebut diatas , perlu dikelola manajemen risiko kredit dengan baik ,agar dapat memastikan seluruh kegiatan atau aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Risiko kredit yang dihadapi oleh Lembaga keuangan diantaranya (Rustam, 2017) sebagai berikut :

1. Risiko akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk)

Risiko ini terjadi karena pihak lawan dalam hal ini nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dan umumnya timbul atas transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar.

2. Risiko akibat kegagalan settlement (settlement risk)

Risiko yang timbul akibat nasabah tidak mampu atau gagal dalam penyerahan kas atau instrument keuangan lainnya sesuai due date yang telah disepakati sebelumnya.

3. Risiko kredit akibat *country risk*

Risiko ini muncul dikarenakan adanya ketidakpastian atau memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, gejolak sosial politik serta kebijakan yang diambil oleh suatu negara seperti dalam kontrol nilai tukar.

Yang termasuk dalam *country risk* ini adalah penyediaan dana untuk pihak asing.

Jenis risiko yang termasuk dalam *country risk* (Rustam, 2017) adalah :

a. Sovereign risk

Merupakan potensi kerugian yang terjadi dimana pemerintah suatu negara tidak mampu untuk memenuhi dan melunasi kewajibannya.

b. Transfer risk

Merupakan potensi kerugian yang muncul dimana pihak asing yang berada di luar negeri tidak mampu menyediakan dan memperoleh valuta asing dalam memenuhi serta melunasi kewajibannya yang disebabkan karena adanya pembatasan aliran kas maupun modal oleh pemerintahan suatu negara.

c. Macroeconomic risk

Merupakan potensi kerugian yang muncul dimana pihak asing yang berada di luar negeri tidak mampu memenuhi kewajibannya karena adanya perubahan kebijakan yang diberlakukan di negaranya seperti kenaikan suku bunga untuk stabilitas nilai mata uang negaranya.

Penerapan manajemen risiko kredit dalam perusahaan diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut (Rustam, 2017) :

1. Dilakukannya pengawasan aktif dari dewan direksi dan komisaris
2. Disusunnya kebijakan dan prosedur atas manajemen risiko serta penetapan dalam penentuan limitnya

3. Dilakukannya secara mendetail atas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
4. Penerapan sistem pengendalian intern secara terpadu

5.5.2 Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid uang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan (Rustam, 2017). Beberapa sumber terjadinya rasio likuiditas pada sebuah perusahaan adalah dari komposisi asset, utang dan transaksi rekening administratif serta alokasi dari asset dan utang , kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan(Rustam, 2017). Tujuan dari manajemen risiko likuiditas sebagai berikut (Rustam, 2017) :

1. Untuk memelihara tingkat kecukupan likuiditas dari perusahaan agar setiap saat perusahaan dapat melunasi utang yang jatuh tempo.
2. Untuk memelihara tingkat kecukupan likuiditas dari perusahaan yang dapat mengakomodasi pertumbuhan asset perusahaan secara kontinuitas
3. Agar dapat mempertahankan tingkat likuiditas yang optimal
4. Meningkatkan dan mempertahankan tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perusahaan.

Dalam penerapan manajemen risiko likuiditas di perusahaan cakupannya sama halnya dengan penerapan manajemen risiko kredit.

Alat pengukuran yang digunakan dalam mengukur risiko likuiditas (Rustam, 2017) sebagai berikut :

1. Rasio likuiditas

Merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya.

Rasio likuiditas yang dapat digunakan Current Ratio dan Quick Ratio.

Current ratio ini menghitung pembagian antara asset lancar dengan utang lancar. Semakin tinggi current ratio maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan sangat besar dalam memenuhi kewajibannya.

Quick ratio dihitung dengan mengurangi asset lancar dengan persediaan lalu dibagi dengan utang lancar. Apabila quick ratio tinggi, dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya secara langsung dapat dilakukan karena tanpa menunggu persediaan barang yang ada untuk dijual terlebih dahulu.

2. Profil maturitas

Merupakan pemetaan posisi asset, utang dan rekening administratif ke dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo,

Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan asumsi dan mengestimasi pos neraca dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual seperti karakteristik produk, perilaku pihak nasabah dan kondisi pasar serta pengalaman historis. Penyusunan profil maturitas minimal dilakukan setiap bulan.

3. Proyeksi arus kas

Merupakan proyeksi selurus arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan dalam memenuhi komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Penyusunan proyeksi arus kas minimal disusun setiap bulan dengan penentuan jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

4. Stress testing

Merupakan pengujian terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan stress secara spesifik pada perusahaan maupun stress pada pasar. Pengukuran stress testing yang dilakukan perusahaan harus mempertimbangkan hasil penilaian atas jenis risiko lainnya yang telah dilakukan pengukurannya dan menganalisis kemungkinan terjadinya interaksi antara masing masih risiko tersebut.

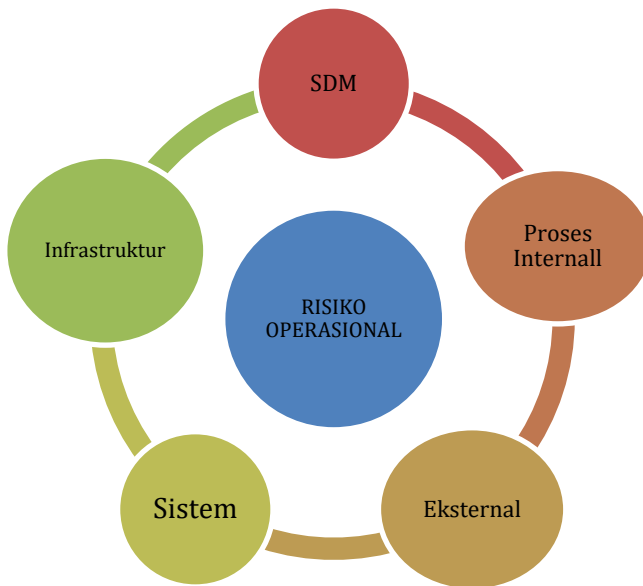
Hasil dari pengukuran stress testing selanjutnya perusahaan perlu menjalankan :

- a. Penyesuaian kebijakan dan strategi atas manajemen risiko likuiditasnya
- b. Penyesuaian komposisi likuiditas atas asset, utang maupun rekening administratif
- c. Dikembangkan rencana pendanaan darurat
- d. Peninjauan penetapan limit yang telah ditentukan , disesuaikan dengan operasional perusahaan yang berlangsung saat ini

5.5.3 Manajemen Risiko Operasional

Hampir seluruh perusahaan yang didirikan akan mengalami risiko dalam operasional atas kegiatan usahanya. Risiko operasional sangat perlu diperhatikan dikarenakan sangat mempengaruhi seluruh kegiatan usaha. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal , kesalahan manusia , kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan (Rustam, 2017).

Risiko operasional ini bersumber pada sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal (Rustam, 2017), yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.4. Sumber Risiko Operasional (Rustam, 2017)

Untuk penerapan risiko operasional di Indonesia saat ini baru diwajibkan diterapkan pada industri perbankan dan lembaga jasa keuangan nonbank. Dalam pengawasan atas risiko operasional perusahaan dapat membentuk unit yang independent ataupun menempatkan pihak yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko operasional dengan tugasnya meliputi :

1. Berkoordinasi dengan direksi dalam pembuatan kebijakan manajemen risiko operasional secara keseluruhan antar bagian/departemen.
2. Membuat dan mengimplementasikan alat yang digunakan dalam mengukur risiko operasional serta pelaporannya.
3. Melaksanakan koordinasi secara kontinuitas antar departemen

4. Menyusun laporan atas profil dari risiko operasional yang disampaikan kepada direktur utama ataupun direktur yang ditunjuk dalam menangani secara khusus komite manajemen risiko
5. Melaksanakan pendampingan secara transparan terhadap unit bisnis dan memberikan pelatihan manajemen risiko operasional.

Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan dua faktor (Rustam, 2017) yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas (risiko inheren) dan sistem pengendalian risiko.

Metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran risiko operasional (Rustam, 2017) sebagai berikut :

1. *Risk control self assessment* (RCSA)

Merupakan manajemen risiko operasional yang mengidentifikasi serta mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak yang muncul serta kemungkinan kejadian yang akan terjadi.

RCSA ini digunakan untuk melihat atas kondisi risiko perusahaan yang akan dialami dimasa yang akan datang

2. *Key risk indicators* (KRI)

Merupakan pengukuran dalam mengidentifikasi serta menganalisis risiko sejak awal atas naik turunnya indikator tingkat risiko perusahaan.

Dengan pengukuran KRI ini perusahaan dapat memantau dan memperkirakan eksposur risiko operasional serta mengidentifikasi perubahan profil risiko operasional dan dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada audit internal

3. *Loss event database* (LED)

Merupakan alat yang digunakan untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Database ini sangat penting =, agar perusahaan dapat

menganalisis dengan membandingkan kondisi yang terjadi sebelumnya. LED ini sangat penting bagi perusahaan dalam hal memastikan atas proses pengendalian internal yang dijalankan apakah sudah memadai atau masih ada kekurangan yang harus diperbaiki.

5.6 Analis Kredit Perbankan

Penyediaan pinjaman dana dikeluarkan oleh Lembaga keuangan perbankan. Kredit adalah penyediaan dana dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (“UU No.10 Tahun 1998,” 1998)

Pemberian kredit oleh perbankan memiliki beberapa fungsi dalam aktivitas perekonomian suatu negara(Irham, 2014) sebagai berikut :

1. Memposisikan uang sebagai alat pertukaran efektif
Di mana bank sebagai lembaga keuangan yang menghubungkan antara entitas yang memiliki kelebihan dana dan yang kekurangan dana.
2. Sebagai penyalur dana dan pembina bagi dunia usaha
Dunia usaha merupakan pihak paling dominan dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam kondisi perkembangan dunia usaha saat ini analis kredit dalam lembaga keuangan berfungsi lebih kompleks tidak hanya menganalisis dan mencairkan dana pinjaman tetapi berperan pula dalam mendampingi debitur dalam setiap keputusan – keputusan yang akan diambil pada masa-masa sulit yang dihadapi dan disebabkan oleh faktor eksternal.
3. Sebagai pengawas moneter
Bank sentral salah satu kegiatannya adalah mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) dalam hal ini dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga pinjaman kredit.

4. Untuk menghindari pemusatan finansial
Disini dimaksudkan agar peredaran uang tidak terpusat hanya di beberapa wilayah/provinsi. Oleh karenanya diperlukan kebijakan pemerintah dalam peningkatan pembangunan di wilayah-wilayah yang lain.
5. Untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan
Dengan dibukanya kantor – kantor cabang di beberapa wilayah maka diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga tercipta pemerataan pendapatan.
6. Sebagai salah satu alat untuk menumbuhkan bisnis internasional
Dengan adanya debitur yang melakukan kegiatan bisnisnya ekspor dan import barang secara langsung menumbuhkan bisnis internasional, dimana terdapat mata uang asing yang menjadi alat tukar dalam kegiatan bisnisnya,
7. Untuk meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa
Dengan pemberian kredit kepada debitur/pebisnis oleh perbankan maka perusahaan dapat melakukan pembelian bahan baku, barang setengah jadi untuk kegiatan proses produksinya. Sehingga akan terjadi transaksi penjualan dan pembelian atas barang maupun jasa.
8. Mendorong dan menciptakan stabilitas ekonomi
Dengan pemberian kredit oleh perbankan dapat membuka lapangan pekerjaan oleh pebisnis , mengendalikan inflasi serta mendukung kegiatan ekspor dan import yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara.

Unsur – unsur yang berkaitan dengan kredit sebagai berikut (Irham, 2014):

1. Kepercayaan (*trust*)
Merupakan unsur yang paling penting, karena disini debitur sebagai pihak peminjam dan kreditur dalam hal ini

perbankan merupakan mitra bisnis dan harus dapat bersinergi.

2. Waktu (*time*)

Dalam hal ini kreditur menentukan jangka waktu untuk kredit yang diberikan berdasarkan hasil analisis bagian kredit diperbankan dan yang telah disetujui oleh debitur dan kreditur.

3. Risiko (*risk*)

Merupakan bagian penting yang harus dikaji kemungkinan terburuk bila pemberian pinjaman menimbulkan kredit macet dan tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Bagian analisis kredit umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan pengajuan kelengkapan data kepada calon debitur sebelum persetujuan pemberian kredit dikeluarkan.

Analisis ini sangat penting , karena dunia usaha dipengaruhi pula oleh kondisi perekonomian dunia.

4. Prestasi

Pengukuran prestasi disini dari kemampuan calon debitur didalam membayar kewajiban pokok dan bunganya. Untuk perpanjangan kredit pada debitur yang lama , waktu analisis perpanjangan kredit atau pemberian kredit yang baru tidak dalam waktu yang lama , karena sudah adanya record/data sebelumnya atas realisasi pembayaran hutang pokok maupun bunganya.

5. Adanya kreditur

Kreditur disini adalah pemilik dana, pemilik barang dan jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain yang diharapkan dapat memberikan keuntungan.

6. Adanya debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan pendanaan, produk (barang) dan pelayanan (jasa) untuk kelancaran operasional usahanya. Dimana debitur harus berkomitmen akan membayar pinjaman kredit tersebut dengan tepat waktu dan lancar

5.6.1 Penilaian dan Pengawasan Kredit

Pengajuan kredit oleh debitur terhadap pihak perbankan akan dilakukan penilaian oleh bagian analis kredit. Penilaian ini umumnya dikenal dengan prinsip 5 C (lima C) sebagai berikut (Irham, 2014):

1. *Character* (karakteristik)

Hal ini menyangkut dari sisi psikologis calon penerima kredit, seperti latar belakang keluarga, hobi dan cara hidup serta kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan. Tinjauan yang dapat dilakukan bagaimana calon debitur ini dalam melakukan keputusan atas bisnisnya serta ketepatan waktu dalam menjalankan perjanjian maupun kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan selama ini terhadap kliennya.

Pengukuran yang dilakukan seperti pembayaran kepada vendor/ pemasok atas utang jatuh temponya serta penerimaan pembayaran dari customer/konsumen. Dari sini akan terlihat bagaimana perputaran arus kasnya.

Memahami karakteristik ini berhubungan dengan kejujuran nasabah dalam memenuhi kewajibannya yang dikenal dengan *willingness to pay*.

Bagian yang dianalisa dalam aspek *character* (Ali Suyanto Herli, 2013) sebagai berikut :

- a. *Track record* di sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia
- b. Domisili rumah tinggal calon debitur
- c. Keterbukaan dan sikap kooperatif calon debitur
- d. Apakah ada hobi negatif dari calon debitur
- e. Keharmonisan rumah tangga calon debitur
Karena perjanjian kredit juga akan ditandatangani dan disaksikan oleh pasangan hidupnya
- f. Komitmen pembayaran calon debitur kepada suppliernya
- g. Kehidupan sosial calon debitur dilingkungan sekitar
- h. Profesi calon debitur apakah masuk dalam kategori high risk debitur seperti wartawan, pejabat dan pengurus partai politik maupun pengacara hukum dan pejabat yudikatif

2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity ini berhubungan dengan “business record” atas kemampuan debitur dalam mengelola usahanya terutama pada saat masa-masa sulit, hal ini akan menunjukkan “*ability to pay*”. Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing debitur tidaklah sama satu dengan yang lainnya meskipun bidang usaha/bisnisnya sejenis.

Bagian yang dianalisa dalam *capacity* (Ali Suyanto Herli, 2013) sebagai berikut :

- a. Omset usaha
- b. Kemampuan bayar
- c. Likuiditas
- d. Mutasi keuangan calon debitur baik di rekening giro/koran maupun tabungan.
- e. Laporan keuangan (terutama untuk perusahaan)
Dalam laporan keuangan ini akan dihitung dan diukur rasio-rasio keuangan (Jusuf Jopie, 2010) sebagai berikut :

1) Rasio likuiditas

Yang menunjukkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban jangka pendek baik kepada pihak bank maupun relasi usahanya.

Tabel 5.1. Pengukuran Rasio Likuiditas (Ali Suyanto Herli, 2013)

No	Pengukuran Rasio	Perhitungannya
1	<i>Current ratio</i>	Aktiva lancar / Utang lancar
2	<i>Cash ratio</i>	Aktiva likuid (kas+surat berharga) / Utang lancar
3	<i>Quick ratio</i>	(Aktiva lancar – persediaan) / Utang lancar

2) Rasio leverage

Yang menunjukkan sejauh mana debitur dibiayai oleh utang dari pihak luar. Semakin tinggi ketergantungan debitur semakin beresiko terjadinya kesulitan finansial.

Tabel 5.2. Pengukuran Rasio Leverage (Ali Suyanto Herli, 2013)

No	Pengukuran Rasio	Perhitungannya
1	<i>Debt to equity ratio</i>	Total kewajiban / Modal Sendiri
2	<i>Long term leverage</i>	Kewajiban jangka panjang / Modal sendiri
3	<i>Short term leverage</i>	<i>Debt to equity ratio – Long term leverage</i>

3) Rasio aktivitas

Menunjukkan kemampuan dan efektivitas calon debitur dalam mengelola sumber-sumber asset yang dimilikinya.

Tabel 5.3. Pengukuran Rasio Aktivitas (Ali Suyanto Herli, 2013)

No	Pengukuran Rasio	Perhitungannya
1	Asset turn over	Penjualan bersih / Total aktiva
2	Fixed Asset turn over	Penjualan bersih / Total aktiva tetap
3	Perputaran piutang dagang	Penjualan kredit / Piutang dagang
4	Collection period	360 hari / (Piutang dagang/Penjualan kredit)
5	Perputaran Hari Persediaan Barang	360 hari / (Harga pokok penjualan/ Jumlah persediaan barang)
6	Perputaran Hari Utang Dagang	360 hari / Harga pokok penjualan / Utang dagang)

4) Rasio rentabilitas

Menunjukkan kemampuan calon debitur mencetak laba dibandingkan dengan total asset atau dibandingkan dengan modal sendiri.

Tabel 5.4. Pengukuran Rasio Rentabilitas (Ali Suyanto Herli, 2013)

No	Pengukuran Rasio	Perhitungannya
1	<i>Gross Profit Margin</i> (GPM)	Laba kotor / Total penjualan bersih
2	<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	Laba bersih / Total penjualan bersih
3	<i>Return On Investment</i> (ROA)	Laba bersih / Total aktiva
4	<i>Return On Equity</i> (ROE)	Laba bersih / Modal sendiri

5) Rasio coverage

Mengukur kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kreditnya yang dibiayai dari sumber dana yang diperoleh dari usahanya.

Tabel 5.5. Pengukuran Rasio Coverage (Ali Suyanto Herli, 2013)

No	Pengukuran Rasio	Perhitungannya
1	EBIT (Earning Before Interest and Tax)	Laba sebelum bunga dan pajak / Beban bunga
2	Devidend Pay Out Ratio	Deviden tunai yang dibayar / Laba bersih setelah pajak

3. Capital (modal)

Diukur dari kemampuan modal yang dimiliki dalam mengelola bisnisnya selama ini. Penilaian untuk capital ini dapat dilihat oleh perbankan pada sisi balance sheet,

income statement, capital structure, return on equity dan return on investment.

Hal ini digunakan oleh kreditur agar pemberian maupun pencairan kredit tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Bagian yang dianalisa dalam capital (Ali Suyanto Herli, 2013) sebagai berikut :

- a. Skala usaha calon debitur
- b. Jumlah modal usaha
- c. Total asset usaha
- d. Posisi usaha calon debitur diantara usaha sejenis dalam satu kota/wilayah yang sama
- e. Prospek penambahan modal dimasa mendatang

4. *Collateral* (jaminan)

Debitur harus menyiapkan jaminan atas kredit yang diajukan. Nilai yang dijaminakan umumnya tidak dengan nilai / jumlah yang sama atau pencairan kreditnya. Jenis barang yang akan dijaminakan berupa *land* (tanah), *building* (gedung), *automotive* (mobil, motor), pesawat dan juga barang-barang lainnya yang dapat disetujui oleh analis kredit.

Bagian yang dianalisa dalam collateral (Ali Suyanto Herli, 2013) sebagai berikut :

- a. Jenis agunan
- b. Legalitas dokumen agunan
- c. Nilai taksiran agunan
Ini dikeluarkan oleh perusahaan appraisal untuk nilai taksirannya dan laporannya diserahkan ke perbankan oleh calon debitur.
- d. Collateral coverage ratio
Nilainya dihitung dari 50% s/d 70% berdasarkan nilai pasar.

- e. Secondary market
Kualitas dan kemudahan untuk menjual kembali atas asset agunan yang diberikan sebagai jaminan.
 - f. Pengikatan agunan
5. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)
- Kondisi perekonomian yang sedang dihadapi oleh suatu negara seperti inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, daya beli masyarakat, iklim dunia usaha maupun kebijakan moneter menjadi pertimbangan bagi pihak perbankan dalam merealisasikan dan memutuskan pemberian kredit terhadap debitur/pebisnis. Bagian yang dianalisa dalam condition of economy (Ali Suyanto Herli, 2013) sebagai berikut :
- a. Angka inflasi
 - b. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
 - c. Angka pengangguran
 - d. Tingkat suku bunga pinjaman dan suku bunga penempatan dana di bank
 - e. Kondisi keamanan sosial di masyarakat

Setelah dilakukan penilaian kredit terhadap calon debitur dan diputuskan nilai pencairan kreditnya , pihak perbankan tetap melakukan pengawasan terhadap debiturnya. Pengawasan dijalankan sampai kredit yang diberikan dilunasi oleh debitur , menghindari terjadinya kredit yang tertunggak.

Jenis pengawasan terhadap debitur yang dijalankan oleh pihak perbankan (Irham, 2014) sebagai berikut :

1. Pengawasan dengan model preventif control
Dilakukan kepada calon debitur sebelum kredit dicairkan atau disetujui. Dengan mengumpulkan kelengkapan berkas pengajuan, survey lapangan, baik jaminan maupun bentuk usaha atas kegiatan bisnis dilakukan.

Hal ini dengan tujuan menghindari kesalahan yang sangat fatal di kemudian hari.

2. Pengawasan dengan model represif control

Dilakukan kepada debitur saat pengajuan kredit sudah dicairkan. Hal ini dimaksudkan agar debitur memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pembayaran utang maupun bunga pinjamannya secara tepat waktu. Dan penggunaan dana kredit peruntukannya sesuai dengan yang tertera didalam perjanjian.

Seperti misalnya penggunaan kredit tersebut adalah untuk pembelian mesin produksi, bukti pembelian mesin tersebut akan diberikan kepada pihak perbankan / kreditur dan pembayaran mesin harus dilakukan pentransferannya ke rekening supplier secara langsung bukan rekening pribadi.

Dapat juga pemberian kredit dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dari debitur dan berdasarkan perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Suyanto Herli. 2013. *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. ANDI.
- Aswad, D. 2007. *Strategic Risk Management: A Framework For Risk Management*. Wharton School Publishing.
- Darmawi, H. 2006. *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Djohanputro, B. 2008. *Manajemen Risiko Korporat*. PPM.
- Djohanputro, B. 2013. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Panduan Penerapan dan Pengembangan. PPM. Jakarta.
- H Abbas Salim. 1998. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanafi M. 2009. *Manajemen Risiko* (2nd ed.). Penerbit UPP STIM YKPN.
- Iban Sofyan. 2005. *Manajemen Risiko*. Graha Ilmu.
- Irham, F. 2014. *Manajemen Perkreditan* (Kesatu). Alfabeta.
- Jusuf Jopie. 2010. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasidi. 2010. *Manajemen Resiko*. Ghalia Indonesia.
- Lam, James. 2007. *Enterprise Risk Management: Panduan Komprehensif bagi Direksi, Komisaris dan Profesional Risiko*, Jakarta. *Badan Sertifikasi Manajemen Risiko*.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIMYKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.03/2016*.
- Rustam, B. R. 2017. *Manajemen Risiko, Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Salemba Empat.
- Sugi Priharto. 2021. *Manajemen Risiko: Pengertian, Prinsip, Tahapan, dan Fungsinya*. kledo.com › blog › manajemen-risiko
- Supranto J, L. H. 2013. *Pengambilan Risiko Secara Strategis Bagi Pengambil Keputusan Bisnis*. Rajawali.

UU No.10 Tahun 1998. 1998. *PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.*

BAB 6

PENGANTAR AKUNTANSI

Oleh Krispina Fenanlampir

6.1 Pendahuluan

Ilmu ekonomi memiliki hubungan erat dengan pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar akuntansi seperti yang mana dikaitkan dengan Siklus Akuntansi, untuk mengetahui Siklus tersebut terdiri dari Jurnal umum, Buku besar dan laporan keuangan. Sedangkan ilmu ekonomi mempelajari tentang produksi, distribusi dan konsumsi barang yang juga mempelajari kebutuhan yang tidak terbatas dengan alokasi Sumberdaya yang terbatas

Dalam dunia bisnis, ilmu ekonomi dan akuntansi sangat penting karena keduanya saling melengkapi. Ilmu ekonomi membantu dalam pengambilan keputusan bisnis seperti menentukan harga produk atau jasa yang dijual, sedangkan akuntansi membantu dalam pencatatan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan.

Dalam mempelajari Ilmu Ekonomi Peran penting Akuntansi dalam Perusahaan perlu di perhatikan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Peran Akuntansi sebagai dasar untuk melakukan pelaporan keuangan pada perusahaan, dan menyediakan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan baik secara interen maupun secara ekstern.

Berbicara tentang ilmu ekonomi maka dalam penerapan kinerja keuangan tidak terlepaspisahkan dari konsep dasar akuntansi yang melandasi isi, bentuk dan pelaporan sebagai konsep usaha secara kontinuitas dan konsep periode akuntansi.

Berbicara tentang usaha entitas maka setiap usaha dalam ilmu ekonomi pastinya berkelenjutan atara secara kontinue tetap

akan menjalankan aktivitasnya. Dimana kegiatan Ekonomi rakyat yang berskala kecil maupun berskala besar perlu memperhatikan masalah penting dengan berfokus pada pengelolaan keuangan. Namun dalam kenyataannya kurang adanya pemahaman dalam menyusun laporan keuangan disebabkan kurang pemahaman akan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

6.2 Pengertian Akuntansi

Proses proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan dijadikan sebagai informasi bagi pihak interes maupun eksetren

American Insitute of Certified Public Accounting (AICPA) “Akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Sistem informasi untuk mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan disebut akuntansi ((Hornrgren Harrison,2007:4) sedangkan Soemarsono S.R (2004) proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan Informasi Akutansi bagi para pemakai infromasi akuntansi.

Dalam bukunya, *Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants* Bastian dan Suharjono (2006), akuntansi adalah adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan yang diukur dengan satuan uang sedangkan menurut Winarno (2006) Akuntansi merupakan proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi untuk disajikan kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam menjalankan usaha maka perlu adanya

pencatatan akuntansi guna meningkatkan keuntungan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan

6.2.1 Tujuan Akuntansi

Tujuan pada sebuah entitas bisnis adalah untuk mencari keuntungan dengan pengelolaan keuangan yang baik untuk itu tujuan dari adanya pencatatan akuntansi dengan melihat pada tujuan akuntansi. Adapaun tujuan akuntansi terdiri atas 2 tujuan antara lain:

Tujuan umum

1. Informasi terkait posisi Aktiva dan Pasiva
2. Informasi perubahan terkait Asset, dan Modal
3. Informasi Perubahan Keuntungan Perusahaan
4. Membantu para Pengguna Eksternal dan Internal Dalam Pengambilan kebijakan

Tujuan khusus

Posisi Keuangan Perusahaan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP).

Tujuan kualitatif

1. Informasi dapat dipercaya
2. Kebenaran akuntansi telah teruji dan valid
3. Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)
4. Dapat dipahami dan mudah dimengerti
5. Informasi yang disajikan cepat dan tepat waktu

6.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Laporan keuangan merupakan prinsip dasar akuntansi diuraikan dari tujuan, pos dan konsep akuntansi sebagai landasan pengembangan Laporan keuangan. Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Entitas Ekonomi sebagai konsep kesatuan usaha.
Dalam melakukan pencatatan transaksi perlu adanya pemisahan kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pemilik.
2. Prinsip Periode Akuntansi
Untuk melakukan Penilaian dan pelaporan keuangan pada sebuah entitas dibatasi pada satu periode atau dalam masa setahun. Terhitung dari awal bulan Januari dan berakhir di bulan Desember.
3. Prinsip Biaya Historis
Setiap biaya yang dikeluarkan pada barang dan jasa dijadikan sebagai pedoman untuk masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan
4. Prinsip Satuan Moneter
Pencatatan transaksi dibatasi dan diukur dengan nilai uang
5. Prinsip Kesenambungan Usaha
Aktivitas Perusahaan Secara Kontinue dan tidak dibubarkan atau diberhentikan kecuali ada peristiwa tertentu.
6. Prinsip Pengungkapan Penuh
Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan. Informasi tidak terungkap namun diberikan keterangan tambahan berupa catatan kaki atau lampiran tambahan informasi.
7. Prinsip Pengakuan Pendapatan
Pendapatan diperoleh dari transaksi Penjualan menimbulkan laba mengalami peningkatan.
8. Prinsip Mempertemukan
Konsep Penandingan (*Matcing*) dimana Biaya di tandingkan dengan Pendapatan.

6.3 Pengguna Informasi

Dalam aktivitas suatu usaha ekonomi sangat memerlukan Manfaat dari akuntansi yang telah sajikan dalam bentuk laporan keuangan yakni sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan hasil kinerja Perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*).

Para informasi i dikelompokan menjadi 2 bagian;

a. Pemakai Internal

- 1) Pemilik perusahaan
Orang yang mempunyai/pemilik sebuah perusahaan
- 2) Direktur
Untuk dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan maka informasi Kemampuan Kas perusahaan perlu diketahui oleh direktur untuk memastikan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo.
- 3) Direktur Operasional dan Manager Pemasaran
Informasi Akuntansi akan besarnya tren penjualan sebagai pedoman untuk menyalurkan distribusi produk perusahaan.
- 4) Manager dan *Supervisor produksi*
Dalam menentukan harga pokok produksi diperlukan untuk menetapkan harga jual Produk per unit.
- 5) Karyawan
Perorangan bekerja dan turut membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan perusahaan dalam mencapai keuntungannya.

b. Pemakai eksternal

- 1) Investor (penanam modal)
Pemilik Investasi Perusahaan dalam membeli dan melepaskan saham.
- 2) Deditur

Informasi akuntansi kepada *supplier* dan *banker* sebagai pengguna untuk melihat sejauh mana resiko dalam memberikan pinjaman atau kredit.

3) Pemerintah

Perusahaan sebagai wajib pajak maka perlu melaporkan kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai dengan penghasilan yang di dapatkan.

Pentingnya Akuntansi dalam bisnis adalah memberikan Informasi untuk manajer dalam kegiatan operasional serta menilai kinerja keuangan perusahaan.

Bila dibidang akuntansi adalah **“bahasa bisnis”** (*language of busines*) melalui akuntansilah informasi bisnis di komunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Contohnya :

1. Profitabilitas produk baru akan terjual dengan melihat kinerja laporan keuangan manajemen untuk memutuskan terjadinya penjualan.
2. Rekomendasi pembelian saham dengan melihat Analisis pasar modal dengan berpatokan pada laporan akuntansi
3. Dalam memberikan kredit kepada perusahaan maka perlu menggunakan laporan akuntansi sebagai bahan pertimbangan.
4. Laporan Keuangan sebagai dasar penetapan pajak oleh Pemerintah (kantor pajak) kepada perusahaan.

Dengan tersedianya sistem informasi Akuntansi yang baik bagi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan:

1. Memberikan nilai kebutuhan yang diperlukan pemangku kepentingan.
2. Membedakan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

3. Membuat rancangan sistem informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengontrol proses akuntansi bagi pemangku kepentingan.
4. Menyajikan dan menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan

6.4 Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum

(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)

Berbicara tentang bisnis dalam ilmu ekonomi maka berbicara terkait konsep biaya dan Konsep entitas bisnis. Biaya sebagai dasar pertukaran atau akuisisi sedangkan data ekonomik berkaitan dengan Sistem akuntansi.

Bukti yang objektif merupakan Konsep objektivitas dengan mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi. Sedangkan data ekonomik dicatat dalam rupiah dan dolar disebut konsep unit.

Dalam penyajian informasi akuntansi harus tunduk kepada *Generally accepted accounting principles* (GAAP). Istilah ini diterjemakan oleh Suwardjono 2010) dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dimana PABU adalah standar akuntansi keuangan yang menunjukkan tatacara melaporkan kejadian keuangan. Ada 2 jenis SAK (Standar Akuntansi Keuangan

1. SAK Lembaga Swasta di Indonesia disusun Oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
2. SAK Lembaga Pemerintah di Indonesia disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dibentuk oleh Menteri Keuangan

6.5 Proses Akuntansi

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan dengan pengendalian keuangan maka perlu diperhatikan proses pencatatan akuntansi pada perusahaan antara lain:

1) Tahap Pencatatan dan Penggolongan

Kegiatan-kegiatan Pencatatan dan Penggolongan antara lain:

- a. Perlu adanya pembuktian dengan pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal,
- b. Setelah bukti transaksi maka pencatatan dilakukan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus yang terdiri dari Jurnal Penjualan, Jurnal Pembelian, Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal Penerimaan kas.
- c. Setelah itu dipostingkan atau dicatat ke dalam buku besar, dan buku besar pembantu hutang dan piutang.

2) Tahap Pengikhtisaran atau Peringkasan

Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini.

- a. Saldo pada buku besar merupakan sumber Penyusunan neraca saldo.
- b. Untuk mempermudah laporan keuangan agar sesuai dengan fakta yang terjadi maka disusun jurnal penyesuaian dan penyusunan kertas kerja/neraca lajur pada akhir periode.
- c. Untuk menutup Akun bersifat sementara serta untuk mengetahui laba atau rugi maka dilakukan pembuatan jurnal penutup.
- d. Untuk mengecek kembali pencatatan pada periode berikut dengan melakukan pencatatan pembuatan neraca saldo setelah penutupan.
- e. Perluasan Usaha, dan penambahan investasi dengan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
- f. untuk mengantisipasi terjadi kesalahan pada periode akuntansi berikutnya maka dilakukan penyusunan jurnal pembalik.

- 3) Tahap Pelaporan dan Penganalisaan Tahap terakhir yang Adapun kegiatan ini meliputi;
- a. Penyusunan Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Modal, Neraca, dan Laporan Arus Kas disebut sebagai laporan keuangan akhir
 - b. Dalam Pengambilan Keputusan maka untuk perkembangan usaha maupun penambahan investasi maka sangat diperlukan Pembuatan analisa laporan keuangan.

6.6 Fungsi Akuntansi dalam Bisnis

Fungsi Akuntansi sendiri pada sebuah bisnis, yakni:

1. Dalam pertumbuhan bisnis membutuhkan Akuntansi
2. Dalam merencanakan kemajuan pertumbuhan perusahaan perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Maka perlu dari sekarang memperhatikan keuntungan satu tahun penuh atau dengan kata lain keuntungan jangka pendek atau jangka panjang.
3. Pentingnya akuntansi dalam mengamankan pinjaman.
4. Laporan Keuangan akan menunjukkan posisi kemajuan perusahaan maka Sebuah laporan keuangan terkini dan dengan adanya posisi keuangan tersebut maka akan menjamin perusahaan untuk mengajukan pinjaman baik ke salah satu bank.
5. Untuk mendapatkan investor atau menjual bisnis Anda.
6. Dengan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam meraih keuntungan melalui laporan keuangan yang akurat maka akan menarik banyak investor untuk bekerjasama dalam menanamkan modal di perusahaan yang profitnya baik

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accounting. 2002. Akuntansi Lingkungan. Newyork: AICPA Inc
- Bastian, Indra dan Suharjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Horngren, Charles T. dan Walter T.Harrison Jr. 2007. Akuntansi Jilid Satu. Edisi Tujuh. Jakarta : Erlangga.
- Soemarso S, R. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, Wing Wahyu, 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

BAB 7

EKONOMI MAKRO

Oleh Tri Widayati

7.1 Pendahuluan

Dasar teori atau analisis ilmu ekonomi terbagi menjadi dua bentuk yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro, analisis meliputi bagian kecil dari semua aktivitas ekonomi, termasuk perilaku konsumen, produsen, atau pasar. Teori ekonomi makro lebih komprehensif (agregat), dimana analisis yang dilakukan adalah total aktivitas konsumen dan produsen (pengusaha). Berdasarkan gaya analisis yang berbeda ini, para ekonom membagi teori dasar ekonomi menjadi teori mikro dan teori makro. Selain perbedaan di atas, makroekonomi dan mikroekonomi berbeda dalam ruang lingkup dan fokus analisisnya. Mikroekonomi lebih berfokus pada analisis keputusan:

- a. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya (*resources*)
- b. Mencapai kepuasan yang maksimum

Analisis-analisis dalam makroekonomi menerangkan tentang :

- a. Bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian
- b. Masalah-masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian
- c. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.

7.2 Isu Utama Dalam Analisis Makro Ekonomi

Dalam teori Makroekonomi, beberapa isu utama yang dibahas adalah :

- a. Faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian
- b. Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh?
- c. Mengapa selalu terjadi pengangguran dan kenaikan harga-harga ?

7.3 Masalah Utama Dalam Perekonomian

Masalah Makroekonomi yang selalu dihadapi suatu negara adalah sebagai berikut :

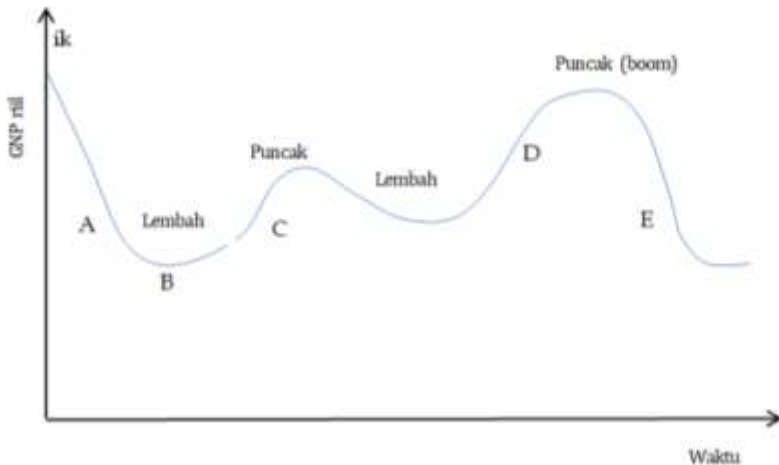
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai aktivitas dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat.(Sukirno, 2015) Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah ekonomi makro jangka panjang. Dari waktu ke waktu kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. Peningkatan kapasitas ini disebabkan oleh faktor produksi yang terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Investasi meningkatkan jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan terus berkembang. Selain itu, angkatan kerja meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, dan pengalaman kerja serta pendidikan meningkatkan keterampilan mereka

Konjungtur (Siklus Kegiatan Ekonomi)

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Ia selalu mengalami pasang surut. Terkadang kegiatan ekonomi berkembang sangat cepat sehingga menyebabkan harga naik. Pada periode lain, perkembangan ekonomi melambat, terkadang melambat lebih

lambat dari periode sebelumnya. Naik turunnya operasi bisnis jangka panjang disebut siklus bisnis atau siklus bisnis. Siklus siklus bisnis berbeda dengan siklus siklus lainnya. Namun, fitur dasar dari setiap siklus adalah sama. Tidak banyak perubahan dalam bentuk siklus yang khas. Bentuk khas dari siklus atau siklus ekonomi ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 7.1. Bentuk Umum Siklus Ekonomi

(Sumber : (Lipsey, Richard G; Steiner, Peter O; Purvis, 1993)

Keterangan :

A : Resesi; B : Depresi ;C : Pemulihan;D : Pemulihan; E : Resesi

b. Masalah Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak aktif mencari pekerjaan, tidak tergolong pengangguran. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang tidak mau bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong pengangguran. Seorang anak dari keluarga kaya

yang tidak mau bekerja karena gajinya kurang dari yang diinginkan juga tidak dianggap menganggur. Ibu rumah tangga dan anak orang kaya digambarkan sebagai pengangguran sukarela.

Sebab-sebab terjadinya Pengangguran

Faktor terbesar penyebab pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini hanya dapat dicapai jika pengusaha dapat menjual barang yang diproduksinya. Semakin besar permintaan, semakin banyak produk dan jasa yang diciptakan. Peningkatan produksi meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Total pengeluaran yang direalisasikan dalam perekonomian biasanya lebih kecil dari total pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Kurangnya permintaan agregat ini merupakan kontributor utama pengangguran. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah sebagai berikut:

- a) Menganggur karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik
- b) Pengusaha menggunakan fasilitas produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja
- c) Perbedaan antara keterampilan yang sebenarnya dari karyawan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industry.

Akibat Buruk Pengangguran

Faktor penting yang menentukan kesejahteraan suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum ketika pekerjaan penuh dapat dicapai. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat sehingga memperlemah tingkat kemakmuran yang telah dicapai. a) stabilisasi kegiatan ekonomi Stabilitas ekonomi yang diupayakan oleh setiap negara biasanya diartikan sebagai keadaan ekonomi dimana tidak ada pengangguran yang berarti dan ekonomi stabil harga. Definisi ini juga mencakup stabilitas neraca. Dengan demikian, konsep stabilitas keuangan mencakup tiga hal berikut:

- a) Beban kerjanya tinggi
- b) Tingkat harga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan
- c) Ada keseimbangan antara ekspor dan impor dan arus modal

c. Masalah Kenaikan Harga-Harga (Inflasi)

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana harga-harga yang berlaku dalam perekonomian mengalami kenaikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Boediono, 2018). Inflasi (dinyatakan sebagai kenaikan harga) bervariasi dari waktu ke waktu dan juga bervariasi dari satu negara ke negara lain. Terkadang inflasi rendah, mis. di bawah 2 atau 3 persen. Inflasi moderat, antara 4 dan 10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat meningkat hingga puluhan atau ratusan persen per tahun.

Faktor penyebab inflasi Di negara berkembang, inflasi biasanya disebabkan oleh satu atau lebih masalah berikut:

- a) Tingkat pengangguran keseluruhan melebihi kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa
- b) Pekerja di berbagai industri menuntut kenaikan gaji

Dampak buruk inflasi

Seperti halnya pengangguran, inflasi memiliki sejumlah konsekuensi negatif bagi individu, masyarakat, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Karen, ini masalah yang harus dihindari. Salah satu konsekuensi penting dari inflasi adalah bahwa ia cenderung mengurangi kekayaan sebagian besar masyarakat. Mayoritas pelaku ekonomi adalah pegawai yang menerima gaji tetap. Inflasi biasanya terjadi lebih cepat daripada kenaikan upah buruh. Oleh karena itu, upah riil pekerja turun karena inflasi, dan keadaan ini berarti tingkat kesejahteraan sekelompok besar orang turun.

d. Masalah Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Ketidakseimbangan Neraca Pembayaran

Kegiatan ekspor dan impor adalah bagian terpenting dari kegiatan ekonomi negara. Perekonomian terbuka berarti bahwa perekonomian mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara lain, terutama melalui kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku antar negara yang berbeda. Ketidakseimbangan ekspor impor dan arus masuk/keluar modal dapat menimbulkan masalah serius bagi stabilitas ekonomi

Kelebihan dan kekurangan perekonomian terbuka

Ekonom klasik telah lama menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri telah memberikan beberapa kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Mengekspor, misalnya, memperluas pasar produk dalam negeri dan ini memberi peluang bagi perusahaan lokal untuk memperluas

bisnisnya. Kegiatan impor juga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan.

Di sisi lain, keterbukaan suatu perekonomian tidak selalu menguntungkan. Kelebihan impor dapat mengurangi kegiatan ekonomi dalam negeri karena dapat mengurangi kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen lebih banyak menggunakan barang luar negeri daripada produk dalam negeri. Pengangguran akan meningkat. Konsekuensi selanjutnya adalah modal domestik mengalir ke luar negeri. Kemudian terjadi ketidakseimbangan antara aliran uang di dalam dan luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai mata uang domestik turun.

Efek Dari Defisit Dalam Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah ringkasan yang menunjukkan aliran uang yang dilakukan oleh negara lain ke negara tersebut dan dari negara tersebut ke negara lain pada tahun tertentu. Pembayaran yang dilakukan meliputi:

- a) Penerimaan ekspor dan pembayaran impor barang dan jasa
- b) Masuknya investasi asing dan pembayaran investasi di luar negeri
- c) Arus masuk dan keluar modal jangka pendek (misalnya investasi luar negeri)

Dua neraca terpenting dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca total. Neraca perdagangan menunjukkan keseimbangan ekspor dan impor. Saldo total menunjukkan keseimbangan antara pembayaran yang dilakukan di luar negeri dan total pendapatan yang diterima dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti bahwa pembayaran di luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri.

7.4 Kebijakan Makroekonomi

Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu Negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya.

Tujuan kebijakan ekonomi makro Tujuan dari semua kebijakan ekonomi adalah untuk mengatasi masalah ekonomi. Berdasarkan permasalahan ekonomi makro yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dipisahkan menjadi lima aspek sebagai berikut:

- a. Menstabilkan kegiatan ekonomi
- b. Mencapai kesempatan kerja penuh (tenaga kerja) tanpa inflasi
- c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabilMemahami neraca pembayaran dan stabilitas nilai tukar

Pemerintah dapat menerapkan beberapa bentuk kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan. Kebijakan yang dapat diberlakukan dibagi menjadi tiga bentuk kebijakan yaitu :Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter (Kebijakan Sisi Permintaan) serta, Kebijakan Sisi Penawaran.

7.4.1 Kebijakan ekonomi fiskal

Kebijakan fiskal berfokus pada anggaran negara dan perpajakan. Kebijakan ini erat kaitannya dengan ekonomi makro karena pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan fiskal.Perubahan dapat dibagi menjadi 2 kelompok:a) secara tidak langsung meningkatkan permintaan agregat melalui pemotongan pajak, memungkinkan konsumen membelanjakan lebih banyak pendapatan setelah pajak untuk barang dan jasa lain, dan b) meningkatkan permintaan agregat dengan berbelanja barang dan jasa

Perubahan pertama melibatkan pengurangan pendapatan pemerintah, sedangkan perubahan kedua melibatkan peningkatan pengeluaran negara. Defisit anggaran negara adalah pendapatan

dikurangi pengeluaran, sehingga kedua bentuk kebijakan fiskal dapat meningkatkan defisit anggaran negara. Defisit anggaran negara dapat berakibat sejumlah permasalahan ekonomi seperti inflasi, sehingga inisiatif untuk melaksanakan kebijakan fiskal terbatas dengan pertimbangan tersebut.

Jika ekonomi bermasalah, salah satu keputusan pembuat kebijakan adalah untuk meningkatkan pengeluaran negara. Jika pengangguran meningkat dan banyak barang produksi yang tak terjual, pemerintah dapat membeli produk tersebut menggunakan anggarannya, dan efeknya adalah peningkatan permintaan yang akan direspon oleh bisnis dengan penyerapan tenaga kerja, dan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan yang ditimbulkan pemerintah melalui pengeluarannya, dengan peningkatan output.

Stimulus ini diharapkan akan memulai permintaan-permintaan yang baru. Jika individu-individu yang awalnya menganggur menjadi tenaga kerja dan menerima pemasukan lagi, mereka akan menggunakan pemasukannya untuk berbelanja barang dan jasa. Ketika pengangguran meningkat dan banyak barang tetap tidak terjual, pemerintah dapat menggunakan anggarannya untuk membeli barang-barang tersebut, dan hasilnya adalah peningkatan permintaan, yang ditanggapi oleh perusahaan dengan mempekerjakan pekerja dan akhirnya menurunkan tingkat pengangguran. Ini bertujuan untuk menutupi permintaan yang dihasilkan negara melalui pengeluarannya dengan meningkatkan produksi. Insentif ini diharapkan dapat memicu pertanyaan baru. Ketika orang yang awalnya menganggur memasuki dunia kerja dan mulai mendapatkan penghasilan lagi, mereka menggunakan penghasilannya untuk membeli barang dan jasa.

Pemerintah menggunakan utang untuk meningkatkan pengeluaran tanpa mengurangi pengeluaran sektor swasta. Ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Namun, hal ini dapat menimbulkan efek

samping berupa defisit anggaran atau pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak pemerintah.

Defisit anggaran meningkatkan utang publik, yaitu akumulasi hutang pemerintah kepada kreditur. Untuk memastikan kepercayaan kreditur, pemerintah mungkin membutuhkan pendapatan pajak di masa depan. Pemberi pinjaman bekerja sama ketika mereka mempercayai pemerintah untuk membayar hutang. Salah satu sumber kepercayaan ini adalah kemampuan pemerintah untuk mengenakan dan memungut pajak.

Secara umum, pendapatan pajak di masa depan dapat menjamin utang pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada investor untuk rotasi. Investor hanya meminjamkan uang karena mereka yakin pemerintah dapat menggunakan pajak untuk melunasi utangnya. Kepercayaan ini memungkinkan pemerintah untuk melanjutkan pinjaman bila diperlukan. Jika investor kehilangan kepercayaan pada pemerintah, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Jika investor kehilangan kepercayaan terhadap pinjaman, pemerintah dapat menggunakan opsi lain selain penerimaan pajak, yaitu meningkatkan jumlah uang beredar.

Peningkatan jumlah uang beredar dapat menyebabkan inflasi. Inflasi menyebabkan hilangnya kepercayaan pada kontrak atau investasi jangka panjang karena tidak ada yang tahu pasti berapa nilai uang di masa depan setelah inflasi. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengalami defisit anggaran yang besar atau utang meningkat, individu, terutama investor, menjadi khawatir. Ada kekhawatiran pemerintah tidak akan mampu memungut pajak untuk membayar utangnya, sehingga diperlukan upaya untuk mengumpulkan uang. Ini akan berakibat fatal bagi perekonomian. Harapan belaka bahwa pemerintah akan mencetak lebih banyak uang di masa depan juga dapat merugikan perekonomian, oleh karena itu pemerintah berusaha menahan utang dan defisit. Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir dengan inflasi ke depan.

7.4.2 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya Bank Sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat (Nopirin, 2000). Dalam perekonomian saat ini, kebijakan moneter merupakan mekanisme yang lebih efektif untuk mengatasi resesi dan mengurangi pengangguran daripada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter diterapkan dengan terlebih dahulu mengubah jumlah uang beredar untuk memanipulasi suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir semua permintaan barang dan jasa, dan investasi, dampaknya luas dan jauh jangkauannya baik dalam mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi.

Permintaan akan jumlah uang beredar tergantung pada tingkat bunga. Konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat bunga yang lebih rendah meningkatkan konsumsi dan investasi, yang meningkatkan permintaan agregat. Suku bunga yang lebih rendah mendorong konsumsi membuat pinjaman bank lebih menarik untuk membiayai perumahan dan kendaraan. Selain itu, tingkat suku bunga yang rendah meningkatkan tingkat investasi perusahaan karena potensi pendapatan investasi akan meningkat di masa depan. Misalnya, jika suku bunga mencapai 10 persen, investor hanya akan meminjam uang untuk berinvestasi pada proyek dengan ROI lebih besar dari 10 persen. Namun, jika tingkat bunga hanya 5 persen, investor dapat berinvestasi di proyek manapun dengan ROI lebih besar dari 5 persen, sehingga akan ada lebih banyak proyek.

7.4.3 Kebijakan Sisi Penawaran

Kebijakan sisi penawaran (*supply-side*) adalah langkah pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan usaha dan pekerja agar produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi diturunkan, dan teknologi dikembangkan. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian melalui penawaran agregat..

Pada saat yang sama, kebijakan sisi permintaan mempengaruhi perekonomian melalui permintaan agregat.

Pada dasarnya, kebijakan sisi penawaran berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor produksi. Diantara upaya yang mungkin adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong kemajuan teknologi. Misalnya, perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif memberi pekerja lebih banyak keterampilan. Ini dapat mengarah pada produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Secara umum, alat untuk kebijakan sisi penawaran mencakup:

- a. Privatisasi
- b. Deregulasi
- c. Bantuan untuk bisnis
- d. Pendidikan dan pelatihan
- e. Riset dan pengembangan

Kebijakan sisi penawaran membutuhkan waktu yang lebih lama dan efeknya lebih bersifat jangka panjang. Misalnya, dalam kasus pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas SDM belum tentu akan nampak dalam satu atau dua tahun saja. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kebijakan sisi penawaran pemerintah dapat benar-benar mengurangi pengangguran. Misalnya, orang mungkin tidak mau mengikuti skema pelatihan. Selanjutnya, jika lebih mudah untuk mempekerjakan dan memecat pekerja, maka kemungkinan ada lebih banyak pengangguran temporer.

Terakhir, kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah ekonomi dalam jangka pendek jika sumber masalah adalah sisi permintaan agregat. Selama resesi, anda tidak akan melihat pemerintah memaksa perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka. Itu tidak akan mengatasi masalah karena pada saat itu permintaan rumah tangga lemah. Jadi, meski output meningkat, tapi tidak ada yang mau membeli

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2018. *Pengantar Ilmu Ekonomi no2 : Ekonomi Makro*. 4th edn. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Lipsey, Richard G; Steiner, Peter O; Purvis, D. D. 1993. *Pengantar Makro Ekonomi*. Kesepuluh. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter Buku 1*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sukirno, S. 2015. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

BAB 8

EKONOMI INTERNASIONAL: PENGARUH KEKUASAAN HEGEMONIK

Oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy

8.1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang ruang lingkup dan pentingnya ekonomi internasional serta sejarahnya. Sejarah perdagangan internasional mencakup petualangan, kekhawatiran akan bahaya yang tak terduga, dan ketidakpastian. Namun, perdagangan internasional telah tumbuh pesat sejak Perang Dunia II, dimana banyak pembatasan perdagangan dihilangkan melalui negosiasi internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*). GATT (UU-RI, 1994), “Merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.” WTO (Rosa, 2023) adalah, “Organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Tujuan dari WTO adalah untuk mengurangi bahkan meniadakan tarif serta nontarif dan hambatan perdagangan lainnya.”

Ekonomi Internasional, dinyatakan bahwa perdagangan internasional memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan kejutan serta bahaya yang tidak terduga. Sejak perjalanan karavan pada abad ke-10 hingga penjelajahan samudera pada abad ke-14 yang dipicu oleh peluang perdagangan, perdagangan internasional

terus berkembang dan membentuk sejarah dunia seperti revolusi Amerika Serikat yang dipicu oleh pembatasan perdagangan Inggris di koloni. Setelah Perang Dunia I, negara-negara di Eropa yang sebelumnya saling berperang mulai menandatangani perjanjian perdamaian sebagai upaya untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang kemudian menjadi cikal bakal Komunitas Eropa saat ini.

Sejak Perang Dunia II, dunia telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam membebaskan perdagangan dari banyak bentuk pembatasan perdagangan melalui perundingan internasional seperti yang dilakukan dalam GATT dan, baru-baru ini, melalui pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pembatasan perdagangan yang kompetitif di masa lalu telah berhasil dihapuskan secara signifikan. Volume perdagangan internasional dunia telah berkembang pesat sejak Perang Dunia terakhir. Hal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh penurunan biaya transportasi, revolusi dalam teknologi komunikasi, serta penurunan risiko karena adanya asuransi dan hukum perdagangan internasional. Namun, semua ini tidak akan berkontribusi banyak jika tidak ada revolusi dalam pemahaman bahwa perdagangan adalah mesin pertumbuhan dan kemakmuran, serta bahwa isolasionisme sudah usang. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk membuka diri dan bekerja sama dalam perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan.

Dalam perdagangan internasional, terdapat perkembangan yang mengkhawatirkan. Perdagangan telah menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat di negara maju dan berkembang. Di antaranya adalah pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka karena barang-barang asing yang lebih murah, suatu harga yang harus dibayar dalam spesialisasi internasional dan alokasi faktor (dalam menghadapi mobilitas relatif buruk). Banyak pendukung perdagangan bebas mulai meragukan manfaat yang diakui dari perdagangan tanpa

hambatan. Para politisi yang khawatir akan konsekuensi dari kehilangan pekerjaan yang marah di daftar pemilih meningkatkan teriakan untuk proteksi. Masalah seperti negara besar vs. negara kecil, negara kaya vs. negara miskin muncul secara teratur, terutama terkait dengan pembagian keuntungan dari perdagangan bebas.

Apakah negara harus membuka ekonominya? Jika ya, bagaimana cara mereka, terutama yang miskin, mengatasi guncangan yang meluas dari seberang perbatasan (dan bukan kesalahan mereka sendiri)? Seberapa cepat harus dilakukan dan dalam urutan apa? Bagaimana hubungan keuangan internasional harus dilakukan? Apakah sebuah negara menyerahkan banyak otonomi dalam pelaksanaan kebijakan makroekonomi demi (atau untuk) tatanan global? Apakah ketergantungan internasional dapat diatur sedemikian rupa sehingga memastikan fungsinya yang lancar dan perkembangan yang adil dan harmonis? Jenis otoritas supranasional apa yang diperlukan oleh tatanan tersebut? Bagaimana urusan mereka akan dilakukan? Apakah hal ini akan mengarah pada jenis pemerintahan dunia? Jika ya, bagaimana bentuknya? Anda dapat memperkaya pengetahuan Anda tentang masalah-masalah ekonomi internasional yang kompleks ini. Namun, apa itu ekonomi internasional?

Bab ini juga ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi ekonomi internasional pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II serta bagaimana peran kekuatan hegemonik dalam menciptakan stabilitas dalam ekonomi internasional. Studi ini juga memberikan penekanan pada pentingnya memiliki kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif dalam menciptakan stabilitas ekonomi internasional. Dalam konteks ini, peran Amerika sebagai kekuatan hegemonik pada masa setelah Perang Dunia II berakhir sangatlah penting. Ruang lingkup studi ini mencakup dua dekade sebelum Perang Dunia II (1919-1939) dan dua dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II, dari tahun 1945 hingga 1965 dengan menekankan faktor-faktor

yang bertanggung jawab dan mempengaruhi situasi ekonomi internasional. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang terutama menggunakan data sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan sumber daya internet.

8.2 Ekonomi Internasional dan Penting untuk Mempelajarinya

(Dey, Harendra K, 2010)

Ilmu ekonomi internasional merupakan bidang studi yang membahas prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan pertukaran barang (dan jasa) antara negara-negara berdaulat (atau lebih tepatnya, antara penduduk mereka) dan masalah-masalah kebijakan khusus yang timbul akibat hal ini. Namun, perlu dipahami bahwa prinsip-prinsip umum ini sama dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk perdagangan antar kelompok dan individu dalam suatu negara. Hal ini karena keuntungan dari perdagangan, baik nasional maupun internasional, muncul dari spesialisasi melalui pembagian kerja yang meningkatkan produktivitas faktor internasional. Namun, spesialisasi tidak mungkin terjadi tanpa perdagangan. Tentu saja, pertukaran yang saling menguntungkan bisa terjadi bahkan tanpa produksi, ketika selera berbeda antara mitra perdagangan. Keuntungan dari pertukaran murni ini dapat meningkat secara signifikan ketika perdagangan membuat realokasi sumber daya produktif berdasarkan keunggulan komparatif menjadi mungkin.

Lalu mengapa perlu mempelajari ilmu ekonomi internasional secara terpisah dari (misalnya) moneter dan perbankan atau ekonomi tenaga kerja? Setiap cabang tersebut memiliki kelompok transaksi yang spesifik. Demikian pula dengan ilmu ekonomi internasional - penduduk dari negara-negara yang berbeda. Secara tradisional, terdapat dua alasan yang mendasari pembelajaran terpisah dari ilmu ekonomi internasional.

1. Pertama, dalam jangka panjang, faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bergerak bebas di dalam batas-batas nasional, sedangkan mobilitas mereka sangat dibatasi antara negara-negara. Sebagai hasilnya, faktor-faktor tersebut tidak dapat berpindah ke lokasi manapun untuk mengambil keuntungan dari imbalan yang lebih tinggi (yang mencerminkan produktivitas yang lebih tinggi). Namun kita tahu bahwa faktor-faktor tidak sepenuhnya tidak dapat bergerak antara negara. Migrasi internasional yang besar pada abad ke-19 adalah pengingat instan atas keberlawanan ini. Tenaga kerja terampil jauh lebih tidak terbatas. Juga tidak sepenuhnya benar bahwa faktor-faktor dapat bergerak mutlak bebas di dalam suatu negara, terutama ketika negara tersebut memiliki budaya dan kelompok etnis yang beragam. Namun demikian, faktor-faktor, terutama tenaga kerja tidak terampil dan semi-terampil, jauh lebih tidak terbatas (umumnya) antara negara-negara daripada dalam suatu negara tertentu. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk menanyakan apakah dan sejauh mana aliran bebas barang dan jasa antar negara dapat menggantikan ketidakmampuan relatif faktor dalam menyamakan imbalan faktor. Dengan kata lain, apakah perdagangan dapat menyebabkan realokasi internasional faktor dan karenanya meningkatkan tingkat pendapatan riil dan kesejahteraan dunia?
2. Kedua, yang perlu diperhatikan dalam studi ekonomi internasional adalah bahwa perdagangan internasional terjadi antara negara-negara yang berdaulat, dan karena itu, mungkin dan bahkan mungkin, bahwa dalam mengejar tujuan nasional yang saling bertentangan, mereka akan mengadopsi kebijakan yang akan, sengaja atau tidak sengaja, cenderung mengurangi arus perdagangan. Dalam konteks ini, tugas khusus teori perdagangan internasional adalah

untuk menyoroti keuntungan dari perdagangan bebas dan fokus pada kebutuhan dan kemungkinan harmoni dan konflik dalam hubungan ekonomi internasional.

Pembagian umum seluruh korpus teori ekonomi menjadi domain mikro dan makro memiliki paralel dalam ekonomi internasional. Ekonomi internasional terdiri dari dua cabang utama, yaitu perdagangan internasional dan keuangan internasional. Yang pertama sesuai dengan mitra mikroekonomi dan menggunakan metode teori keseimbangan statis untuk pertukaran barter dengan uang yang diasumsikan sebagai penghalang. Teori keuangan internasional, di sisi lain, pada dasarnya bersifat makroekonomi dan menangani hubungan moneter internasional yang memiliki arti khusus dalam keadaan ketidakseimbangan neraca pembayaran dan penyesuaian yang dibutuhkan.

Di dunia saat ini, interdependensi ekonomi antara negara-negara sangat kuat terutama dalam hal kebijakan makroekonomi. Misalnya, jika pendapatan nasional Amerika Serikat meningkat, mitra perdagangannya dapat memperoleh manfaat dari peningkatan impor warga negara AS. Namun, kebijakan dalam negeri AS juga dapat mengekspor inflasi atau pengangguran ke luar negeri. Pihak asing kemudian dapat mengambil tindakan balasan yang merugikan. Kebijakan merugikan seperti ini dapat berdampak buruk bagi semua pihak, sebagaimana sejarah membuktikannya. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi ini perlu diatur.

Seperti yang telah ditekankan sebelumnya, perdagangan dapat menjadi mesin pertumbuhan, tetapi dapat juga menjadi bermasalah. Untuk perdagangan menjadi instrumen yang efektif bagi pertumbuhan dan stabilitas, kerangka kerja kerja sama dan pengendalian yang efektif harus dikembangkan. Tugasnya seringkali sulit karena masalah non-ekonomi cenderung memalingkan perhatian dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi internasional.

8.3 Pengaruh Kekuasaan Hegemonik terhadap Ekonomi dan Politik Internasional

Kekuasaan hegemonik diakui sebagai salah satu elemen penting dalam mempelajari dan menganalisis politik internasional dan ekonomi internasional. Kekuasaan hegemonik memainkan peran penting dalam ekonomi politik internasional. Studi ini mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh kekuasaan hegemonik selama periode sebelum dan setelah Perang Dunia II. Sejauh mana ketidakcocokan dalam situasi ekonomi antara kedua periode itu sangat dipengaruhi oleh kekuasaan hegemonik? Apa yang terjadi pada situasi ekonomi setelah Perang Dunia II tanpa kekuasaan hegemonik yang kuat dan efektif?

Teori Stabilitas Hegemonik diterapkan dalam studi ini. Teori ini penting dalam memahami peran yang dimainkan oleh kekuasaan hegemonik dan hubungannya dengan pengembangan ekonomi dan stabilitas politik negara lain dalam sistem internasional. Ide utama dari teori Stabilitas Hegemonik adalah bahwa harus ada sebuah hegemon (kekuasaan pemimpin), yaitu satu kekuatan dominan dan kuat dalam sistem internasional untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik internasional (Kindleberger, 1981, 1995; Webb & Krasner, 1989). Hanya kekuasaan hegemonik yang dapat menetapkan aturan internasional yang memfasilitasi pertukaran yang teratur antar negara dan harus menghukum pelanggar dengan hukuman yang dapat diprediksi. Institusi ekonomi internasional tidak dapat berjalan efektif tanpa kekuasaan hegemonik yang kuat (Yazid, 2007, 2015). Hukum dan regulasi dalam sebuah institusi internasional hanya akan efektif ketika kekuasaan hegemonik memainkan perannya dan bersedia untuk bertindak sebagai kekuasaan hegemonik (Gilpin, 2001; Kindleberger, 1973).

Peran dan pentingnya kekuasaan hegemonik dalam ekonomi dan politik internasional telah banyak dibahas oleh para

ahli hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Strange (1987) berpendapat bahwa gabungan empat elemen penting dalam menjelaskan kemunculan dan kelangsungan kekuasaan hegemonik. Keempat elemen tersebut adalah keamanan militer, produksi ekonomi, perdagangan keuangan, dan pengetahuan teknologi. Keempat elemen ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain serta digambarkan Strange (1987) sebagai sebuah piramida. Keempat elemen tersebut penting dalam membuat dan memberikan kontribusi pada kekuatan kekuasaan hegemonik.

Menurut Keohane (1984), untuk dianggap sebagai hegemonik dalam ekonomi politik dunia, sebuah negara harus memiliki akses ke bahan baku penting, mengontrol sumber modal utama, mempertahankan pasar besar untuk impor, dan memiliki keunggulan komparatif dalam barang dengan nilai tambah tinggi, menghasilkan upah dan keuntungan yang relatif tinggi. Negara tersebut harus lebih kuat dalam dimensi-dimensi ini secara keseluruhan daripada negara lain. Kriteria Keohane untuk kekuasaan hegemonik menekankan faktor-faktor yang terkait dengan ekonomi dan perdagangan.

Gilpin (2001) mendukung pentingnya kekuasaan hegemonik dalam ekonomi internasional. Dia berpendapat bahwa meskipun mungkin memungkinkan untuk menciptakan tatanan internasional liberal yang stabil, namun tanpa hegemon, hal ini tidak akan pernah terjadi. Bagi Gilpin, ekonomi internasional liberal memerlukan hegemon yang berkomitmen pada prinsip-prinsip ekonomi liberal, seperti yang dilakukan oleh Inggris pada abad kesembilan belas dan Amerika Serikat pada abad kedua puluh. Baldwin (1993) mendukung bahwa kekuasaan hegemonik diperlukan untuk stabilitas ekonomi internasional. Dia menulis bahwa peran hegemonik yang dimainkan oleh Amerika Serikat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagian besar negara non-komunis. Strange (1987), Keohane (1984), Gilpin (2001) dan Baldwin (1993) memiliki argumen dasar yang sama bahwa

kekuasaan hegemonik memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi internasional.

Situasi ekonomi internasional selama periode 1919-1939 dan periode setelah 1945 sangatlah berbeda. Perbedaan situasi ini sangat berkaitan erat dengan peran yang dimainkan oleh kekuatan hegemonik dalam perekonomian internasional. Keadaan ekonomi yang tidak stabil selama periode dari 1919 hingga 1939 disebabkan oleh ketiadaan kekuatan hegemonik yang kuat dalam sistem internasional. Inggris tidak dapat berperan sebagai kekuatan hegemonik setelah Perang Dunia I karena ia sangat lemah secara ekonomi. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik setelah akhir Perang Dunia II pada tahun 1945 sangat dipengaruhi oleh kekuatan hegemonik Amerika yang kuat. Pertumbuhan ekonomi positif Amerika Serikat selama periode antar-perang terutama sebelum tahun 1929 sangat mempengaruhi perannya dalam menciptakan posisi yang lebih baik dalam perekonomian dan politik setelah 1945. Stabilitas situasi ekonomi internasional hanya mungkin tercipta dengan adanya kekuatan hegemonik yang kuat. Tanpa kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif, tidak mungkin menciptakan kondisi ekonomi internasional yang stabil.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara situasi ekonomi internasional pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II (1939-1945). Masa antar perang dari tahun 1919 hingga 1939 ditandai dengan situasi ekonomi yang buruk akibat dampak negatif Perang Dunia I yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Pada masa ini, tidak terdapat kekuatan hegemonik yang efektif yang mampu mengatur dan menciptakan stabilitas dalam ekonomi internasional. Meskipun Inggris mencoba untuk memainkan peran sebagai kekuatan hegemonik, namun upaya tersebut tidak berhasil seperti sebelum Perang Dunia I.

Berbeda dengan situasi tersebut, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, situasi ekonomi internasional berubah. Amerika yang menjadi kekuatan hegemonik pada masa itu mampu memainkan perannya dengan baik dan efektif dalam mengatur dan

menciptakan stabilitas dalam ekonomi internasional. Studi ini akan menganalisis peran yang dimainkan oleh kekuatan hegemonik dalam menciptakan stabilitas ekonomi internasional. Kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi internasional. Tanpa kekuatan hegemonik yang kuat, peraturan dan institusi ekonomi internasional yang baik tidak akan berarti apa-apa.

8.4 Situasi Ekonomi Internasional 1919-1939

(Yazid MN, 2020)

Dua dekade antara tahun 1919 hingga 1939 merupakan masa ketidakstabilan ekonomi di tingkat internasional. Tidak ada kekuatan hegemonik yang berperan selama periode tersebut. Inggris yang merupakan kekuatan hegemonik sebelum Perang Dunia I, 1914, terlalu lemah untuk berperan efektif seperti sebelumnya. Ekonomi Inggris sangat lemah setelah Perang Dunia I, 1918. Konflik antara Inggris (kekuatan hegemonik) dan Jerman (kekuatan kontra-hegemonik) selama empat tahun antara tahun 1914 hingga 1918 mengakibatkan situasi ekonomi yang buruk bagi kedua kekuatan tersebut.

Periode antara tahun 1919 hingga 1939 dapat dianggap sebagai "periode transisi" dalam menciptakan kekuatan hegemonik baru. Inggris sangat lemah secara ekonomi dan politik setelah tahun 1918 dan tidak dapat melanjutkan perannya sebagai kekuatan hegemonik (Cohn, 2008). Sejak tahun 1815 hingga 1914, Inggris merupakan kekuatan hegemonik yang efektif dan kuat. Jerman gagal menggantikan peran yang dimainkan oleh Inggris sebagai kekuatan hegemonik baru. Jerman tertekan dan dihukum berat di bawah Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menjadi lebih kuat dan dalam posisi yang lebih baik secara ekonomi, tetapi belum cukup kuat untuk mengambil peran sebagai kekuatan hegemonik (Nye & Welch, 2011). Kebijakan ekonomi tertutup Amerika Serikat membuka

jalan bagi dampak buruk pada ekonomi Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya tidak dapat menjalankan dan meningkatkan ekonomi mereka pasca Perang Dunia I melalui perdagangan internasional, terutama dengan Amerika Serikat (dan negara-negara di bawah pengaruh Amerika Serikat) karena "kebijakan ekonomi tertutup" Amerika.

Hanya kekuatan hegemonik yang kuat yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan politik internasional. Institusi ekonomi dan organisasi regional atau internasional tidak dapat berjalan lancar dan efektif tanpa dukungan kuat dari kekuatan hegemonik yang kuat. Organisasi internasional, Liga Bangsa-Bangsa, dibentuk pada tahun 1919 dengan dukungan kuat dari Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Organisasi ini memiliki struktur, regulasi, dan tujuan yang baik. Tujuan utama adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik internasional dengan tujuan akhir adalah menghindari konflik besar di masa depan seperti yang terjadi dari tahun 1914 hingga 1918. Mengapa tujuan yang indah dan harmonis dari Liga Bangsa-Bangsa gagal? Jawabannya adalah ketiadaan kekuatan hegemonik yang kuat dalam mengelola dan mengatur sistem internasional.

Pada masa setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa didirikan sebagai sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di seluruh dunia. Namun, Amerika Serikat menolak untuk bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa setelah Senat Amerika menolak untuk mendukung Presiden Woodrow Wilson. Hal ini berdampak pada kinerja organisasi ini yang tidak dapat berjalan dengan lancar serta gagal mencapai tujuannya dalam menciptakan ekonomi yang makmur dan stabilitas politik internasional.

Organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa memerlukan adanya kekuatan yang kuat untuk memainkan peran sebagai kekuatan hegemonik. Namun, pada dua dekade setelah Perang Dunia I, Inggris dan Prancis tidak cukup kuat di bidang politik dan ekonomi untuk mendukung dan menjalankan Liga

Bangsa-Bangsa secara efektif. Faktor ekonomi juga sangat penting dalam mengelola sebuah organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa.

Inggris dan Prancis telah berusaha keras untuk mengelola Liga Bangsa-Bangsa, namun kedua negara tersebut sangat lemah secara ekonomi setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918. Kelemahan ekonomi kedua negara tersebut berdampak negatif terhadap keberhasilan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencapai stabilitas politik dan ekonomi internasional. Hal ini menjadi penyebab utama kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dan stabilitas ekonomi internasional pada tahun 1930-an. Ketika negara-negara agresif seperti Italia dan Jepang melancarkan serangan terhadap negara lain, Inggris dan Prancis tidak dapat memberikan sanksi dan hukuman yang efektif kepada pelanggar prosedur Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun Pasal 16 dari Liga Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa "setiap perang yang mengabaikan prosedur Liga Bangsa-Bangsa akan dianggap sebagai perang terhadap semua anggota Liga Bangsa-Bangsa" (Nye & Welch, 2011). Namun anggota Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat melakukan tindakan apa pun terhadap Jepang ketika ia menyerang Manchuria pada tahun 1931 atau terhadap Italia ketika ia menyerang Ethiopia pada tahun 1934. Hal ini terjadi karena posisi ekonomi dan militer kedua negara tersebut yang lemah, sehingga mekanisme sanksi tidak dapat dijalankan tanpa adanya kekuatan hegemonik yang kuat. Kekuatan hegemonik yang lemah gagal dalam mengelola dan mengelola sistem internasional yang kondusif dalam mencapai kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik internasional. Akhirnya, Perang Dunia II pecah selama sekitar lima tahun dari 1939 hingga 1945.

8.5 Situasi Ekonomi Internasional setelah Perang Dunia II

(Yazid MN, 2020)

Setelah Perang Dunia II, situasi ekonomi internasional mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan masa sebelum perang, terutama situasi pada tahun 1930-an. Pertumbuhan ekonomi internasional meningkat pesat sejak akhir tahun 1940-an hingga tahun 1950-an, 1960-an, dan awal tahun 1970-an. Perdagangan internasional, kerja sama internasional, dan investasi langsung asing meningkat pesat. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik erat kaitannya dengan manajemen ekonomi internasional yang dipimpin oleh kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. Perencanaan ekonomi pasca-perang yang mendasar adalah Konferensi Bretton Woods yang diadakan pada bulan Juli 1944. Filosofi dasar dari tatanan ekonomi internasional baru adalah ekonomi liberal terbuka. Amerika Serikat menyadari bahwa kebijakan ekonomi yang tertutup berdasarkan perspektif Merkantilisme memberikan dampak buruk bagi ekonomi internasional. Tidak diragukan lagi bahwa Perang Dunia II yang terjadi dari tahun 1939 hingga 1945 disebabkan oleh masalah ekonomi negara-negara industri (Oatley, 2012). Serangan Jepang di Manchuria pada tahun 1931, Italia di Etiopia pada tahun 1934, dan keputusan Jerman menyerang Polandia pada tahun 1939 erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Untuk menghindari konflik di masa depan, Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terkuat setelah Perang Dunia II harus menjadi pemimpin dalam ekonomi internasional.

Konferensi Bretton Woods pada bulan Juli 1944 membentuk dua lembaga ekonomi internasional penting, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Beberapa tahun kemudian (pada tahun 1947), Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) didirikan. Fungsi utama GATT adalah untuk

menjadi kerangka kerja di mana negara anggota melakukan putaran negosiasi perdagangan multilateral yang bertujuan untuk menyetujui pengurangan tarif. Ketiga lembaga ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi internasional pasca-perang. Ketiga lembaga ekonomi ini disebut Organisasi Institusi Ekonomi Kunci (KEIO). Ketiga lembaga ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang cepat, mendorong perdagangan internasional, dan pertumbuhan internasional yang positif (Cohn, 2008).

Setelah Perang Dunia II, situasi ekonomi internasional sangat berbeda dari periode sebelumnya, terutama pada tahun 1930-an. Pertumbuhan ekonomi internasional meningkat pesat sejak akhir 1940-an hingga tahun 1950-an, 1960-an, dan awal 1970-an. Perdagangan internasional, kerja sama internasional, dan investasi langsung asing meningkat dengan pesat. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik erat kaitannya dengan pengelolaan ekonomi internasional yang dipimpin oleh kekuatan hegemonik Amerika dan sekutunya di Barat.

Konferensi Bretton Woods pada bulan Juli 1944 merupakan perencanaan ekonomi pasca-perang yang fundamental. Filosofi dasar dari tatanan ekonomi internasional baru adalah ekonomi liberal terbuka. Amerika Serikat menyadari bahwa kebijakan ekonomi tertutup berdasarkan perspektif Merkantilisme memberikan dampak buruk pada ekonomi internasional. Untuk menghindari konflik di masa depan, Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terkuat setelah Perang Dunia II harus menjadi pemimpin dalam ekonomi internasional.

Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 mendirikan dua institusi ekonomi internasional penting, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1947, dibentuk Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT). Ketiga institusi tersebut memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

internasional pasca-Perang Dunia II. Ketiga institusi ekonomi ini disebut Organisasi Institusi Ekonomi Kunci atau *Key Economics Institution Organizations* (KEIOs) dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi internasional.

Selain itu, Amerika Serikat juga menciptakan Kawasan Ekonomi Amerika dan kerja sama ekonomi regional. Di Eropa, Masyarakat Batubara dan Baja Eropa didirikan pada tahun 1957 dan menjadi Komunitas Ekonomi Eropa pada tahun 1957. Tujuan kerja sama ekonomi regional ini adalah untuk mengurangi hambatan pada semua bentuk interaksi ekonomi antara negara anggota, dan dengan demikian mempromosikan kerja sama yang lebih besar di antara anggota Komunitas Ekonomi Eropa. Amerika Serikat juga mendukung pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1967 dan bekerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan di kawasan Asia Timur Laut.

Selain itu, Amerika Serikat juga membentuk *American Economic Sphere* dan kerja sama ekonomi regional. Di Eropa, dibentuklah *European Coal and Steel Community* pada tahun 1957 yang kemudian menjadi *European Economic Community*. Tujuan kerja sama ekonomi regional ini adalah untuk mengurangi hambatan dalam bentuk apapun terhadap pertukaran ekonomi antar negara anggota, dan mempromosikan lebih banyak kerja sama di antara negara-negara anggota Eropa.

Di Asia Tenggara, Amerika Serikat mendukung pembentukan *Association of South-East Nations* (Asian ASEAN) pada tahun 1967 dan bekerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan di kawasan Asia Timur. Selain itu, Amerika Serikat juga menyediakan "public good" internasional ke kawasan ini untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi. NATO di Eropa pada tahun 1949, SEATO di Asia Tenggara pada tahun 1954, dan perjanjian keamanan bilateral dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan pada awal tahun 1950-an merupakan contoh

"public good" yang disediakan oleh Amerika Serikat untuk daerah ekonominya.

Mengapa ketiga institusi tersebut efektif dan sangat berkontribusi pada stabilitas ekonomi internasional? Siapa yang berada di belakang pembentukan kerja sama ekonomi regional tersebut? Apakah mungkin institusi ekonomi internasional dan kerja sama ekonomi regional dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada situasi ekonomi yang lebih baik tanpa kekuatan hegemoni yang kuat? Jawabannya terletak pada keberadaan kekuatan hegemoni Amerika Serikat yang kuat setelah Perang Dunia II dan praktik kebijakan ekonomi liberal terbuka. Tanpa kekuatan hegemoni yang kuat, institusi ekonomi dan kerja sama ekonomi regional tidak dapat mencapai tujuannya. Tujuan yang baik dan regulasi yang harmonis membutuhkan kekuasaan politik untuk melaksanakannya.

8.6 Implikasi Kebijakan

Studi ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi negara kecil dan menengah dalam struktur internasional. Negara-negara tersebut harus menjalin hubungan yang baik dengan kekuatan hegemonik. Hubungan yang baik dengan kekuatan hegemonik penting dalam dua hal, yaitu:

1. Pertama, menciptakan struktur internasional yang stabil (dengan dukungan dan kerjasama dari jumlah negara yang lebih besar terhadap kekuatan hegemonik, stabilitas dapat tercipta lebih baik daripada dalam situasi di mana hanya sedikit negara yang bekerja sama dengan kekuatan hegemonik). Di sisi lain, kekuatan hegemonik juga harus mempraktikkan kebijakan ekonomi liberal terbuka. Struktur internasional dan sistem negara saling terkait satu sama lain. Kebijakan ekonomi tertutup Amerika pada periode sebelum Perang Dunia II membawa dampak buruk pada kondisi ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi tertutup

Amerika pada periode setelah Perang Dunia I hingga akhir Perang Dunia II memberikan dampak buruk pada seluruh struktur internasional. Tidak dapat disangkal bahwa Perang Dunia II pecah pada tahun 1939-1945 karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi sangat penting untuk stabilitas internasional.

2. Kedua, negara kecil dan menengah mendapatkan manfaat langsung dari kekuatan hegemonik dan sekutunya. Manfaat langsung dapat berupa hubungan perdagangan internasional, investasi langsung asing, dan aspek lain seperti bantuan ekonomi langsung dan dukungan moral dalam kegiatan ekonomi. Mustahil bagi negara kecil dan menengah dalam struktur internasional untuk mendapatkan investasi langsung, hubungan perdagangan yang baik, dan bantuan ekonomi lainnya tanpa hubungan yang baik dengan kekuatan hegemonik.

Perkembangan terakhir yang terjadi adalah terjadinya persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik menimbulkan kekhawatiran akan berdampak pada perdagangan internasional, terutama di Indonesia. Perdagangan internasional Indonesia dapat terpengaruh oleh konflik antara negara-negara anggota Pakta Trilateral AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat) dan China akibat perang perdagangan dan situasi di Indo-Pasifik. Peningkatan kekuasaan nasional China telah memengaruhi aliran perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS. Hal ini menunjukkan terdapat persaingan antara negara-negara anggota AUKUS dan China terkait kekuasaan nasional mereka. China terus meningkatkan kekuasaan nasionalnya, yang mengurangi kekuasaan nasional negara lain, terutama Amerika Serikat. Namun kita berharap, persaingan dalam pengeluaran militer, konflik perang perdagangan antara Amerika Serikat dan

China, dan situasi di Indo-Pasifik tidak memengaruhi aliran perdagangan internasional dari masing-masing anggota AUKUS ke Indonesia. (Kennedy, 2023)

8.7 Kesimpulan

Studi ini membahas tentang pentingnya dan ruang lingkup ekonomi internasional. Sejak masa lalu, perdagangan internasional telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama setelah Perang Dunia II, yang berhasil membebaskan perdagangan dari banyak bentuk pembatasan perdagangan melalui negosiasi internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*). Namun, perdagangan internasional juga menimbulkan kecemasan dan frustrasi di kalangan masyarakat luas baik di negara maju maupun negara berkembang. Masalah seperti negara besar vs negara kecil, negara kaya vs negara miskin muncul secara teratur, terutama dalam hal pembagian keuntungan dari perdagangan bebas.

Studi ekonomi internasional membahas prinsip ekonomi yang mendasari pertukaran barang (dan jasa) antara negara-negara berdaulat (lebih tepatnya antara penduduknya) dan masalah kebijakan khusus yang timbul sebagai akibat dari hal tersebut. Prinsip-prinsip umum ini sama seperti yang berlaku untuk perdagangan antar kelompok dan individu dalam suatu negara. Studi ekonomi internasional berfokus pada aspek-aspek khusus yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti alokasi sumber daya produktif pada dasar keunggulan komparatif dan realokasi faktor internasional. Keterbatasan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar negara juga menjadi topik penting dalam studi ekonomi internasional.

Terdapat hubungan erat antara situasi ekonomi internasional, stabilitas politik internasional, dan peran hegemoni yang efektif. Situasi ekonomi internasional pada periode sebelum Perang Dunia II buruk karena politik internasional yang tidak

stabil. Pada masa itu, tidak ada kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif untuk menjalankan dan mengendalikan situasi internasional. Inggris tidak cukup kuat untuk mengendalikan sistem internasional. Namun, situasinya berbeda setelah Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945.

Setelah Perang Dunia II, situasi ekonomi internasional mengalami perubahan signifikan. Pertumbuhan ekonomi internasional meningkat pesat sejak akhir tahun 1940-an hingga awal 1970-an, dan perdagangan internasional, kerja sama internasional, serta investasi langsung asing juga meningkat pesat. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik erat kaitannya dengan manajemen ekonomi internasional yang dipimpin oleh kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 membentuk tiga lembaga ekonomi internasional penting, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia/*World Bank*), Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*, IMF), dan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Ketiga lembaga ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi internasional pasca-perang.

Ucapan Terima kasih

Kami berterima kasih kepada “Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pertahanan - Republik Indonesia (RIDU)” dan pihak-pihak lain yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R. E. 1993. Adapting the GATT to a More Regionalized World: A Political Economy Perspectives. in Anderson, K. & Blackhurst, R. *Regional Integration and Global Trading System*. New York: St. Martin's Press.
- Cohn, T.H. 2008. *Global Political Economy: Theory and Practice*. Fourth edition. New York: Longman-Pearson.
- Dey, Harendra K. 2010. International Economics: Scope And Importance, IN International Trade and Finance. Publishing, Printing & Distribution Division (PPD), Bangladesh Open University, Gazipur-1705. Retrived from: https://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOB/MBA/m_ba_3316/Unit-01.pdf
- Gilpin, R. 2001. *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kennedy P.S.J., Sutrasna Y., Haetami. 2023. Does the Competition of Aukus Countries With China in The Indo-Pacific Affect Indonesia's International Trade? *Res Militaris*, vol.13, n°1, Winter-Spring.
- Keohane, R.O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kindleberger, C.P. 1995. *The World Economy and National Finance in Historical Perspective*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kindleberger, C.P. 1981. Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides. *International Studies Quarterly*, 25 (June).
- Kindleberger, C.P. 1973. *The World in Depression, 1929-1939*. Berkerly, CA: University of California Press.

- Nye, J.S. (jr.) & Welch, D.A. 2011. *Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History*. Eight edition. Boston: Longman-Pearson.
- Oatley, T. 2012. *International Political Economy*. Fifth edition. Boston: Longman-Pearson.
- Strange, S. 1987. The Persistent Myth of Lost Hegemony. *International Organization*, 41 (4), 259-274.
- Webb, M.C. & Krasner, S.D. 1989. Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment. *Review of International Studies*, 15 (2).
- Rosa. Nikita. 2023. World Trade Organization: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsi. Retrieved from: detikEdu, 13 Jan 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6512844/world-trade-organization-pengertian-sejarah-tujuan-dan-fungsi>.
- UU-RI. 1994. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/7Tahun~1994UU.htm>
- Yazid, M.N. 2020. The international economic situation during the period before and After World War II: an analysis. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 21(3). Retrived from: https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2020/07/IJBEL21_072.pdf
- Yazid, M.N. 2015. The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economic Stability. *Global Journal of Political Science and Administration*, 3 (6), 67-79.
- Yazid, M.N. 2007. *Hegemonic Powers, Radical Politics & Developmental State: The Case of Indonesia-Malaysia Politcal Relations during the Cold War*. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah Press.

BAB 9

EKONOMI REGIONAL

Oleh Nova Suryani

9.1 Pendahuluan

Ekonomi regional mengacu pada ekonomi suatu daerah atau wilayah tertentu. Ekonomi regional melibatkan analisis dan ilmu kegiatan ekonomi dalam lokasi geografis tertentu, termasuk kegiatan produksi, konsumsi, perdagangan, dan faktor terkait lainnya.

Ekonomi regional tidak terlepas dari persoalan politik karena ekonomi regional adalah ilmu mengenai ekonomi politik. Pada tingkat makro, dapat dikatakan bahwa ekonomi regional dikondisikan oleh ideologi politik. Ekonomi regional dipandang bekerja dengan cara yang mirip dengan ekonomi nasional namun pada tingkat yang lebih kecil atau pada tingkat mikro.

Ekonomi regional memainkan peranan penting dalam memahami potensi ekonomi suatu wilayah dan mengembangkan kebijakan yang dapat mengembangkan prospek pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Ekonomi regional dalam hal ini membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perekonomian suatu wilayah dan merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut.

Ekonomi regional membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan ekonomi suatu wilayah untuk mempromosikan peluang investasi pada sektor industri dan sektor tertentu. Selain itu ekonomi regional juga memberikan wawasan berharga tentang konsep ekonomi suatu wilayah dan membantu menciptakan strategi yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Ekonomi regional adalah semua kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah geografis tertentu. Ekonomi regional dapat dikatakan sebagai bagian geografis dari ekonomi nasional. Ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur-unsur perbedaan potensi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya pada pembahasannya.

Ekonomi regional dapat menganalisa wilayah secara keseluruhan yang bertujuan untuk melihat potensi wilayah yang berbeda-beda untuk mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah atau wilayah. Hal ini berguna untuk memaksimalkan potensi daerah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di daerah tersebut.

Ekonomi regional sangat penting untuk memahami perbedaan antara berbagai daerah dan merancang kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta mengurangi ketimpangan. Ekonomi regional mengkaji tentang saling ketergantungan antar daerah dan bagaimana kegiatan dan kebijakan ekonomi suatu daerah dapat memberikan efek terhadap daerah lainnya, baik secara positif maupun negatif.

Ekonomi regional sangat penting untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pembangunan daerah, termasuk mendorong inovasi dan kewirausahaan, meningkatkan akses pembiayaan dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja di daerah tertinggal. Memahami kesenjangan ekonomi antar daerah sangat penting dalam menyusun kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan.

Samuelson (1995) menyatakan bahwa permasalahan utama dalam ekonomi melibatkan tiga hal penting, yaitu barang apa yang harus di produksi dan berapa banyak yang harus diproduksi. Hal ini berhubungan dengan permintaan dan penawaran dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu bagaimana atau oleh siapa barang tersebut dihasilkan yang berkaitan dengan pilihan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam

memproduksi barang itu dan apakah terdapat pengaturan dalam pembagian peran tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi produk dan untuk siapa produk tersebut dihasilkan. Hal ini terkait dengan pengaturan balas jasa, sistem perpajakan, subsidi, bantuan kepada fakir miskin, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut telah melandasi analisis ekonomi klasik. kemudian para ahli ekonom lain mencoba menjawab persoalan pokok yang menjadi poin keempat yaitu kapan semua kegiatan-kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menciptakan teori ekonomi dinamis (*dynamic economic analysis*) yaitu dengan memasukkan unsur waktu ke dalam analisis. Kemudian muncullah teori-teori terkait pertumbuhan ekonomi (*growth theory*), seperti tahap-tahap pertumbuhan Rostow, siklus bisnis (*business cycle*), dan perencanaan pembangunan (*development planning*).

Kemudian perkembangan ilmu-ilmu ekonomi mengalami peningkatan perkembangan secara pesat, namun masih terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh para ahli ekonom. Para ekonom umumnya mengaggap bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang telah ada dapat berlaku umum disemua tempat atau wilayah. Baik pada daerah yang maju maupun daerah yang terbelakang. Padahal, fakta membuktikan bahwa kondisi tiap-tiap daerah dan wilayah tersebut tidak sama. Keadaan sumberdaya alam, ekonomi, keadaan penduduk dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian suatu kegiatan ekonomi dapat cocok di suatu daerah tetapi tidak cocok untuk daerah lainnya. Masing-masing daerah memiliki penentuan produksi optimun yang berbeda.

Hukum ekonomi yang sudah ada jika diimplementasikan dengan memasukkan unsur tempat atau ruang, akan timbul masalah-masalah yang tidak mampu dijawab dengan teori ekonomi tradisional. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut muncul ilmu ekonomi regional sebagai cabang ilmu ekonomi yang memasukkan unsur lokasi dalam ilmu ekonomi tradisional.

Ekonomi regional muncul untuk menjawab pertanyaan dimana lokasi kegiatan ekonomi dapat dilakukan. Dimana, sebelumnya pertanyaan ini diabaikan dalam analisis ekonomi. Ekonomi regional merupakan ilmu yang berdiri sendiri karena dapat menjelaskan suatu bidang secara menyeluruh sehingga dapat berdiri sendiri sebagai suatu cabang ilmu.

Ekonomi regional juga menjawab poin pertanyaan terkait mengapa hal itu menjadi pilihan terbaik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama ilmu ekonomi regional adalah untuk menjawab pertanyaan diwilayah mana suatu kegiatan ekonomi dapat dilakukan dan mengapa wilayah tersebut menjadi pilihan. Ilmu ekonomi regional dapat memberikan petunjuk dan arah sampai batas di wilayah mana (di bagian wilayah mana), tetapi tidak sampai menunjuk pada tempat kegiatan.

9.2 Tujuan dan Manfaat Ekonomi Regional

Tujuan utama ekonomi regional adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti berinvestasi di sektor-sektor utama yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan dan pendidikan bagi individu untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di sektor tersebut, dan menarik bisnis dan industri baru ke wilayah tersebut. Tujuan ekonomi regional lainnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Menurut Ferguson (1965) mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah untuk menciptakan *full employment* atau dengan kata lain tingkat pengangguran yang rendah, adanya *economic growth* (pertumbuhan ekonomi) suatu daerah, dan terciptanya stabilitas harga (*price stability*) sehingga menciptakan rasa aman.

Kestabilan harga tidak dapat dilakukan pada suatu daerah tanpa bekerjasama dengan daerah lain. Suatu daerah dapat

melakukan hal hal berikut untuk yang menjadi tujuan pokok dari ilmu ekonomi regional, yaitu pemerataan pembangunan dalam wilayah, terjaganya kelestarian lingkungan hidup, penetapan sektor unggulan wilayah, pemenuhan kebutuhan pangan wilayah dan serta membuat hubungan terkait antarsektor yang lebih sesuai dalam daerah sehingga diharapkan dapat bersinergi dan berkesinambungan.

Ekonomi regional memiliki manfaat makro dan manfaat mikro. Manfaat makro terkait dengan pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah atau daerah. Sementara itu, manfaat mikro dari ekonomi regional yaitu dapat membantu perencanaan wilayah dalam menentukan lokasi suatu kegiatan ekonomi dengan waktu dan biaya yang lebih efisien.

9.3 Konsep Wilayah (Region) Dalam Ilmu Ekonomi Regional

Teori ekonomi tradisional beranggapan bahwa setiap daerah memiliki keadaan yang sama sehingga jarak tidak mempengaruhi analisis. Ilmu ekonomi regional hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Ekonomi regional mengatasi kelemahan analisis ekonomi tradisional dengan memberikan analisis pada penerapan konsep *space* (ruang).

Konsep ruang dalam ekonomi regional semakin mendapatkan perhatian sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan daya saing di tingkat subnasional atau daerah. Konsep ini mengacu pada integrasi kegiatan ekonomi dalam wilayah geografis tertentu yang memiliki karakteristik sumber daya alam, budaya, dan ekonomi yang serupa.

Konsep ruang dalam ekonomi regional melibatkan koordinasi antara pemangku kepentingan sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan kekuatan wilayah melalui investasi di bidang infrastruktur, inovasi, pengembangan sumber daya

manusia, dan perdagangan. Melalui konsep ruang dalam ekonomi regional, para pelaku ekonomi bekerjasama untuk mengembangkan jaringan nilai regional dan antar wilayah yang bertujuan untuk memaksimalkan keunggulan komparatif dari kegiatan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, konsep ruang dalam ekonomi regional juga menyoroti pentingnya konektivitas dan kolaborasi, baik di dalam kawasan maupun lintas batas kawasan. Sehingga sangat diperlukan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang efisien serta kerja sama lintas batas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ruang merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan wilayah. Ruang pada dasarnya mempunyai beberapa unsur seperti jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Konsep dari ruang berkaitan erat dengan waktu karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaan membutuhkan organisasi ataupun pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut dengan wilayah.

Secara umum ruang (*space*) dapat diartikan sebagai tempat yang memiliki dimensi tiga tanpa konotasi yang tegas dan lokasinya yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja (Tarigan, 2022:98). Ruang juga dapat diartikan sebagai suatu wadah yang meliputi daratan, lautan, dan ruang angkasa yang berisi daratan, air, udara, dan benda serta sumber daya lainnya sebagai wilayah kegiatan di mana manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara dalam upaya melakukan keberlangsungan hidup. Wilayah merupakan suatu kesatuan geografis yang dibatasi oleh kriteria-kriteria tertentu dimana bagian-bagiannya bergantung pada interiornya (Budiharsono, 2001:14).

Beberapa konsep yang biasa digunakan dalam analisis ekonomi regional yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administratif dan wilayah perencanaan.

Wilayah homogen didefinisikan atas karakteristik (ciri) yang sama di beberapa daerah. Kesamaan tersebut misalnya dalam hal ekonomi seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah dan lain-lain. Contoh wilayah homogen adalah daerah pantai utara jawa barat yaitu daerah Indramayu, Subang, dan Karawang yang merupakan homogen dari segi produksi padi.

Wilayah nodal merupakan wilayah yang secara geografis memperlihatkan suatu koherensi fungsional tertentu, seperti kota dan desa yang saling berkaitan. Wilayah nodal adalah konsep yang mengacu pada simpul atau pusat ekonomi di suatu wilayah di mana kegiatan ekonomi dan pembangunan yang signifikan terjadi. Pusat-pusat nodal ini biasanya memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses yang lebih besar ke sumber daya daripada daerah sekitarnya, yang memungkinkan mereka menarik lebih banyak investasi dan peluang bisnis. Selain itu, keberadaan pusat-pusat nodal dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tetangga melalui efek limpahan. Identifikasi dan pengembangan pusat-pusat nodal sangat penting untuk mempromosikan pembangunan ekonomi regional yang seimbang. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan pusat-pusat nodal dengan menyediakan investasi infrastruktur yang ditargetkan, kebijakan dan program yang mendukung, dan insentif keuangan untuk membangun pertumbuhan wilayah.

Wilayah nodal dapat ditentukan batasannya dari sejauh mana pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan wilayah ekonomi lainnya. Struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan seperti sel hidup atau atom, dimana terdapat inti dan plasma (periferi) yang saling melengkapi. Dalam wilayah nodal terdapat pertukaran modal yang harus ada. Wilayah belakang biasanya akan menjual barang-barang mentah (*raw material*) dan jasa tenaga kerja kepada wilayah inti,

sedangkan wilayah inti akan menjual barang jadi ke daerah belakang.

Wilayah administratif merupakan wilayah yang didasarkan pada kepentingan politik dan pemerintahan dalam batasan wilayahnya. Wilayah administratif ini seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Wilayah administratif merupakan wilayah yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan rencana dan kebijaksanaan pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintahan serta lebih mudah dianalisis kerana pengumpulan data satuan berdasarkan pada wilayah administratif.

Sementara itu wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Contoh wilayah perencanaan yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang) yang lebih mengutamakan aspek ekonomi dan fisik serta sudah lintas wilayah administrasi. Wilayah perencanaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi
- b. Mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada
- c. Struktur ekonomi yang homogen
- d. Mempunyai *growth point*
- e. Menggunakan cara pendekatan perencanaan pembangunan
- f. Masyarakat memiliki kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

9.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan

ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di semua sektor pada suatu wilayah. Perhitungan pendapatan suatu wilayah dinyatakan dalam harga konstan atau nilai riil agar dapat melihat pertumbuhan atau perubahan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik biasanya akan menerbitkan laporan pendapatan regional atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Pendapatan suatu wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanaga, modal, tenaga kerja, dan teknologi) yang secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran suatu daerah. Nilai tambah suatu wilayah dan besarnya transfer payment akan menentukan kemakmuran suatu wilayah. Transfer payment yang dimaksud adalah seberapa besar pendapatan yang mengalir ke dalam wilayah dan pendapatan yang mengalir ke luar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang dapat memberikan gambaran informasi mengenai keberhasilan pembangunan ekonomi regional suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat disajikan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku setiap tahun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga di satu tahun tertentu sebagai dasar.

Para ahli ekonomi berpandangan bahwa jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat ekonomi yang digunakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, para ahli ekonomi klasik memusatkan perhatian kepada pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pertumbuhantingkat produksi nasional dan pendapatan suatu

wilayah. Apabila terdapat kekurangan penduduk dan produksi marginal lebih tinggi dari pendapatan perkapita, maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Namun, apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu, produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh teori Schumer. Pengusaha yang dimaksud menurut teori ini adalah golongan yang akan terus menerus membuat perubahan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Seperti memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan barang, memperluas pasar, mengembangkan bahan mentah baru dan mengadakan perubahan dalam operasi dengan tujuan untuk efisiensi kegiatan perusahaan. Sementara dalam teori neoklasik mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan berasal dari akumulasi modal, meningkatnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi yang terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat.

Samuelson berpendapat bahwa setiap negara maupun wilayah penting untuk melihat sektor atau komoditi yang potensial untuk dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tertentu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Ini dapat diartikan bahwa sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat memproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan yang besar untuk perekonomian. Pertumbuhan sektor tersebut akan mampu mendorong sektor-sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian akan tumbuh secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya juga dapat dinilai sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi

khususnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi juga sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Peningkatan volume variabel ekonomi suatu sub sistem spasial atau wilayah dapat diartikan sebagai tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

9.5 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Regional adalah pendekatan penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pendekatan ini melibatkan berbagai strategi dan kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas, dan mempromosikan inovasi dalam wilayah geografis tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara efektif, pemahaman menyeluruh tentang kondisi, kekuatan, dan kelemahan ekonomi daerah saat ini sangat penting. Hal ini dapat dicapai melalui analisis komprehensif terhadap industri, tenaga kerja, infrastruktur, dan faktor relevan lainnya di kawasan ini.

pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kerjasama dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada pada daerah dengan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

1. Teori basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari suatu wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi di suatu wilayah akan terbagi menjadi kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta menentukan pembangunan menyeluruh dari daerah tersebut. Sementara itu sektor non basis merupakan sektor sekunder (*city polowing*) yang perkembangannya tergantung dari pada pembangunan wilayah secara menyeluruh. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh kinerja wilayah tersebut terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar.

Ekonomi regional mengacu pada kegiatan ekonomi yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu, seperti negara bagian atau provinsi. Memahami basis ekonomi suatu wilayah penting karena beberapa alasan. Pertama, ini membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi kekuatan ekonomi kawasan dan memanfaatkannya untuk pertumbuhan dan pembangunan. Kedua, memungkinkan identifikasi kerentanan dan tantangan ekonomi yang harus diatasi untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Selain itu, memahami basis ekonomi suatu wilayah memungkinkan bisnis dan investor membuat keputusan berdasarkan informasi tentang tempat berinvestasi atau lokasi operasi mereka. Selain itu, pemahaman tentang basis ekonomi suatu wilayah sangat penting untuk membentuk strategi pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan terkait pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah dirancang untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi,

sosial dan lingkungan di berbagai daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai daerah, dan mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap daerah. Terdapat empat peran yang dapat diambil pemerintah daerah dalam proses upaya pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator.

3. Peran Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi swasta mengacu pada kontribusi bisnis swasta dan individu terhadap peningkatan ekonomi. Kontribusi ini dapat berkisar dari investasi dalam infrastruktur dan inovasi hingga penciptaan lapangan kerja dan layanan baru. Pembangunan ekonomi swasta juga melibatkan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan bisnis dan kewirausahaan.

Pembangunan ekonomi swasta memainkan peran penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kuat. Ini karena bisnis swasta dan individu adalah pendorong utama aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi. Sektor swasta memiliki kapasitas untuk berinvestasi dan mengembangkan infrastruktur seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan utilitas yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bisnis dan pengusaha swasta memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi permintaan konsumen yang terus berubah. Selain itu, pengembangan ekonomi swasta juga membantu mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau industri.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peran swasta antara lain sebagai agen perubahan, sebagai penggerak utama dari pembangunan, mendorong berkembangnya inovasi bisnis dan perkembangan teknologi melalui kreativitas serta sebagai partner sektor publik dalam menyediakan jasa dan layanan kepada masyarakat.

9.6 Teori Sektor (*Sector Theory of Growth*)

Teori Pertumbuhan Sektor adalah model yang menjelaskan perkembangan ekonomi wilayah berdasarkan pertumbuhan dan penurunan industri tertentu dari waktu ke waktu. Menurut teori ini, berbagai sektor ekonomi mengalami siklus pertumbuhan dan penurunan melalui pertumbuhan suatu industri baru sementara yang lain ketinggalan zaman. Sehingga interaksi antar industri sangat penting untuk memahami pembangunan ekonomi. Sektor industri dipandang sebagai faktor kunci dalam menentukan pola pembangunan ekonomi menurut teori pertumbuhan sektor. Hal ini sejalan dengan konsep *leading industry*, seperti yang dikemukakan oleh W.W. Rostow, yang mengacu pada industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor industri lainnya. Pada tahap awal pembangunan, emisi suatu negara cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, saat negara bergerak menuju ekonomi yang lebih maju dan berbasis jasa, emisi cenderung menurun karena peningkatan efisiensi dan inovasi. Oleh karena itu, sektor industri memainkan peran penting dalam membentuk sistem ekonomi antar sektor dan mendorong inovasi dan perubahan teknologi yang mengubah peralatan produktif.

Salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana adalah teori sektor. Teori ini dikembangkan berdasar hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian

(sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder), kemudian dalam industri jasa (sektor tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (*sector shift*). Dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah.

9.7 Struktur Industri dan Pertumbuhan Wilayah ***(Industrial Structure and Regional Growth)***

Pentingnya struktur industri dan regional terletak pada penyediaan analisis mendalam tentang kegiatan ekonomi dalam wilayah geografis atau industri tertentu. Analisis ini memungkinkan pembuat kebijakan dan bisnis membuat keputusan berbasis bukti yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal atau wilayah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing secara keseluruhan. Selanjutnya, struktur industri dan regional memfasilitasi pemahaman tentang kekhasan masing-masing wilayah. Hal tersebut memungkinkan ditemukannya solusi yang tepat untuk tantangan ekonomi yang ada pada suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tarigan, Robinso. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 10

EKONOMI KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN

Oleh Arief Yanto Rukmana

10.1 Pendahuluan

Koperasi di Indonesia benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi lebih terlihat sebagai hasil dari upaya berkelanjutan untuk pulih dari krisis ekonomi negara terakhir (Zulhartati, 2010; Harto *et al.*, 2022). Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis nilai tukar dan kemudian menimbulkan krisis utang luar negeri telah membuka mata semua pemerhati ekonomi bahwa “fundamental ekonomi” yang semula dianggap sah ternyata telah hancur. Kesadaran ini telah membuka mata semua pengamat ekonomi terhadap fakta bahwa “fundamental ekonomi” yang semula diyakini valid telah dipatahkan. Konglomerat korporat besar dan sektor manufaktur yang hingga saat ini dipuji sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang kuat dengan rata-rata 7% per tahun, terbukti tidak lebih dari sekadar retorika. Hal ini karena diketahui bahwa kemegahan mereka hanya ditopang oleh utang luar negeri sebagai konsekuensi dari praktik bank venture dan equity mark-up, dan bukan akibat faktor endogen yang merupakan variabel yang berkembang dari dalam.

Dikukuhkan oleh tokoh tokoh besar yang berkontribusi mendirikan negara kita bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang sesuai dengan semangat masyarakat, yaitu konsep kekeluargaan, dan setelah diklaim bahwa koperasi sesuai dengan semangat masyarakat. Bahkan dikutip oleh (Hadhikusuma, 2000) dalam karyanya. Kekeluargaan merupakan suatu pengertian yang telah ditanamkan dalam jiwa negara Indonesia dan selaras dengan

kepribadian bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal itu juga selaras dengan jiwa bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, peran yang diharapkan dari koperasi dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia belum mencapai tingkat yang substansial. Berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia merupakan tantangan yang sebagian besar masih harus dihadapi (Sitepu and Hasyim, 2018).

Tujuan mulia koperasi pada umumnya belum tercapai pada tingkat yang dapat memuaskan cita-cita pendiriannya. Koperasi yang seharusnya mempunyai tujuan mulia, seperti membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial, ternyata belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Padahal seharusnya koperasi ini memiliki mandat seperti itu. Sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin, untuk memindahkan organisasi koperasi ke dalam fungsi dan posisi yang diharapkan. Mempertahankan satu sudut pandang, yaitu betapapun gentingnya situasi koperasi saat ini, jika semua komponen bekerja sama, niscaya akan muncul titik terang. Inilah poin keyakinan yang akan terus dipertahankan oleh artikel ini. Dimaksudkan pula agar memberikan informasi kepada kita semua tentang cara mengembalikan koperasi sesuai dengan cita-cita para pendiri negara kita, sehingga kegiatan ekonomi menjadi milik seluruh rakyat (Baswir, 2012; Rukmana, 2023). Dengan demikian, kesenjangan ekonomi yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi ketimpangan sosial serta permasalahan lain dalam masyarakat dapat dikurangi.

10.2 Permasalahan Koperasi

Koperasi, agar mampu bertahan di era globalisasi ini, tentu perlu melakukan introspeksi terhadap keadaan yang sudah ada di dalamnya. Sudah pasti bahwa untuk bersaing dengan organisasi komersial lainnya, pertama-tama seseorang harus mempelajari sifat sebenarnya dari koperasi. Hanya dengan begitu pintu terbuka

untuk prospek persaingan. Sangat terbukti bahwa organisasi koperasi adalah organisasi swadaya, jika dilihat dari segi bentuk organisasinya (Thoharudin, 2017; Rukmana and Sukanta, 2020).

Ide utamanya adalah bahwa koperasi dapat berfungsi sebagai perusahaan komersial yang mandiri. Persoalannya, tingkat otonomi yang dinikmati koperasi masih sangat tinggi. Karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat besar, mencapai otonomi koperasi mungkin agak menantang. Otonomi koperasi pada tataran konseptual juga berimplikasi bahwa badan usaha koperasi harus dipisahkan dari lembaga pemerintahan. Artinya, koperasi bukanlah lembaga yang dilihat dari fungsinya, merupakan alat administrasi langsung pemerintah, yang mewujudkan tujuan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah (Warsiati, Sudartono and Dewi, 2020).

Persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam berbagai jenis struktur organisasi koperasi merupakan salah satu yang menonjol dan banyak menyita perhatian. Dalam penelitian Subyakto (1996), persoalan akses sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan hambatan yang paling mendasar dalam pemberdayaan koperasi dan perusahaan kecil. Pengurus dan pekerja sama-sama menjadi pelaku aktif organisasi dan menjadi personel garis depan dalam proses melayani anggota koperasi baik secara kooperatif maupun saling menggantikan (Masgudi, 1990).

Dalam proses manajemen koperasi yang dipraktikkan di Indonesia, seringkali muncul situasi di mana individu saling menggantikan (Baswir, 2012; AY Rukmana, 2017; Wakil *et al.*, 2022). Tingkat kepuasan yang dialami oleh banyak pihak yang terlibat dalam pertumbuhan koperasi dipengaruhi oleh kinerja karyawan lini depan. Pihak-pihak ini termasuk anggota koperasi dalam perannya sebagai pemilik dan penerima manfaat, pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pembimbing, dan mitra komersial dalam perannya sebagai pemasok, distributor, produsen, penyandang dana, dan sebagainya.

10.3 Manajemen Koperasi

Organisasi seperti koperasi perlu ditangani dengan cara yang sama seperti yang dilakukan organisasi korporasi. Sangat penting bagi entitas komersial untuk memiliki manajemen yang efektif dan efisien. Konsep ini dikenal sebagai manajemen. Demikian pula pengurusan merupakan hak yang harus ada dalam organisasi usaha koperasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Rahardjo, 2011; Gunawan, 2021; Al Aidhi *et al.*, 2023).

Manajemen koperasi dapat dipecah menjadi tiga kategori utama, dari sudut pandang organisasi: anggota, administrator, dan staf. Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas adalah contoh peran-peran di dalam organisasi yang sepintas terlihat memiliki struktur dan perlengkapan yang sama. Namun, peran ini sebenarnya dapat dibedakan satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara fungsi manajemen dan fungsi organisasi. Bagian unsur pengawasan yang termasuk dalam perlengkapan organisasi koperasi pada hakekatnya adalah kepanjangan tangan para anggota, dan tujuan utamanya adalah membantu pengurus dalam melaksanakan tugas pengawasan sehari-hari terhadap jalannya organisasi koperasi serta sebagai bisnisnya. Pengembangan perusahaan koperasi dan organisasi yang mampu menawarkan anggota dengan tingkat layanan tertinggi sangat penting untuk berkembangnya koperasi sebagai model ekonomi (Faedlulloh, 2015). Koperasi hanya dapat berhasil jika ketiga komponen organisasi tersebut bekerja sama.

Jika ditinjau dari sudut pandang proses pengambilan keputusan, manajemen koperasi menekankan pada partisipasi demokratis. Dalam organisasi koperasi, konsep "satu orang, satu suara" (kadang-kadang ditulis sebagai "satu orang, satu suara") sangat mengakar. Akibatnya, pengelolaan koperasi sering dianggap kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Kesimpulannya, dalam hal gaya manajemen, manajemen kooperatif sesuai dengan gaya manajemen partisipatif. Dalam gaya ini, anggota koperasi

diperlakukan sebagai subjek, dan manajemen memainkan peran aktif dalam melakukan kontrol terhadap administrasi organisasi.

10.4 Kewirausahaan Koperasi

Dalam definisi yang diberikan oleh (Baswir, 2012) wirausahawan adalah orang yang memiliki kapasitas untuk mengenali dan mengevaluasi kemungkinan bisnis potensial, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut, dan mengambil langkah yang tepat untuk memastikan keberhasilan usaha tersebut. Definisi ini juga berlaku bagi pengusaha koperasi.

Individu yang memiliki sikap mental konstruktif yang berorientasi pada tindakan dan yang sangat terdorong untuk mengambil risiko dalam mengejar tujuannya adalah contoh individu yang terlibat dalam kewirausahaan kooperatif. Namun, selain itu, mereka adalah individu yang mempertimbangkan dan memikirkan semuanya sebelum memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Setiap pilihan tidak dibuat atas dasar coba-coba; sebaliknya, pertimbangan yang cermat diberikan pada setiap peluang bisnis, dan informasi yang berguna dikumpulkan agar keputusan dapat dibuat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sitepu and Hasyim, 2018) memaparkan wirausahawan, bahkan wirausahawan koperasi, memiliki kualitas dan kepribadian yang membedakannya dari orang kebanyakan. Berikut adalah penjelasan dari sifat dan karakteristik tersebut:

- a. Miliki keyakinan yang kuat pada kemampuan diri sendiri.
- b. Berfokus pada tugas dan hasil, dimotivasi oleh keinginan untuk berhasil, berorientasi pada keuntungan, memiliki daya tahan dan ketabahan, bertekad untuk melakukan banyak upaya, dan memiliki energi inisiatif.

- c. Memiliki kapasitas untuk terlibat dalam perilaku pengambilan risiko dan membuat penilaian dengan cepat sambil berhati-hati.
- d. Memiliki jiwa kepemimpinan, suka bergaul dengan orang lain, dan terbuka untuk menanggapi baik saran maupun kritik.
- e. Memiliki karakter yang inovatif, inventif dan rajin.
- f. Fokus, visioner, memiliki orientasi pada masa depan.

Ditegaskan (Thoharudin, 2017), koperasi kewirausahaan adalah sikap mental positif untuk bekerja secara kolaboratif dengan mengadopsi upaya baru, memiliki kepercayaan diri untuk mengambil risiko, dan berpegang pada gagasan identitas koperasi untuk mewujudkan tuntutan aktual dan meningkatkan kekayaan bersama. Seperti yang akan ditunjukkan pada bagian selanjutnya, definisi tersebut juga mencakup komponen lain yang penting dengan uraian dimensinya.

Sikap mental optimis untuk melakukan sesuatu bersama-sama diperlukan untuk bisnis koperasi (Yanto Rukmana, Harto and Gunawan, 2021; Hutapea, 2023; Sugiarto *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa individu yang berwirausaha koperasi (yang menjalankan usaha koperasi) perlu memiliki motivasi untuk menumbuhkan organisasi koperasi, baik yang meliputi usaha koperasi maupun usaha anggotanya. Usaha ini harus dilakukan secara kooperatif, dalam arti setiap kegiatan niaga yang dilakukan oleh koperasi harus mendahulukan kebutuhan anggotanya (Sitepu and Hasyim, 2018).

Tanggung jawab utama pemilik usaha koperasi adalah melakukan usaha baru, yang mengharuskan mereka untuk mencari, menemukan, dan memanfaatkan kemungkinan yang sudah ada untuk kepentingan masyarakat (Cornforth, 1995; Soegoto, 2017) Menginovasi tindakan seseorang adalah sesuatu yang tidak hanya harus dilakukan ketika memulai sebuah

perusahaan, tetapi juga ketika bisnis sudah berdiri dan berjalan, dan bahkan ketika perusahaan koperasi mengalami penurunan. Saat meluncurkan perusahaan, untuk memfasilitasi ekspansi dan produksi koperasi yang cepat. Kemudian, setelah perusahaan koperasi tersebut berdiri, dengan tujuan agar koperasi tersebut sekurang-kurangnya dapat tetap eksis sebagai usaha koperasi yang saat ini beroperasi secara efisien. Ketika ada penurunan dalam upaya kolaboratif, atau ketika ada stagnasi, yang lebih diperlukan adalah aktivitas baru (Cline, 2000).

Kewirausahaan koperasi sangat penting pada periode waktu itu untuk mengantarkan fase baru keberadaan koperasi. Ketersediaan untuk mengambil risiko adalah kualitas yang diperlukan untuk bisnis koperasi. Karena dunia penuh dengan ketidakpastian, ada kalanya hal-hal yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Karena itu, kapasitas untuk mengambil peluang dan bertindak secara kewirausahaan diperlukan untuk mengatasi keadaan seperti ini secara efektif. Pengambilan risiko ini tentunya dilakukan setelah melakukan perhitungan yang matang (Esteban and Dinar, 2013).

Fokus dari operasi koperasi, yang berfokus terutama pada pasar domestik, dapat membantu mengurangi beberapa bahaya yang muncul saat menjalankan bisnis di lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Karena koperasi dimiliki oleh masing-masing anggota, pasar internal memungkinkan setiap perusahaan menjadi beban keuangan koperasi secara keseluruhan. Karena itu, tidak masuk akal untuk percaya bahwa anggota dapat melakukan apa saja untuk merusak koperasi mereka. Bahkan jika ada kerugian dalam operasi operasi, risikonya akan dibagi di antara para anggota, yang akan menghasilkan pengurangan risiko yang jauh lebih kecil untuk masing-masing anggota (Carina *et al.*, 2022).

Namun, jika perusahaan koperasi lebih fokus pada pasar eksternal, seperti KUD, maka risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian akan memiliki bobot yang sama dengan bahaya yang dihadapi para pesaingnya. Hal ini karena usaha koperasi akan

lebih terekspos kepada yang tidak diketahui. Dalam keadaan seperti ini, pekerjaan yang dibutuhkan pengusaha koperasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang dibutuhkan pengusaha koperasi yang lebih fokus pada pasar dalam negeri (Sulaiman, Masrukin and Suswanto, 2020).

Operasi kewirausahaan yang menjadi bagian dari koperasi harus sesuai dengan ide identitas koperasi, yang menyatakan bahwa anggota harus menjadi pemilik dan konsumen koperasi. Untuk memastikan bahwa anggota ingin terlibat aktif dalam koperasi, kepentingan anggota harus diprioritaskan. Akibatnya, pengusaha koperasi dipercayakan dengan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dengan melayani berbagai kebutuhan anggotanya (Afrida *et al.*, 2021).

Untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi yang sebenarnya dan untuk meningkatkan tingkat kekayaan bersama secara keseluruhan harus menjadi fokus utama setiap pengusaha koperasi (Suryokumoro and Ula, 2020). Pekerjaan seorang pengusaha yang menjalankan koperasi memang agak menantang karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam lingkungan koperasi. Pemangku kepentingan ini termasuk anggota koperasi, perusahaan koperasi, pekerja, dan masyarakat luas, antara lain. Kadang-kadang, seorang pengusaha koperasi mungkin menemukan diri mereka dalam situasi di mana ada konflik kepentingan antara banyak pihak yang terlibat. Jika dia lebih mementingkan bisnis koperasi, maka dia tentu harus berorientasi pada pasar eksternal, dan ini menyiratkan bahwa nilai layanan yang diberikan kepada anggota akan berkurang. Di sisi lain, perluasan koperasi akan terhambat jika fokus ditempatkan pada pasar internal organisasi itu sendiri daripada mengutamakan kepentingan anggotanya.

Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, pengurus, birokrat yang berperan dalam pengembangan koperasi, dan katalisator yaitu orang-orang yang peduli terhadap kemajuan koperasi (Zulhartati, 2010). Kewirausahaan dalam

koperasi dapat dilakukan oleh anggota, pengurus, birokrat yang berperan dalam pengembangan koperasi, dan katalisator. Ada sedikit keraguan bahwa empat kategori pengusaha koperasi yang berbeda masing-masing memiliki rentang kebebasan bertindak dan motivasi mereka sendiri yang unik, yang pada gilirannya menentukan tingkat efisiensi mereka sendiri yang unik.

10.5 Klasifikasi Koperasi di Indonesia

Koperasi dapat dipecah menjadi beberapa kategori yang berbeda sesuai dengan peran yang mereka mainkan. Dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 bahwa berikut adalah daftar beberapa macam koperasi yang terdapat di Indonesia.

10.5.1 Koperasi Konsumen

Koperasi berorientasi konsumen ini melayani mereka yang menggunakan berbagai produk dan layanan, seperti namanya. Pada pandangan pertama, ini mungkin tampak seperti toko biasa umumnya karena barang dagangan khas terdiri dari bahan makanan dan perlengkapan kantor, antara lain. Perbedaan utamanya adalah bahwa masing-masing anggotanya akan mendapatkan sebagian dari pendapatan dari penjualan barang-barang mereka. Selain itu, harga barang seringkali lebih rendah daripada yang ditemukan di toko konvensional. Hal ini disebabkan karena nasabah koperasi konsumen biasanya juga menjadi anggota koperasi.

10.5.2 Koperasi Produsen

Anggota koperasi ini adalah mereka yang membuat barang atau memberikan jasa, sesuai dengan nama organisasinya. Koperasi khusus ini bergerak dalam bisnis penjualan produk yang telah dibuat oleh anggotanya; misalnya, koperasi peternak sapi perah dapat menjual susu, sementara koperasi peternak lebah dapat menawarkan madu. Ketika produsen berkumpul dalam

koperasi, mereka dapat membeli bahan mentah dengan harga lebih murah dan menawarkan barang mereka dengan harga yang lebih adil.

10.5.3 Koperasi Jasa

Koperasi jasa ada kesamaan yang mencolok antara koperasi konsumen dan koperasi jasa; perbedaan utama adalah bahwa koperasi jasa mengatur dan melaksanakan kegiatan dan menawarkan layanan khusus untuk anggotanya. Misalnya, ada koperasi yang menyediakan jasa di bidang asuransi dan transportasi.

10.5.4 Koperasi Simpan Pinjam

Asosiasi simpan pinjam koperasi menyediakan pinjaman bagi anggota koperasi. Tujuan koperasi ini adalah untuk menyediakan anggota yang membutuhkan bantuan keuangan segera dengan persyaratan yang menguntungkan dan tingkat bunga yang wajar.

10.5.5 Koperasi Serba Usaha

Selain dari beberapa jenis koperasi yang telah di sebutkan sebelumnya, ada koperasi yang menyediakan banyak layanan sekaligus. Ilustrasi yang baik tentang hal ini adalah fakta bahwa selain menyediakan barang-barang konsumsi, koperasi juga menawarkan berupa layanan simpan pinjam. Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah nama lain dari koperasi jenis ini.

10.6 Kewirausahaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengusaha memakai banyak topi dan bertanggung jawab atas berbagai macam tugas. Individualisme dan aktivitas memiliki peran dalam usaha kewirausahaan. Gagasan pembangunan ekonomi penting di semua tingkatan, termasuk perusahaan, wilayah, industri, dan bangsa. Oleh karena itu, mengasosiasikan

aktivitas kewirausahaan dengan perluasan ekonomi melibatkan hubungan antara tingkat individu dan tingkat kolektif (Rukmana *et al.*, 2021; Wakil *et al.*, 2022).

Dalam bentuknya yang paling mendasar, kewirausahaan dapat dilihat sebagai pola aktivitas individu. Penting untuk ditekankan bahwa menjadi wirausahawan bukanlah profesi, juga bukan kategori individu yang terdefinisi dengan baik yang dapat dikategorikan dengan cara tertentu. Bahkan mereka yang tampak sebagai pengusaha alami mungkin hanya menunjukkan semangat kewirausahaan mereka pada tahap tertentu dalam karir mereka atau mengacu pada aspek tertentu dari kegiatan mereka.

Istilah "usaha kecil" tidak identik dengan istilah "kewirausahaan". Wajar jika masyarakat yang memiliki aspirasi wirausaha dapat menyalurkan aspirasinya melalui pembentukan usaha kecil. Tidak perlu meluncurkan atau mengelola bisnis kecil untuk dianggap sebagai pengusaha. Individu dengan jiwa wirausaha yang bekerja untuk bisnis besar dan disebut sebagai "intrapreneur" atau "pengusaha korporat" bertindak serupa dengan wirausahawan. Ada kecenderungan untuk "salinan ukuran kecil" dalam konteks ini, yang dapat dilihat melalui penggunaan unit bisnis, anak perusahaan, atau usaha patungan, misalnya (Carree & Thurik, 2010).

Penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang semua anggota masyarakat adalah cara utama aktivitas kewirausahaan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, perluasan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan aktivitas kewirausahaan. (Cornforth, 1995) menemukan bahwa hubungan antara kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sama di negara-negara yang berada pada berbagai tahap pembangunan.

Karena peran pengusaha mendorong kelimpahan informasi, kreativitas (Harto, Rozak and Rukmana, 2021), dan

inovasi komersial, serta mengarah pada lapangan kerja yang lebih besar dan persaingan yang lebih ketat, kewirausahaan memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi baru. Penciptaan bisnis baru yang menyediakan barang dan jasa yang bersaing langsung dengan yang sudah ada di pasar membantu pengembangan lingkungan yang kompetitif di mana hanya perusahaan yang paling kompetitif yang dapat berkembang dan berkembang. Hasil kumulatif dari proses seleksi ini pada akhirnya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertama, startup paling sukses mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan menjadi perusahaan dengan pertumbuhan tinggi, dan kedua, pengenalan perusahaan baru menginspirasi perusahaan yang sudah ada untuk menjalankan bisnis dengan lebih baik. Hal ini karena persaingan dari perusahaan baru mendorong perusahaan saat ini menjadi lebih efisien (Zulhartati, 2010; Chadijah *et al.*, 2023; Zulkifli, 2023).

Proses mengintegrasikan aktivitas kewirausahaan ke dalam ekonomi membantu meningkatkan laju dan kualitas ekspansi ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Dikemukakan oleh (Harto *et al.*, 2022; Fkun *et al.*, 2023a), proses integrasi dalam kewirausahaan beragam dan dapat mengambil tiga bentuk berbeda. Tergantung pada keadaan, masing-masing bentuk ini memiliki potensi untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan cara yang unik (Fkun *et al.*, 2023b; Hakim *et al.*, 2023).

Derajat kelembagaan yang ada dalam suatu perekonomian inilah yang menentukan daya serap proses integrasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi melalui usaha wirausaha. Di negara-negara industri, semua jenis integrasi bisnis dicirikan oleh tingkat pelembagaan yang baik, yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif untuk pembangunan ekonomi. Ini berbeda dengan negara-negara kurang berkembang, di mana tingkat pelembagaan ini kurang. Tingkat pertumbuhan ekonomi serta kualitasnya terhambat oleh perusahaan independen serta merger dan akuisisi. Di sisi lain, klaster, inovasi teknologi, dan

inovasi jaringan semuanya mempercepat laju pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitasnya. Proses integrasi kewirausahaan ke dalam perekonomian memiliki dampak tersendiri terhadap perluasan ekonomi di negara-negara berkembang, yang memerlukan lebih banyak pelembagaan. (Sergi *et al.*, 2019)

10.7 Kewirausahaan Sebagai Inovator Pencipta Lapangan Pekerjaan

Peluang kerja baru akan diciptakan oleh pengusaha perorangan maupun kelompok pengusaha yang bertindak sebagai inovator. Keterkaitan kewirausahaan dengan lapangan kerja selalu sejalan dengan maraknya usaha wirausaha, dengan meluasnya usaha wirausaha di beberapa lokasi juga mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru. Pengusaha memiliki kemampuan untuk meningkatkan tingkat inovasi atau daya saing dalam suatu sektor, yang keduanya dapat mengarah pada kemajuan produktivitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat penciptaan pekerjaan (Rukmana, Harto and Gunawan, 2021; Carina *et al.*, 2022).

Pendirian usaha baru yang berpotensi mendukung peningkatan kesempatan kerja:

- a. Mencapai efisiensi dengan bersaing untuk posisi pasar yang mapan di lingkungan di mana (berpotensi) pendatang baru mendorong perusahaan yang ada untuk menjadi lebih efisien;
- b. Percepatan pergeseran struktural yang terkait dengan teori penghancuran kreatif, di mana perusahaan baru menggantikan perusahaan lama untuk membawa perubahan dalam industri;
- c. Peningkatan inovasi, seperti pembentukan pasar baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya; dan

- d. Pilihan barang dan jasa yang lebih luas karena fakta bahwa barang yang dipasok oleh pendatang baru mungkin berbeda dari yang ditawarkan oleh bisnis yang sudah mapan (Fritsch, 2008).

10.8 Ekosistem Kewirausahaan dalam mengembangkan kewirausahaan

Lingkungan wirausaha merupakan komponen yang mendukung berkembangnya usaha wirausaha yang pada gilirannya akan mempengaruhi perluasan ekonomi dan kesempatan kerja. Ini akan memberikan wawasan penting tentang kebijakan tentang bagaimana membantu pengembangan kewirausahaan dan, pada akhirnya, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tantangan bagi wirausahawan di luar lingkungan ekosistem kewirausahaan rendah, seperti lokasi terpencil dan kurangnya sumber daya, dapat diatasi oleh daerah pinggiran kota dengan memanfaatkan teknologi digital dan membangun ekosistem wirausaha jenisnya sendiri melalui pendekatan kolaboratif holistik yang menangani masalah terkait untuk keuangan, bakat, lingkungan sosial budaya, infrastruktur, pasar, dan kebijakan (Carina *et al.*, 2022; Cahyaningrum, Permana and Rukmana, 2023).

Kekuatan konsumen memiliki potensi untuk setidaknya sebagian mempengaruhi ekosistem kewirausahaan. Kekuatan ini dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk konsumen menilai layanan yang disediakan oleh pengusaha, potensi konsumsi (berdasarkan jumlah pelanggan lokal dan sementara), kemampuan konsumen (berdasarkan tingkat pendapatan), dan preferensi pelanggan untuk layanan yang disediakan oleh pengusaha. ekosistem bisnis (berdasarkan preferensi untuk inovasi, merek regional vs internasional, dan berbelanja di luar mal) (Rukmana and Sukanta, 2020; Sudirjo *et al.*, 2023).

Terdapat keterkaitan antara ekosistem wirausaha dan pengembangan usaha wirausaha dalam enam aspek, yaitu keuangan, kebijakan pemerintah, modal manusia, infrastruktur, penelitian, pengembangan, dan inovasi; kerangka regulasi; Namun, tidak ada hubungan antara kedua aspek tersebut dalam tiga aspek, yaitu budaya, pasar, dan layanan pendukung (Soegoto, 2017; Hutapea, 2023).

10.9 Kesimpulan

Anggota koperasi mungkin orang atau koperasi lain atau organisasi hukum, dan tujuan utama organisasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para konstituennya. Koperasi diakui sebagai jenis badan hukum yang berbeda. Koperasi seringkali dijalankan secara kolektif oleh semua anggota, dan semua anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap dan semua keputusan yang dibuat oleh koperasi. SHU, singkatan dari Sisa Hasil Usaha / "residual operating profit", adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada pembagian keuntungan koperasi, yang biasanya dihitung berdasarkan ekuitas. Mengingat peristiwa sebelumnya, kami menyadari adanya dua sistem ekonomi yang berbeda.

Kapitalisme dan sosialisme berada di ujung spektrum politik yang berlawanan. Ekonomi campuran adalah tahap pertumbuhan ekonomi berikutnya, yang mencoba mengintegrasikan dua sistem ekonomi ekstrem. Tidak mungkin memisahkan sejarah koperasi dari keterkaitan antara koperasi dan pertumbuhan sosialisme. Pada awal abad ke-19, upaya sukarela dari individu dengan kemampuan ekonomi yang terbatas menyebabkan keberhasilan koperasi. Selain itu, masalah kondisi sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis turut menyumbang keberhasilan koperasi. Setelah itu, mereka bersatu untuk membantu satu sama lain dan berkontribusi pada pertumbuhan kekayaan di masyarakat sekitar. Koperasi

Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Serba Usaha merupakan beberapa jenis koperasi yang terdapat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, D.K. *et al.* 2021. 'Peran Digitalisasi Koperasi Sebagai Pendongkrak UMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah Kota Surabaya', in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, pp. 151–158.
- Al Aidhi, A. *et al.* 2023. 'Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), pp. 118–134.
- AY Rukmana: 2017. *Analisis Pengaruh Pembelajaran di SMK dan Keahlian Kewirausahaan Terhadap Niat dan Sikap Kewirausahaan Siswa SMK Pelita Bandung*, *Doctoral dissertation, Tesis Program Magister Management Universitas Widyatama Bandung*. Available at: https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=6557731586851788273 (Accessed: 18 April 2021).
- Baswir, R. 2012. 'Koperasi indonesia'.
- Cahyaningrum, A.O., Permana, R.M. and Rukmana, A.Y. 2023. 'Regulatory Environmental Impact, Contract Law, Intellectual Property Rights, and Taxation of Entrepreneurial Activities in Bandung City', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 109–121.
- Carina, T. *et al.* 2022. *Percepatan Digitalisasi Umkm Dan Koperasi*. TOHAR MEDIA.
- Chadijah, S. *et al.* 2023. 'A Correlational Study of Gadget Used Towards Reading Interest', *Journal of English Culture, Language, Literature and Education*, 11(1), pp. 59–78.
- Cline, K.D. 2000. 'Defining the implementation problem: organizational management versus cooperation', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(3), pp. 551–572.

- Cornforth, C. 1995. 'Patterns of cooperative management: Beyond the degeneration thesis', *Economic and Industrial Democracy*, 16(4), pp. 487–523.
- Esteban, E. and Dinar, A. 2013. 'Cooperative management of groundwater resources in the presence of environmental externalities', *Environmental and Resource Economics*, 54, pp. 443–469.
- Faedlulloh, D. 2015. 'Modal sosial dalam gerakan koperasi', *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), pp. 1–20.
- Fkun, E. *et al.* 2023a. 'Entrepreneurial Ecosystem: Interaction between Government Policy, Funding and Networks (Study on Entrepreneurship in West Java)', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 77–88.
- Fkun, E. *et al.* 2023b. 'Entrepreneurial Ecosystem: Interaction between Government Policy, Funding and Networks (Study on Entrepreneurship in West Java)', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 77–88.
- Gunawan, H. 2021. 'PENGARUH IMPLEMENTASI DIGITAL MARKETING SEBAGAI ALTERNATIF STRATEGI PEMASARAN USAHA YANG EFEKTIF', *Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi)*, 2(2), pp. 27–38.
- Hakim, C. *et al.* 2023. 'The Influence of Entrepreneurship Intellectual Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 68–76.
- Harto, B. *et al.* 2022. 'Bibliometric Analysis of Transforming Leadership Education with Artificial Intelligence', in *1st Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS*. Sciendo, pp. 385–390. Available at: <https://doi.org/10.2478/9788366675827-067>.

- Harto, B., Rozak, A. and Rukmana, A.Y. 2021. 'Strategi Marketing Belah Doeren Melalui Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Dimediasi Brand Image', *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 7(1), pp. 67–74. Available at: <https://doi.org/10.38204/ATRABIS.V7I1.546>.
- Hutapea, B. 2023. 'BAB 5 BENTUK KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN', *Teori Komunikasi Pembelajaran*, p. 57.
- Masngudi, H. 1990. 'Penelitian tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia', *Jakarta: Badan Penelitian Perkembangan Koperasi* [Preprint].
- Rahardjo, M.D. 2011. 'Koperasi Sukses Indonesia', *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 1(1), pp. 1–20.
- Rukmana, A. and Sukanta, T. 2020. 'Analisis Strategi Bersaing dan Strategi Bertahan pada Industri Mikro dan Kecil Panganan Keripik Kemasan di Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat Tahun 2020 Ditengah Situasi Sulit Penyebaran Pandemi nCoV-19', *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 12(1), pp. 37–53. Available at: <https://doi.org/10.37151/jsma.v12i1.48>.
- Rukmana, A.Y. et al. 2021. 'Pengaruh Implementasi Digital Marketing Sebagai Alternatif Strategi Pemasaran Usaha Yang Efektif', 2.
- Rukmana, A.Y. 2023. 'Achieving Access to External Finance Among Indonesian Entrepreneurs Through Financial Literacy, Financial Inclusion, Availability of Collateral, and Government Policy: A Study on Large Industrial Entrepreneurs in West Java', *The ES Accounting And Finance*, 1(02), pp. 61–71.
- Rukmana, A.Y., Harto, B. and Gunawan, H. 2021. 'Analisis Analisis Urgensi Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship) dan Peranan Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Kewirausahaan', *JSMA (Jurnal*

- Sains Manajemen dan Akuntansi*), 13(1), pp. 8–23. Available at: <https://doi.org/10.37151/JSMA.V13I1.65>.
- Sitepu, C.F. and Hasyim, H. 2018. 'Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia', *Niagawan*, 7(2), pp. 59–68.
- Soegoto, I.H.E.S. 2017. *Tren kepemimpinan kewirausahaan dan manajemen inovatif di era bisnis modern*. Penerbit Andi.
- Sudirjo, F. *et al.* 2023. 'DURING THE COVID-19 PANDEMIC, SOUTH GARUT DEVELOPED A MARKETING PLAN FOR SANSEVIERIA ORNAMENTAL PLANTS', *Jurnal Ekonomi*, 12(02), pp. 1066–1075.
- Sugiarto, I. *et al.* 2023. 'Kesuksesan Wirausaha di Era Digital dari Perspektif Orientasi Kewirausahaan (Study Literature)', *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(02), pp. 81–96.
- Sulaiman, A.I., Masrukin, M. and Suswanto, B. 2020. 'Pemberdayaan Masyarakat Pesantren Dalam Kewirausahaan Dan Koperasi', in *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed*.
- Suryokumoro, H. and Ula, H. 2020. *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press.
- Thoharudin, M. 2017. 'Peranan Koperasi Mahasiswa Dalam Membentuk Mental Enterpreneurship Mahasiswa', *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 4(2), pp. 74–86.
- Wakil, A. *et al.* 2022. *Transformasi Digital Dalam Dunia Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Warsiati, W., Sudartono, T. and Dewi, R. 2020. 'Peranan Koperasi Sebagai Bentuk Implementasi Ekonomi Pancasila Di Era Digital', *Empowerment in the Community*, 1(1), pp. 32–36.
- Yanto Rukmana, A., Harto, B. and Gunawan, H. 2021. *Analisis Urgensi Kewirausahaan Berbasis Teknologi (Technopreneurship) dan Peranan Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Kewirausahaan*, *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*).
- Zulhartati, S. 2010. 'Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia', *Guru Membangun*, 25(3).

Zulkifli, I.S.F.N.A.Y.R.P.H. 2023. 'Kesuksesan Wirausaha di Era Digital dari Perspektif Orientasi Kewirausahaan (Study Literature)', *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan* [Preprint]. Available at: <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sek/article/view/87> (Accessed: 28 February 2023).

BAB 11

EKONOMI KEPENDUDUKAN

Oleh Jeferson Tanesab

11.1 Pendahuluan

Suatu keadaan yang digambarkan dengan meningkatnya angka kelahiran secara drastis dalam suatu wilayah disebut sebagai Bonus Demografi. Keadaan ini tentunya memiliki dampak positif di masa yang akan datang, seperti peningkatan jumlah angkatan kerja yang produktif melebihi orang-orang yang sudah memasuki usia pensiun dalam suatu wilayah tertentu, yang apabila hal ini dapat dimanfaatkan dengan benar, maka Negara tersebut akan memiliki potensi pemberdayaan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Bonus demografi sendiri terjadi satu kali dalam sebuah Negara, jika tidak memanfaatkan potensi tersebut dengan baik, Negara bisa mendapatkan masalah yang lebih besar. Beberapa potensi yang dimiliki bonus demografi, antara lain: kenaikan nilai PDB (*Produk Domestik Bruto*) Negara. Karena dengan jumlah penduduk yang berada pada usia produktif melebihi jumlah penduduk usia non produktif dapat meningkatkan produktifitas dari suatu wilayah/Negara. Selain itu, peningkatan PDB bonus demografi juga dapat meringankan beban masyarakat. Hal ini diperkirakan mampu menjadi potensi agar Indonesia bisa menjadi Negara maju. Meskipun hanya perkiraan, terlepas menjadi Negara maju, bonus ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu demografi/Kependudukan memegang peran penting dalam pengembangan suatu daerah, di mana kependudukan merupakan dinamika kehidupan yang berkaitan dengan angka kelahiran, angka kematian, serta persentase

perpindahan penduduk hal ini sangat berkaitan erat dengan keadaan sosial, ekonomi, budaya maupun politik dari sebuah daerah.

11.2 Konsep Ekonomi Kependudukan

Konsep ekonomi kependudukan berasal dari ilmu demografi, oleh karena itu sebelum kita paham terkait dengan ekonomi kependudukan terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu demografi.

Pada tahun 1885 Achille Guillard menyampaikan pertama kali tentang kata demografi yang tertuang dalam bukunya yang berjudul "Element statistik manusia atau perbandingan kependudukan". Dalam buku tersebut menjelaskan tentang asal kata demografi. Demografi dari kata *demos* yang artinya penduduk dan *grafein* yang artinya gambaran. Jadi Demografi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan tentang angka kelahiran, angka kematian dan perpindahan penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Demografi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang suatu keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, seperti perubahan secara umum, fisik, peradaban, intelektualitas dan kondisi moral (Sonny Harmadi, 2008). Demografi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kuantitas, sirkulasi, wilayah dan tatanan penduduk, serta pergantian-pergantian dan alasan perubahannya, selalu muncul akibat adanya kelahiran, kematian dan migrasi dan perubahan sosial. Donald J. Bogue (1973) menyampaikan kependudukan sebagai ilmu yang membahas tentang data yang dihitung secara matematis terkait, tatanan, penyebaran penduduk dan besarnya serta pergantian-pergantian sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Pressat (1985) menyampaikan bahwa kependudukan adalah studi yang membahas tentang komunitas manusia dalam keterkaitannya dengan pergantian yang terjadi

akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Akan tetapi jauh dari pada itu Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) (1958) mengartikan bahwa kependudukan merupakan studi rasional terhadap masyarakat, teristimewa terhadap kuantitas, sistem dan rangkaian pengembangannya. Permasalahan demografi lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada kependudukan seperti kelahiran, kematian dan perpindahan (Sonny Harmadi, 2008).

Pengertian demografi di atas kita dapat menghubungkannya dengan ekonomi kependudukan dimana pengertian dari ekonomi kependudukan menurut Ananta, A,dkk, (1986) Ada dua aspek pengertian ekonomi kependudukan. *Pertama*, ekonomi kependudukan mengkaji hubungan antara ekonomi dan demografi. Artinya ilmu ekonomi dan demografi ini mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. *Kedua*, ekonomi kependudukan sebagai ilmu yang menganalisa dinamika penduduk dengan menggunakan metode penelitian seperti alat analisis ekonomi, pendekatan teori dan survei, sehingga mengetahui persentasi angka kelahiran, angka kematian dan persentase perpindahan penduduk (Djajanegara, 1986).

Berdasarkan pengertian diatas kita dapat memberikan kesimpulan bahwa ekonomi kependudukan ilmu pengetahuan yang membahas tentang fertilitas, mortalitas, migrasi.

11.3 Fertilitas

Fertilitas memiliki arti perkembangbiakan manusia terutama dilihat dari seorang wanita yang melahirkan seorang bayi yang hidup. Ketika manusia keluar dari rahim seorang wanita dengan membawa tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, jantung berdenyut, maka hal tersebut dianggap sebagai lahir hidup. Dan jika manusia yang keluar dari rahim tidak menunjukkan tanda-tanda yang disebutkan di

atas, maka akan dianggap sebagai lahir mati. Berdasarkan hal tersebut, maka fertilitas akan membahas dan mempelajari tentang kuantitas bayi yang mengalami keadaan lahir hidup.

Rancangan yang telah dipikirkan perlu diasosiasikan berkaitan dengan fertilitas sebagai berikut :

1. Lahir hidup (*live Birth*) artinya bayi yang baru lahir dan menunjukkan adanya kehidupan seperti bernafas dan bergerak.
2. Lahir Mati (*Still Birt*) artinya bayi yang baru lahir dan tidak menunjukkan adanya gerakan dari kandungan yang berumur kurang lebih 28 minggu.
3. Abortus artinya kematian bayi yang belum waktunya yang dibuat secara sengaja atau pun tidak sengaja (keguguran).
4. Masa Reproduksi (*Chilbearing age*) artinya masa dimana wanita mampu menghasilkan keturunan atau melahirkan bayi, disebut juga usia subur (15-49) tahun (Lucky Radita Alma, S.KM., 2019).

Selain konsep-konsep diatas adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas sebagai berikut :

Pertama, dilihat dari sapek-aspek yang mengontrol peluang kemungkinan hubungan kelamin pada usia reproduksi sebagai berikut:

1. Umur yang aman untuk melakukan hubungan intim.
2. perempuan yang jarang melakukan hubungan intim.
3. Perceraian, perpisahan, atau tinggal pergi oleh suami atau suami meninggal dunia.
4. Abstinensi sukarela.
5. impotensi, sakit, berpisah sementara yang tidak bisa dihindari.
6. Jarang melakukan hubungan intim.

Kedua, aspek-aspek yang mengontrol kemungkinan terjadinya kehamilan sebagai berikut:

1. Kesuburan dan kemandulan biologis (fekunditas dan infekunditas) yang disengaja.
2. Ketika berhubungan intim menggunakan alat pencegah kehamilan (Spiral)
3. Kesepakatan antara suami dan istri untuk melakukan sterilisasi.

Ketiga, aspek-aspek yang perlu diwaspadai oleh seorang wanita selama kehamilan dan kelahiran sebagai berikut:

1. Kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja.
2. Kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja.

Ketiga aspek tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang bersifat positif maupun negatif mengenai angka fertilitas, yang akan sangat bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dari suatu kelompok masyarakat tertentu (Marhaeni, 2018).

11.4 Mortalitas

Salah satu komponen utama dalam mempelajari proses demografi (kependudukan) dalam suatu wilayah adalah Mortalitas (kematian). Hal ini menjadi penting untuk diketahui karena akan sangat mempengaruhi struktur penduduk dalam suatu wilayah. Mortalitas akan dicatat dan dihitung berdasarkan jumlah manusia yang mengalami peristiwa hilangnya semua tanda-tanda vital kehidupan secara permanen, yang dimana hal ini juga dapat terjadi setiap saat, setelah kelahiran hidup (Alfana and Iffani, 2015).

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dan *World Health Organization* (WHO) mortalitas adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat

setelah kelahiran hidup. Naik turunnya mortalitas di tiap wilayah tidak sama, tergantung pada berbagai macam faktor keadaan (umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial ekonomi serta keadaan lingkungan tempat tinggal). Naik turunnya mortalitas pada suatu wilayah juga dapat menunjukkan tingkat kesehatan atau tingkat kesejahteraan penduduk.

Konsep-konsep yang terkait dengan mortalitas ialah

- a. *Neo-natal* death adalah seorang bayi yang kehilangan nyawanya sebelum berumur satu bulan.
- b. Lahir mati (*still birth*) atau kematian janin (*fatal death*) adalah seorang bayi yang kehilangan nyawanya tanpa melihat lamanya dalam kandungan.
- c. *Post neo-natal* adalah seorang anak yang kehilangan nyawanya setelah berumur antara satu bulan atau kurang satu dari satu tahun.
- d. *Infant death* (Kematian bayi) adalah seorang anak yang kehilangan nyawanya sebelum satu tahun (Alfana and Iffani, 2015).

Konsep mortalitas perlu diketahui dengan baik guna mendapatkan informasi dan data mortalitas yang benar. Apabila pengertian mortalitas tidak di ketahui dengan baik, maka dikhawatirkan dapat mengakibatkan salah penapsiran antara berbagai orang tentang kapan seseorang disebut mati. Indikator kematian berguna untuk memantau kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsep mortalitas terdapat hal-hal (faktor) yang menjadi pendorong dan hal-hal yang menjadi penghambat mortalitas yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya mortalitas/promortalitas
 - a. terjadinya penyakit menular (wabah penyakit).

- b. Terjadinya Gempa Bumi, longsor (bencana alam) .
 - c. Gizi buruk.
 - d. Terjadinya peperangan, kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
 - e. Lingkungan tidak sehat.
 - f. Keadaan persediaan pangan.
 - g. Keadaan fasilitas fisik
2. Faktor penghambat terjadinya mortalitas/antimortalitas
- a. Pendapatn ekonomi masyarakat yang baik.
 - b. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga.
 - c. Terjadinya kemajuan IPTEK di bidang kedokteran sehingga kesehatan terjamin.
 - d. Negara dalam keadaan aman tidak terjadi konflik.
 - e. Adanya kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai macam penyakit dapat terobati.
 - f. Idustrialisasi.
 - g. Pertanian dengan teknologi maju.
 - h. Membaiknya jaringan transportasi.
 - i. Sanitasi yang baik dan maju (Suwito, 2020).

Beberapa cara untuk mengetahui data mortalitas antara lain : a) Sistem registrasi vital artinya bahwa system pencatatan yang dilakukan secara langsung oleh petugas terhadap kematian seseorang dan dilaporkan kepada pemerintah setempat. b) Sensus dan survei penduduk artinya bahwa, pendataan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui data penduduk dan juga angka kematian yang terjadi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. c) Penelitian artinya bahwa, pendataan ini dilakukan untuk mengetahui angka kelahiran dan kematian secara bersamaan. d) Perkiraan (estimasi) artinya bahwa, pendataan yang dilakukan berdasarkan perkiraan dari waktu ke waktu pendataan semacam

ini bisa saja terjadi kesalah atau tidak mendapatkan data yang valid (Alfana and Iffani, 2015).

11.5 Migrasi

Dalam keadaan tertentu, manusia akan melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah yang lain dengan tujuan menetap sebagai upayanya dalam memperthankan kehidupannya. Hal tersebut sebagai Migrasi. Migrasi merupakan salah satu variabel penting demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah tertentu. Migrasi sering dimaknai sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu tempat ke tempat yang lain. Orang yang melakukan migrasi disebut *migran* (Suwito, 2020)

Migrasi terjadi karena ada beberapa hal seperti di bawah ini:

- a. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor (Bencana Alam)
- b. Agama
- c. Politik
- d. Ketersediaan sumber daya
- e. Lapangan kerja
- f. Sarana pendidikan
- g. kestabilan keamanan
- h. Tempat kerja
- i. Kebijakan pemerintah
- j. Faktor social
- k. Kepadadatan penduduk.
- l. Keinginan untuk menaikan taraf hidup
- m. Kondisi geografia yang tidak sesuai

Migrasi dapat dibagi menjadi dua, yakni migrasi nasional dan migrasi internasional :

1. Migrasi Nasional

Migrasi nasional merupakan mobilitas masyarakat dari desa ke kota atau kota ke desa tetapi masih dalam suatu Negara. Migrasi nasional dapat dibagi menjadi dua, yakni urbanisasi dan tranmigrasi.

a. Urbanisasi

Perpindahan masyarakat dari desa ke kota disebut urbanisasi. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota disebabkan oleh beberapa factor : factor penarik dan pendorong:

Faktor penarik antara lain :

- a) Ketersediaan lapangan pekerjaan.
- b) Upah buruh di kota lebih baik.
- c) Terdapatnya sarana dan prasaran dikota yang lebih baik.
- d) Kepengurusan data penduduk di kota lebih mudah dan cepat.
- e) Perputaran ekonomi di kota lebih cepat.
- f) Sarana pendidikan di kota lebih banyak khususnya pendidikan tinggi.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Ketersediaan lapangan pekerjaan yang berkurang di desa.
- b) Mencari pekerjaan di
- c) Pendapatan buruh rendah.
- d) Ketersediaan sarana dan prasaran yang tidak memadai.
- e) Memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.

Dengan adanya perpindahan masyarakat dari desa ke kota mengakibatkan adanya dampak positif dan negatifnya yaitu sebagai berikut :

Dampak Positif:

- a) Kepadatan penduduk di desa berkurang.
- b) Pengangguran di desa berkurang.
- c) Tenaga kerja di kota bertambah sehingga memperlancar pembangunan di kota.
- d) Meningkatkan kesejahteraan bersama keluarga di desa.
- e) Terjadinya transfer ilmu pengetahuan ke desa

Dampak negatif:

- a) Sumber daya manusia yang produktif di desa berkurang.
- b) Kurangnya tenaga produktif di desa.
- c) Meningkatnya pertumbuhan masyarakat di kota sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk
- d) Terdapat rumah-rumah yang kumuh.
- e) Pengangguran, Kemiskinan dan kejahatan merajalela.
- f) Kekurangan air bersih.

b. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk yang sudah padat ke wilayah yang penduduknya kurang. Maksud dengan adanya transmigrasi adalah:

- a) Peningkatan kesejahteraan penduduk.
- b) Peningkatan pengembangan daerah.
- c) Memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa.
- d) Peningkatan toleransi antar umat agama

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transmigrasi, antara lain:

- a) Berkumpulnya masyarakat di suatu wilayah dan terjadi kepadatan yang tinggi.
- b) Terdapat pendapatan masyarakat yang rendah.
- c) Terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi (bencana alam) (Ilahiah, 2023).

c. Migrasi Internasional

Migrasi internasional merupakan mobilitas penduduk antarnegara. Migrasi internasional dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Imigrasi
Imigrasi merupakan mobilitas penduduk dari luar negeri ke dalam negeri, orang yang biasa melakukannya disebut imigran.
- b) Emigrasi
Emigrasi adalah tindakan meninggalkan Negara asal untuk menetap di Negara lain.
- c) Remigrasi
Remigrasi adalah tindakan kembali ke negara asalnya.

Adapun istilah lain dari migrasi seperti di bawah ini :

1. Ruralisasi
Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap.
2. Evakuasi
Evakuasi merupakan perpindahan penduduk yang membutuhkan persiapan alasan dan tujuan. Contohnya korban banjir, tsunami dan tanah longsor. evakuasi ini dapat dikategorikan sebagai evakuasi internasional maupun evakuasi nasional.

3. Forensen

Forensen artinya seorang yang bekerja di kota tetapi selalu pulang pergi ke daerah asalnya (tempat tinggal).

5. Turisme

Turis ialah orang yang berpegian keluar untuk mengunjungi daerah-daerah wisata di daerah atau Negara yang dituju dengan tujuan untuk liburan. (Ilahiah, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, M.A.F. and Iffani, W.A.N.P.H. dan M. 2015. 'Mortalitas di Indonesia (Sejarah Masa Lalu dan Proyeksi ke Depan)'. Available at: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Full Paper_PITIGIXVIII2015_Muhammad Arif Fahrudin Alfana.pdf.
- Djajanegara, A.A.S.O. 1986. *Mutu modal manusia suatu pemikiran mengenai kualitas penduduk*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ilahiah, Y.C.S. 2023. 'Migrasi Adalah: Pengertian, Penyebab, dan Macam-Macamnya'. gramedia bolg. Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/migrasi-adalah/>.
- Lucky Radita Alma, S.KM., M.P. 2019. *Ilmu Kependudukan*. Malang: Wineka Media.
- Marhaeni, A. 2018. *Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar: CV. Sastra Utama.
- Sonny Harmadi. 2008. *Pengantar Demografi, Analisis data Demografi*. Tangerang.
- Suwito. 2020. *Pengantar Demografi*. Malang: Ediide Infografika. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

BAB 12

EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN

Oleh Delila Anggelina Nahak Seran

12.1 Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mempercepat pertumbuhan ekonominya untuk membuat masyarakat lebih sejahtera sekarang dan di masa depan. Salah satu upaya untuk mempertahankan pertumbuhan adalah melalui proyek-proyek pemerintah yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di negara ini. Persiapan proyek bukan hanya perencanaan atau konstruksi. Identifikasi tujuan pembangunan, pemilihan sumber daya utama, perencanaan kebijakan dan dukungan sumber daya merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapat perhatian yang khusus.

Pembangunan pada hakekatnya sebagai upaya terjadinya interaksi antara semua sumber daya alam dan manusia (Poerwanto, 2005). Pembangunan dianggap berhasil bila bangunan fisiknya direncanakan, sebaliknya isi pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain yang bertujuan untuk kehidupan manusia yang lebih baik sering diabaikan.

Diyakini bahwa agar pertumbuhan ekonomi dapat secara langsung meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan sosial, sedangkan pembangunan sosial secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan di bidang sosial sebagai upaya perbaikan pembangunan tradisional masyarakat yang berfokus pada pertumbuhan dan tanpa memperhatikan aspek sosial masyarakat ke depan (Wirutomo, 2013). Oleh karena

pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia, diperlukan adanya evaluasi proyek pembangunan ini.

22.2. KONSEP EVALUASI PROYEK

Evaluasi merupakan penggunaan suatu program dengan cara mengukur dampaknya pada pencapaian tujuan, guna memberikan informasi mengenai keberhasilan program tersebut dan bagaimana dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan (Casely & Kumar, 1991) yaitu penilaian kesesuaian, pencapaian, efektivitas dan pengaruh dari proyek terhadap tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam kegiatan evaluasi, akan melibatkan informasi dari luar proyek, dari waktu ke waktu, wilayah atau populasi yang akan dijadikan sebagai perbandingan. Tujuan dari kegiatan ini untuk melakukan penilaian terhadap proyek yang terlaksana dan sejauh mana efeknya dari proyek tersebut, dan tujuan lainnya adalah untuk melakukan perbandingan ekonomi yang digunakan dalam proyek terhadap kemungkinan alternatif (Bamberger & Hewitt, 1986).

Proyek adalah kegiatan yang harus direncanakan terlebih dahulu dan membutuhkan sumber daya penuh dalam hal biaya, tenaga kerja, bahan dan peralatan. Desain harus detail dan tidak boleh diulang. Proyek biasanya memiliki tenggat waktu, yang berarti proyek harus selesai sebelum atau tepat waktu.

Evaluasi proyek, atau studi kelayakan proyek (studi kelayakan dalam proyek bisnis), adalah evaluasi terhadap proyek yang diusulkan apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Tujuannya agar dapat di ketahui keberhasilan pelaksanaan proyek, untuk menghindari investasi modal yang berlebihan dalam kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Dengan demikian, evaluasi proyek adalah analisis terhadap tingkat keberhasilan investasi proyek tersebut (Kuntjoro, 2002).

Gray, dkk. (1992) menyimpulkan tujuan dan manfaat dari analisis proyek sebagai berikut

1. Berinventasi dalam proyek untuk mengetahui laba yang akan diperoleh
2. Hindari pemborosan sumber daya.
3. Melakukan penilaian akan adanya peluang investasi sehingga alternatif proyek yang paling layak dapat dipilih.
4. Penentuan prioritas investasi dan pilihan alternatif proyek yang paling menguntungkan.

12.3 Evaluasi Proyek Pembangunan

Pada prinsipnya, Setiap negara, termasuk negara yang sedang berkembang, memiliki rencana nasional yang terstruktur dengan baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan sosial. Proyek memberikan peluang penting untuk menguraikan dan mengimplementasikan investasi yang direncanakan dan pengeluaran pembangunan lainnya. Perencanaan pembangunan dan proyek saling membutuhkan dimana keduanya akan saling mempengaruhi.

Rencana yang efektif bergantung pada ketersediaan berbagai informasi tentang potensi investasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat. Evaluasi proyek memberikan informasi ini, sehingga proyek yang dipilih untuk dilaksanakan dapat menjadi metode untuk menggunakan sumber daya yang langka demi mencapai keuntungan bersih yang optimal, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil evaluasi dalam model pembangunan negara saat ini telah diupayakan untuk menempatkan rakyat sebagai pusat.

Melaksanakan sebuah proyek, tidak cukup hanya berpikir bahwa proyek tersebut menguntungkan, diperlukan juga informasi dan analisis yang komprehensif untuk membuat

keputusan keuangan dan jangka panjang. Hampir selalu, setiap proyek yang akan dibangun, dikembangkan, dan diperluas saat ini membutuhkan penilaian proyek sebagai tahap awal. Bahkan, di beberapa kementerian/lembaga, penilaian proyek atau studi kelayakan harus dilampirkan pada proposal proyek. Kesalahan dan kekeliruan dalam penilaian investasi proyek menimbulkan kerugian dan resiko yang sangat besar. Proyek biasanya memiliki tenggat waktu, yang berarti proyek harus selesai sebelum atau tepat waktu.

Pemborosan merupakan faktor yang harus dihilangkan dalam dunia pembangunan. Karena selain tidak bernilainya proyek, pemborosan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan proyek. Meskipun kekurangan tersebut tidak dapat dilihat secara nyata, namun jika terjadi secara kuat dan terus menerus maka kekurangan tersebut dapat menumpuk dan dampaknya akan terlihat pada akhir proyek. Misalnya keterlambatan pelaksanaan proyek dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan dan penambahan biaya anggaran dibandingkan dengan yang direncanakan semula (Untu, 2014). Tergantung pada kapan evaluasi proyek dilakukan, empat jenis evaluasi dapat dibedakan :

1. Evaluasi usulan proyek yang sedang berlangsung (*pre-project evaluation*);
2. Melakukan evaluasi terhadap proyek yang sedang berlangsung (*on-construction project evaluation*);
3. Melakukan penilaian terhadap proyek yang dijalankan (*on-going project evaluation*).
4. Melakukan kegiatan evaluasi proyek yang sudah berakhir untuk melihat kendala dan melakukan antisipasi terhadap kegiatan selanjutnya (*post-project evaluation study*).

12.3.1 Aspek Dalam Evaluasi Proyek Pembangunan.

Beberapa aspek yang perlu di perhatikan sebelum melakukan evaluasi proyek sebagai berikut :

1. Ruang lingkup, yaitu di area mana proyek tersebut aktif
2. Bagaimana proyek dilaksanakan, yaitu apakah proyek tersebut dikelola sendiri atau oleh pihak lain?
3. Evaluasi unsur - unsur yang menentukan keseluruhan proyek dengan mencari faktor kunci untuk keberhasilan proyek.
4. Fasilitas yang dibutuhkan tidak hanya mencakup bahan, tenaga kerja, dll., Tetapi juga layanan pendukung seperti jalan, transportasi, dll.
5. Capaian kegiatan proyek dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut.
6. Konsekuensi, berguna atau tidak, keberadaan proyek.
7. Rencanakan tahapan untuk menyiapkan proyek dan jadwal untuk setiap proses tersebut.

12.4 Aspek – Aspek Persiapan Dan Tahapan Evaluasi Proyek Pembangunan.

12.4.1 Persiapan Evaluasi Proyek.

Agar perencanaan dan evaluasi menjadi efektif dan efisien, pemangku kepentingan dan akuntabilitas harus mempertimbangkan banyak faktor yang menentukan hasil yang akan dicapai. Aspek-aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. 6 (enam) aspek yang perlu diperhatikan menurut Gittinger (1986):

1. Aspek teknis, Dengan persediaan bahan dan peralatan serta jasa yang digunakan dan diproduksi. Analisis hubungan antara hubungan dalam proyek yang diusulkan. Misalnya, dalam kasus proyek pertanian, karakteristik lahan dan pengembangan pertanian di wilayah proyek; ketersediaan air (curah hujan dan tidak tercemar) dan kemampuan untuk

meningkatkan pasokan air; aneka benih untuk tanaman dan ternak; peningkatan produksi; Peluang dan minat dalam teknologi. Analisis bisnis juga akan melihat produk dan fasilitas penyimpanan serta proses kerja yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan proyek.

2. Aspek Institusional – Organisasi – Manajerial, adalah aspek yang terkait dengan keserasian proyek dengan pola sosial budaya masyarakat di wilayah tersebut. Apakah proyek telah mempertimbangkan dampaknya terhadap petani yang telah terbiasa dengan cara kerja yang lama? Jika ya, langkah apa yang telah diambil untuk membantu mereka bertransisi ke model baru? Sistem komunikasi apa yang ada untuk memberi petani informasi baru dan keterampilan baru? Selain itu, proyek harus disesuaikan dengan struktur kelembagaan daerah yang ada untuk pelaksanaannya. Struktur organisasi proyek sesuai dengan prosedur organisasi lokal; dan didukung oleh keahlian staf saat ini yang mampu memimpin proyek.
3. Aspek Sosial, dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh input dan output yang ingin dicapai dalam proyek, seperti distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
4. Aspek Komersial, yaitu ini terkait dengan rencana bisnis untuk manfaat yang diciptakan oleh proyek dan rencana untuk menghasilkan manfaat yang diperlukan untuk kelanjutan dan pelaksanaan proyek. Saat memasarkan suatu produk, penting untuk mempertimbangkan di mana produk tersebut dijual. Apakah toko cukup besar untuk menampung produksi proyek? Bagaimana pangsa pasar produk Anda? Apakah Anda memiliki perusahaan yang dapat memasok produk dari kapasitas yang diperlukan? Bagaimana dengan produsen input keuangan dan pembeli input?
5. Aspek Finansial, yaitu tentang dampak keuangan proyek terhadap peserta yang terlibat atau terlibat dalam proyek.

- Selain itu, pertanyaan manajemen proyek, seperti berapa dana investasi yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan? Bagaimana cara menanggulangi jika jika Anggaran kerja proyek mendapat masalah? Anggaran Proyek Apakah memiliki Pangu anggaran yang dapat mengcover biaya administrasi?
6. Aspek Ekonomi, dalam kaitannya dengan kontribusi proyek terhadap pembangunan ekonomi dan pengaruhnya terhadap penentuan penyebaran sumber daya yang dibutuhkan. Perspektif analisis ekonomi ini adalah masyarakat secara keseluruhan.

12.4.2 Langkah-Langkah Penilaian Proyek

Evaluasi Proyek dibagi menjadi beberapa tahap:

1. Melakukan pencarian ide, untuk mencari kebutuhan pasar dan jenis produk yang dibutuhkan. Sering muncul lebih dari satu ide oleh pembuat keputusan dan biasanya dipengaruhi oleh tiga faktor: 1) daya berpikir bisnis; 2) Memahami aspek teknis proyek; 3) keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh dari kegiatan proyek.
2. Kegiatan penelitian; artinya, studi tentang banyak profesi alternatif menggunakan ilmu dan teknologi yang berbeda. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data sesuai dengan prosedur yang relevan, dan berhasil menganalisis dan menginterpretasikan data menggunakan alat analisis yang tepat. Hasil survei telah diperbaiki.
3. Tahap Evaluasi awal dan kelayakan proyek, membandingkan sesuatu berdasarkan satu atau lebih kriteria, yang mana kriteria tersebut dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Saat mengevaluasi kelayakan suatu proyek, orang biasanya membandingkan keuntungan dan semua biaya yang dikeluarkan.
4. Tahap Penentuan Usulan yang Layak. Jika terdapat lebih dari satu proposal rencana proyek yang dianggap layak dan

jika manajemen memiliki keterbatasan dalam melaksanakan proyek tersebut, manajemen dapat memprioritaskan proposal yang layak berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan.

5. Tahap Rencana Pelaksanaan. Setelah memutuskan rencana proyek mana yang akan dilaksanakan, rencana kerja harus dibuat untuk melaksanakan pengembangan (konstruksi) proyek; mulai menentukan model pekerjaan, waktu dibutuhkan; Jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana; tersedianya keuangan dan sumber daya lainnya; kualitas kepemimpinan dll.
6. Tahap Pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan konstruksi proyek. Ketika proyek selesai, proyek sedang berjalan. Operasi ini pun membutuhkan studi untuk menilai fungsionalitas proyek. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik bagi perusahaan agar proyek dapat selalu dipantau secara terus menerus.

12.5 Lembaga yang membutuhkan Evaluasi Proyek

Dalam pelaksanaan suatu proyek, wajar terjadi kegagalan proyek yang dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak yaitu investor, penyedia jasa (pemodal) dan pemerintah. Dimana Lembaga-lembaga ini sangat membutuhkan evaluasi proyek.

1. Investor dan mitra bisnis potensial: memperhatikan prospek usaha yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat risiko investasi. Secara umum, apabila pengembalian meningkat maka makin tinggi risiko proyek.
2. Pemodal (bank kreditur, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, penjamin bursa, lembaga kredit ekspor untuk barang modal dan lembaga keuangan yang dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyek): memperhatikan keamanan dana yang terkumpul, pembayaran bunga dan

- modal hutang dapat dibayar tepat waktu. Oleh sebab itu, aliran uang selama periode pinjaman sangat diperhatikan.
3. Pemerintah: yang tertarik dengan manfaat ekonomi atau efek dari proyek serta efeknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, 2003. Manajemen Proyek. Guna Widya. Jakarta
- Casely, D. J., & Kumar, K. 1991. Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pertanian. Jakarta: UI Press.
- Cernea, M. M. 1988. Mengutamakan Manusia Dalam pembangunan, Variabel- variabel Sosiologi dalam Pembangunan. Jakarta: UI-Presss.
- Ervianto, W. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi. Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- Gray, *et al.* 1992. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kadariah. 1988. Evaluasi Proyek: Analisis Ekonomis Jilid Dua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mangkoesoebroto, G. 1999. Ekonomi Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Nurhayati, 2010. Manajemen Proyek. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Pudjosumanthro, muljadi. 1995. Evaluasi Proyek. Yogyakarta: Jakarta
- Squire, L and Herman G. Van Der Tak. 1975. Analisis Ekonomi Proyek- proyek Pembangunan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeharto, Iman. 1992. Manajemen Proyek Industri: Persiapan, Pelaksanaan, Pengelolaan. Erlangga.

BAB 13

KEBANK SENTRALAN

Oleh Muhammad Yusuf

13.1 Pendahuluan

Bank merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di bidang keuangan, keuangan dan perbankan. Bank Indonesia didirikan untuk tujuan sosial ekonomi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, bank dalam sistem perbankan tidak dapat berfungsi tanpa koordinator dan pengawas yang tidak memihak. Lakukan pekerjaan Anda secara efisien. Peran Bank Indonesia dalam mandat intinya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi operasional perbankan, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran.

13.2 Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang memantau dan memanipulasi jumlah uang yang beredar untuk tujuan komersial, preventif, dan spekulatif agar roda perekonomian tetap berputar. Oleh karena itu, bank sentral umumnya memiliki dua peran. Sebagai komponen otoritas moneter yang berwenang melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengawasi, dan mengelola sistem moneter yang ada.

Nomor resmi berdasarkan perusahaan atau negara. Mengatur dan mengawasi operasi dan bertindak sebagai lender of last resort. Bank sentral memiliki kewenangan (authority) untuk

melaksanakan kebijakan moneter negara. Bagi negara seperti Indonesia, bank sentral merupakan simbol mata uang dan kedaulatan ekonomi, dan keberadaannya mutlak diperlukan. Dalam perkembangannya, setelah Indonesia merdeka, Bank Indonesia sendiri lahir sebagai bank dan didirikan pusat baru pada tahun 1953.

13.2.1 Sejarah Bank Sentral

Bank Indonesia didirikan sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953, delapan tahun setelah pengumumannya. Pendirian Bank Indonesia didasarkan pada konstitusi atau undang-undang. Bank Indonesia muncul sebagai akibat dari nasionalisasi Bank Javashe Belanda, yang digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda pada masa kolonial. Sejarah Bank Javashe menyebabkan lahirnya Bank Indonesia. Dejabachet Bank didirikan pada tahun 1828 dan dilihat dari sejarahnya sebagai bank komersial dan niaga berusia 172 tahun. Selanjutnya pada tahun 1949, berdasarkan hasil rapat Meja Bundar, Bank Java diangkat sebagai bank sentral. Namun, Javashe Bank melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank sentral pada saat itu. Pada tahun 1953, Bank Java dinasionalisasi dan menjadi Bank Indonesia, juga dikenal sebagai Bank Sentral.

Bank komersial telah menciptakan tren mata uang yang tidak sehat untuk pembangunan ekonomi. Akhirnya, pada tahun 1968, UU n. Pasal 13 Bank Sentral 1968 mengubah peran Bank Indonesia lagi, secara resmi memposisikannya sebagai Bank Sentral. Artinya, Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan usaha selain dari pelaksanaan tugas dan fungsinya.

13 Maret 1968 Sejauh ini sepertinya tidak terjadi apa-apa. Karena ada kondisi tertentu yang memungkinkan intervensi dari luar untuk membalikkan kebijakan yang diambil. Pada tanggal 17 Mei 1999, UU No.2 diganti dengan UU No.1999. Nomor 23 diumumkan. UU No. 13 Tahun 1968. Bank sentral bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak luar termasuk pemerintah.

Pada tanggal 30 Oktober 1946, Oyang Republik Indonesia (ORI) diluncurkan. Dengan diterbitkannya ORI ini, mata uang Jepang dan mata uang Belanda dinyatakan tidak berlaku. Pada tahun 1951 pemerintah bermaksud menasionalisasi DJB. Pada tanggal 19 Juni 1951, pemerintah membentuk Komisi Nasionalisasi DJB. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1951, UU No. Nasionalisasi ini dilakukan dengan membeli 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta gulden. Pada bulan September 1952, pemerintah mengajukan RUU Bank Dasar Indonesia (RUU) kepada DPR untuk dipertimbangkan. Pada tanggal 10 April 1953, DPR mengesahkan RUU Dasar Bank Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1953, Presiden Sukarno mengesahkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia (UU). Pada tanggal 1 Juli 1953, Undang-undang Pokok Bank Indonesia diundangkan, dan mulai tanggal 1 Juli 1953, Negara Indonesia mendirikan bank sentral dengan nama Bank Indonesia.

Visi Bank Indonesia adalah memaksimalkan nilai strategisnya dengan mencapai inflasi yang rendah dan stabil serta menjadi bank sentral terpercaya di dalam dan luar negeri.

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas rupiah dengan memelihara stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

13.2.2 Fungsi, Tugas dan Peran Bank Sentral

1. Fungsi

Jenis bank yang sangat penting dari segi fungsinya adalah bank sentral dalam fungsinya. Setiap negara bagian hanya memiliki satu bank sentral dengan cabang di hampir setiap negara bagian. Tugas utama bank sentral adalah mengelola keuangan negara secara komprehensif. Operasi bank sentral Indonesia dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia adalah satu-satunya bank di Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral. Pelaksanaan fungsi bank

sentral memegang peranan yang sangat penting dan penting dalam kehidupan perekonomian negara. Dampak tersebut terhadap kehidupan ekonomi negara berarti bahwa Bank Indonesia, sebagai bank sentral, harus menanggapi perubahan konstan yang terjadi dalam tatanan ekonomi. Dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar.

Dalam ekonomi pasar terbuka, kewajiban bank sentral mencakup dua bidang: sektor moneter dan sektor perbankan. Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar. Selain itu, Bank Indonesia juga bertugas melindungi dan menjaga nilai tukar. Sementara itu, di sektor perbankan, Bank Indonesia sebagai bank sentral wajib memberikan bimbingan dan pengawasan. Hal ini harus dicapai dengan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jika Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen, kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan meningkat. Independensi bank Indonesia merupakan faktor penting dan esensial bagi mata uang dan bank Indonesia.

2. Tugas Bank Sentral

- a. Mengatur, memelihara dan menjaga kestabilan nilai Rupiah;
- b. Mempromosikan fasilitasi produksi, pengembangan dan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Mencetak uang baru.
- d. menarik uang dari peredaran.
- e. Pengawasan terhadap bank lain, baik bank pemerintah maupun swasta.
- f. menciptakan daya beli baru dengan cara tertentu
- g. Membuat setoran penglihatan

3. Peran Bank Sentral

Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral antara lain mencetak dan mendistribusikan uang kertas, terutama surat penawaran (kertas dan logam). Bank Indonesia juga memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan uang. Tantangan berikutnya adalah mengontrol sirkulasi mata uang dan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai rupee. Selain itu, hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah memegang keuangan pemerintah. Demikian pula, Bank Indonesia bertanggung jawab atas hubungan keuangannya dengan masyarakat internasional, termasuk pinjaman dari luar negeri. Peran bank sentral bagi pemerintah adalah untuk:

- a) Sebagai bank penjualan
- b) Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan antara lain:
 - 1) Membuat peraturan, menerbitkan, menerbitkan dan memantau perizinan bagi lembaga perbankan dan kegiatan usaha dan, jika perlu, memberikan sanksi kepada bank umum.
 - 2) Pengelolaan giro antar bank dan lalu lintas klirin
 - 3) Menentukan tingkat dan struktur bunga diskonto
 - 4) Pembatasan kuantitatif dan kualitatif atau perjanjian kredit oleh bank: dan
 - 5) Memberikan dukungan pinjaman kredit likuiditas kepada bank umum.

13.3 Wewenang Bank Sentral

Sebagai bank sentral Indonesia, BI memiliki kewenangan khusus yang diatur oleh undang-undang Republik Indonesia.

1. Kewenangan Membuat Kebijakan Moneter
Bank Indonesia wajib menetapkan dan menetapkan suku bunga diskonto serta menetapkan kebijakan pembiayaan

dan kredit. Bank Indonesia juga harus dapat menetapkan dan menentukan target mata uang dengan menetapkan tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. BI juga memiliki kekuatan kontrol pertukaran yang sangat signifikan dengan tidak membatasi aktivitas pasar publik.

2. Kewenangan Mengatur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia memiliki tiga kekuatan utama. Pertama, BI memiliki kewenangan untuk menentukan dan menentukan penggunaan instrumen pembayaran. Kedua, mengesahkan dan mengesahkan pengoperasian sistem pembayaran. Terakhir, ia mengawal penerapan sistem pembayaran.

3. Kewenangan Mengatur dan Mengawasi Perbankan

Dan sebagai bank sentral, tentu saja, kami memiliki empat kekuatan utama. Pertama, memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia. Kedua, kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar politik ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, kewenangan pemberian atau pencabutan izin penyelenggaraan lembaga dan bank. Akhirnya, BI juga memiliki kekuatan untuk mengawasi berbagai kegiatan perbankan tradisional dalam sistem perbankan dan secara individual.

13.4 Kebijakan Moneter

Mengatasi laju inflasi, bank sentral menerapkan kebijakan moneter, termasuk

1. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Pasar bebas merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau melalui pembelian surat berharga di

pasar modal. Ketika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, ia menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dengan menjual SBI, uang masuk ke bank sentral, sehingga mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika bank sentral merasa bahwa jumlah uang yang beredar kurang dari yang dibutuhkan, ia mengembalikan SBI atau sekuritas lainnya di pasar modal. Membeli SBI atau saham akan mempercepat uang Anda

2. Kebijakan Diskonto

Kebijakan konsesi adalah kebijakan bank sentral yang mengatur aliran uang dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Bank-bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga ketika mereka ingin mengurangi jumlah uang beredar. Kenaikan suku bunga dapat mempengaruhi kesediaan orang untuk menabung. Sebaliknya, bank sentral memotong suku bunga ketika mereka ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Suku bunga bank yang rendah berarti masyarakat enggan menabung dan memindahkan tabungannya. Ini meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

3. Kebijakan Luran Tunai

Kebijakan rasio kas adalah kebijakan bank sentral yang memodifikasi cadangan minimum yang harus dimiliki bank. Jika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, itu akan mengurangi rasio likuiditas. Kebijakan ini berlaku ketika terjadi deflasi. Sebaliknya, bank sentral meningkatkan rasio likuiditas, cadangan devisa meningkat dan jumlah uang beredar berkurang. Kebijakan ini biasanya dibatalkan ketika ada inflasi.

13.5 Peran Bank Sentral Dalam Kestabilan Keuangan

Mandat lain dari bank sentral adalah untuk memantau kegiatan perdagangan luar negeri untuk menjaga stabilitas mata uang mereka sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank sentral untuk menjaga stabilitas keuangan adalah dengan menjaga nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing. Untuk melakukannya, pertama-tama kita harus menyeimbangkan impor dan ekspor. Ini juga harus menjaga cadangan devisa yang cukup untuk pembayaran mata uang asing.

Pembayaran adalah salah satu kegiatan utama dalam semua transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, transaksi berbayar, sistem, dan produk membutuhkan nilai dan risiko yang tinggi. Pembayaran cepat, lancar, dan aman. Sistem pembayaran yang sukses mendukung pengembangan sistem keuangan dan perbankan.

Di sisi lain, setiap gangguan atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak buruk pada stabilitas keuangan. Bank sentral memiliki batasan untuk menjaga stabilitas harga dalam nilai uang, yang dikenal sebagai stabilitas mata uang. Dalam praktiknya, tidak semua bank sentral memenuhi tiga pesanan utama ini. Beberapa bank sentral melakukan dua fungsi utama sementara yang lain hanya melakukan satu fungsi utama.

Meskipun kekuatan bank sentral bervariasi secara dinamis antar negara, ada konsensus global bahwa peran bank sentral bertindak sebagai stabilisator makroekonomi (Healy, 2001). Artinya, bahkan jika undang-undang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa bank sentral harus memastikan stabilitas keuangan, harus ada pemahaman implisit tentang peran bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 merupakan pedoman yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan visi dan misinya.

Keputusan misi dan visi dimaksudkan untuk lebih memperjelas tujuan organisasi, memfasilitasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memfasilitasi koordinasi antar komponen dalam organisasi. Visi ini telah dirumuskan sebagai bagian dari misi bank untuk Indonesia.

Misi Bank Indonesia adalah:

1. Menetapkan dan menjaga konsistensi dan kejelasan tujuan perusahaan
2. Memberikan referensi untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan
3. Memperoleh komitmen para anggota Dewan Gubernur dan seluruh pegawai melalui komunikasi yang jelas mengenai tugas organisasi; Dan
4. Mendapatkan dukungan dan pengertian dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas organisasi (Warjiyo, 2004).

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perannya, termasuk kebijakan dan instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, adalah untuk::

1. Bank Indonesia diberi mandat untuk menjaga stabilitas keuangan melalui produk suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia sendiri akan dapat menyesuaikan kebijakan moneter secara seimbang dan tepat. Ini mengingatkan pada hambatan stabilitas keuangan yang secara langsung mempengaruhi banyak aspek ekonomi. Menerapkan suku bunga yang terlalu keras terhadap kebijakan moneter akan membunuh sebagian besar ekonomi dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas mata uang, BI menerapkan kebijakan yang disebut inflation targeting framework.
2. Bank Indonesia sendiri memegang peranan penting atau important dalam menghasilkan kinerja yang baik di

lembaga keuangan, khususnya di sektor perbankan. Pembentukan lembaga kinerja perbankan dilakukan melalui mekanisme administrasi dan pengaturan. Seperti di negara mana pun, sektor perbankan adalah bagian penting dari sistem keuangan. Jadi kegagalan di wilayah tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah kepailitan tersebut, sistem manajemen dan kebijakan bank yang efektif harus dipertahankan.

Selain itu, disiplin pasar harus dijaga oleh regulator, pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum. Bukti menunjukkan bahwa negara-negara yang mempraktikkan disiplin pasar memiliki gagasan yang lebih baik tentang stabilitas ekonomi. Di sisi lain, upaya penegakan hukum dinilai tepat untuk melindungi bank dan kelompok kepentingan sekaligus membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas perbankan yang berkelanjutan, BI telah membuat arsitektur dan rencana implementasi untuk sektor perbankan Indonesia.

3. Bank Indonesia berwenang mengatur dan memelihara kelancaran fungsi sistem pembayaran. Dalam kasus kesalahan pembayaran oleh salah satu peserta dalam sistem pembayaran, itu membawa potensi risiko serius dan dapat mengganggu fungsi sistem pembayaran. Kegagalan ini menciptakan risiko penularan yang akhirnya mengarah pada penyakit sistemik.

Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan langkah-langkah untuk memitigasi risiko di dalam sistem pembayaran yang terus berubah. Secara khusus, keamanan dan kecepatan sistem pembayaran dapat lebih ditingkatkan dengan mengadopsi sistem pembayaran real-time yang disebut RTGS (Real-Time Gross Settlement) System. Sebagai otoritas sistem pembayaran, BI sendiri

- memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam sistem pembayaran.
4. Fungsi investigasi dan pengawasan Bank Indonesia diperlukan untuk memberikan akses informasi yang mengancam stabilitas keuangan. Bank Makroprudensial memungkinkan Indonesia untuk memantau kerentanan di sektor keuangan dan mengidentifikasi potensi guncangan yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Melalui riset ini, perbankan dapat mengembangkan alat dan indikator makroprudensial untuk mengungkap kerentanan di sektor keuangan Indonesia. Hasil penelitian dan pemantauan ini akan menjadi rekomendasi bagi otoritas yang berwenang dalam memilih langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi gangguan di sektor keuangan.
 5. Bank Indonesia memiliki fungsi bersih pengaman dalam sistem keuangan melalui peran peminjam pilihan terakhir bank sentral (LoLR). Fungsi LoLR yang sama adalah peran tradisional bank Indonesia sebagai bank sentral dalam manajemen krisis untuk menghindari ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Fungsinya sebagai LoLR adalah untuk menyediakan likuiditas dalam kondisi normal dan pada saat krisis. Karakteristik ini hanya diberikan kepada bank dengan masalah likuiditas dan konsekuensi dari krisis sistemik. Dalam keadaan normal, fitur LoLR dapat diterapkan pada bank dengan masalah likuiditas sementara, sehingga mereka dapat terus melakukan pembayaran. Untuk memenuhi fungsi LoLR, bank Indonesia perlu menghindari risiko etis. Oleh karena itu, untuk menyediakan likuiditas ini memerlukan pertimbangan risiko yang sistematis dan penerapan kondisi yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir.2002.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Prasetyo, Eko.2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset
- Tim Buku Media Indonesia, dkk.2010.*Era Baru Transformasi Bank Sentral*.:Gramedia Pustaka Utama
- Mangani, Silvanita Ktut.2009.*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*:Gelora Aksara Pratama
- dosenekonomi.com /ilmuekonomi/moneter/instrument-kebijakan-moneter*, diakses pada 7 November 2017
- dari www.bi.go.id/perbankan/ssk/peran-bi, diakses pada 6 November 217

BAB 14

KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Oleh Muhammad Hatta

14.1 Pendahuluan

Ada tiga pertanyaan penting yang terkait dengan konsep perencanaan pembangunan. Pertanyaan itu meliputi apa (*what*), mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*) perencanaan pembangunan? Pembahasan tentang pertanyaan —apa berkaitan dengan definisi perencanaan, definisi pembangunan, hubungan antara perencanaan dan pembangunan, konsep dasar perencanaan pembangunan, perbedaan antara perencanaan (*planning*), perencana (*planners*), dan rencana (*plan*). Sementara pertanyaan tentang —mengapa menguraikan alasan-alasan pentingnya perencanaan pembangunan. Pertanyaan tentang —bagaimana menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan secara teori dan perencanaan di era desentralisasi dan otonomi daerah.

14.2 Pengertian Perencanaan

Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yang sekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri. Berikut beberapa definisi perencanaan yang umum ditemukan:

Brobowski (Basic Problems of Planning, 1964):

Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara.

Waterston 1965

Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu

Conyers dan Hills (1984):

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

MT Todaro (Economic Development, 7th ed., 2000):

Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya

ML. Jhingan, 2000

Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.

Menurut UU 25/2004:

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Friedman (1987):

Perencanaan adalah aplikasi pengetahuan kedalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama.

14.3 Pengertian Pembangunan

1. Upaya yang dilakukan secara sadar
2. Untuk meningkatkan keadaan menjadi lebih baik
3. Melalui sebuah proses yang panjang
4. Dalam periode waktu tertentu

Ukuran pembangunan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Ukuran ekonomi adalah GNP/GDP atau GNP/GDP per kapita, sementara ukuran sosial adalah melihat aspek kesehatan dan pendidikan. Dengan mencermati ukuran pembangunan tersebut nampaknya terjadi perubahan cara pandang pengukuran pembangunan yakni dari indikator ekonomi ke indikator sosial. Atas dasar itu, maka pengertian pembangunan dapat dirumuskan sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Hubungan antara perencanaan dan pembangunan sangat kompleks. Kompleksitas dapat dilihat dari teori-teori perencanaan seperti teori perencanaan rasional komprehensif, incremental, advokasi, radikal, dan transaktif. Sementara kompleksitas pembangunan dapat dilihat dari perluasan makna/konsep pembangunan dan pergeseran paradigma pembangunan mulai

dari paradig modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan dan endogen. Karena kompleksitas perencanaan pembangunan maka perlu manajemen perencanaan pembangunan (Gambar 14.1).



Gambar 14.1. Hubungan Perencanaan dan Pembangunan

14.4 Konsep Dasar Perencanaan

Konsep dasar perencanaan diperoleh dari uraian tentang elemen-elemen dari perencanaan. Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya mengandung elemen-elemen yang sama pentingnya. Hal ini dapat dilihat dari kata kunci masing-masing definisi perencanaan dan sekaligus merupakan konsep-konsep perencanaan. Konsep dasar perencanaan meliputi:

1. Suatu proses, ini berarti rencana melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain, mengidentifikasi masalah dan

- mencari alternative untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan.
2. Pengalokasian sumber daya. Ini berarti perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya meliputi : sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Modal. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumberdaya tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah rencana. Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor penting kehadiran perencanaan agar pengalokasian sumber daya dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Agar pengalokasian sumber daya dilakukan secara tepat dan efisien maka pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Ketersediaan data dan informasi akan menjadi pedoman bagi perencana dalam pengambilan keputusan secara tepat.
 3. Alat mencapai tujuan (visi bersama), ini mengandung arti bahwa perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang terbentuk pasti ingin mencapai sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama dalam perspektif waktu yang lebih lama, katakanlah sebuah organisasi mempunyai impian (visi) yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Untuk mencapai impian tersebut, maka dibutuhkanlah perencanaan yang strategis. Perencanaan ini tidak saja berlaku untuk organisasi profit (swasta) tetapi terpenting juga untuk organisasi non profit misalnya organisasi pemerintah. Seperti sekarang ini yang umum dipraktekkan di Negara-negara berkembang terutama Indonesia, setiap organisasi pemerintah harus menyusun sebuah rencana strategis, dimana rencana strategis tersebut didalamnya menetapkan sebuah visi

bersama yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Akan tetapi seringkali ada permasalahan yang dihadapi oleh organisasi ketika mengimplementasikan rencana. Beberapa masalah yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan tersebut antara lain : (1) Tujuan tidak terdefiniskan dengan baik, (2) Tujuan tidak realistis, (3) Perencana cenderung mencapai lebih dari satu tujuan, dan kadang-kadang tujuan tersebut tidak konsisten satu sama lain, (4) Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan lain (mis. DPRD atau yang lainnya). Hal ini disebabkan oleh banyak faktor dan terutama karena tujuan rencana seringkali ditetapkan oleh pihak lain atau karena faktor politik yang dominan.

4. Merencanakan berarti memilih, ini berarti perencanaan merupakan proses untuk memilih:

(a) memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik, (b) memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut, (c) memilih berbagai program dan kegiatan yang prioritas karena tidak semua dapat diselesaikan secara bersamaan dan juga karena kendala sumberdaya keuangan. Oleh karena ini perencana harus memilih kegiatan mana yang paling prioritas dan perlu dibiayai lebih awal.

v) Masa depan, ini berarti bahwa dalam melakukan perencanaan harus mempertimbangkan waktu. Berapa lama sebuah rencana ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah perencanaan dilakukan untuk tujuan satu tahun, lima tahun atau dua puluh tahun. Dengan demikian, tujuan perencanaan ditetapkan untuk di masa yang akan datang. Implikasinya adalah bahwa perencanaan sangat berkaitan dengan:

- Proyeksi/prediksi
- Penjadwalan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi.

Dengan memperhatikan kata kunci atau konsep-konsep perencanaan secara umum, maka perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh komponen stakeholder melalui suatu proses yang bertahap dan sistematik untuk mencapai tujuan pembangunan dalam periode waktu tertentu. Jika konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui suatu proses yang sistematik dan bertahap untuk menuju kepada pencapaian visi bersama daerah dalam kurung waktu tertentu. Misalnya perencanaan pembangunan untuk waktu 20 tahun, perencanaan pembangunan jangka menengah (lima tahun), dan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahun).

Dalam mengaplikasikan konsep-konsep perencanaan di Indonesia, pertama-tama harus diklasifikasi perencanaan berdasarkan hirarki. Perencanaan berdasarkan hirarki dibagi atas dua yaitu perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan nasional (PPN) adalah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Kesatuan RI. PPN merupakan kewenangan pusat menyusun perencanaan makro bidang prioritas nasional baik yang bersifat lintas propinsi maupun masalah spesifik pada lokalitas. Dalam hal ini PPN terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan Perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sementara perencanaan pembangunan daerah (PPD) meliputi perencanaan provinsi dan perencanaan daerah. Perencanaan provinsi adalah menyusun perencanaan lintas kab/kota untuk mengatasi masalah kesenjangan antar kab/kota dan masalah khusus lokalitas di wilayahnya; sedangkan perencanaan daerah adalah menyusun

perencanaan berdasarkan kewenangannya dan menjabarkan syarat-syarat perencanaan yang dirumuskan Pusat maupun Daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan sesuai dengan Undang- Undang Otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004).

PPN dan PPD merupakan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. PPN merupakan payung perencanaan yakni memberikan arah (pedoman) yang diikuti oleh daerah dalam menentukan visi daerah yang menuju kepada kesejahteraan rakyat. Arah perencanaannya bersifat Top-Down. Pada sisi lain PPD adalah berkaitan dengan kontribusi apa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional. Dengan demikian, arah perencanaannya adalah bersifat bottom-up. Oleh karena karakteristik daerah adalah heterogen, maka perencanaan pembangunan daerah tidak mesti mengikuti seluruh arahan perencanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai ruang tersendiri dalam merumuskan perencanaan secara tepat sesuai dengan kondisi riil daerah atau nilai-nilai lokal daerah itu sendiri. Atas dasar itu kalau konsep ini diilustrasikan dalam bentuk diagram ven, maka wujud keterkaitan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat ditunjukkan pada wilayah interseksi dalam dua diagram ven seperti pada gambar 2 (c) berikut ini. Semakin besar wilayah interseksinya maka semakin besar unsur sinergitas perencanaan daerah dan nasional. Namun tidak berarti bahwa wilayah diluar interseksi tidak mempunyai sumbangan terhadap pembangunan nasional. Wilayah di luar interseksi dapat diartikan sebagai wilayah perencanaan daerah berbasis karakteristik lokal yang bukan menjadi wilayah tanggungjawab penuh bagi pemerintah daerah, namun dapat berkontribusi terhadap pembangunan secara keseluruhan melalui keberhasilan pembangunan daerah. Gambar 14.2 (a) menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain bahwa

segala sesuatu yang dipandang penting dan prioritas oleh pemerintah pusat adalah harus juga direncanakan oleh pemerintah daerah. Jadi apa yang benar dan tepat pada skala nasional adalah juga tepat dan benar pada skala daerah. Ini berarti pemerintah daerah tidak diberi ruang dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Sementara pada gambar 14.2 (b) menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah hanya bersinggungan saja.



Gambar 14.2. Keterkaitan PPN dan PPD

14.5 Pentingnya Perencanaan Pembangunan

Setelah menyimak pengertian perencanaan pembangunan, maka pertanyaan berikutnya adalah mengapa perencanaan pembangunan menjadi penting? Apakah Negara atau daerah yang melakukan perencanaan dinyatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain ada jaminan bahwa Negara tersebut berhasil? Atau bagi Negara atau daerah

yang tidak melakukan perencanaan, apakah dapat dinyatakan gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan seperti ini perlu kajian lebih jauh, namun sesungguhnya bagi Negara atau daerah yang melakukan perencanaan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumberdaya ekonomi yang lebih efisien dan efektif. Hal ini berarti peran dan fungsi pemerintah menjadi sangat penting dalam pengelolaan ekonomi.

Dengan melihat perkembangan pembangunan hingga saat ini, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa tidak ada Negara di dunia ini tidak mementingkan peranan pemerintah. Di negara-negara maju dan penganut mekanisme pasar sekalipun, peranan dan intervensi pemerintah masih tetap ada dan dibutuhkan untuk kepentingan publik baik melalui kebijakan fiskal dan moneter, dan maupun peran regulatori lainnya. Indonesia sebagai Negara sedang berkembang, tuntutan masyarakat terhadap peran pemerintah masih sangat besar. Namun di satu sisi, perannya dibatasi pada hal-hal yang fungsinya sebagai regulator, koordinator, dan motivator, atau dengan istilah yang dikemukakan oleh Keynes campur tangan pemerintah dibutuhkan bilamana sektor swasta tidak mampu melakukannya. Dari berbagai referensi yang tersedia, ada tiga fungsi pemerintah terkait dalam pengelolaan ekonomi (Musgrave, 1959; Marlow, 2004): **1) fungsi alokasi; (2) fungsi distribusi, dan (3) fungsi stabilisasi.** Ketiga fungsi tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

- 1. Fungsi alokasi:** Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengalokasian sumberdaya secara efisien sehingga efisiensi ekonomi tercapai. Fungsi ini lebih kepada sisi mikro kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi mikro berbeda di antara negara-negara menurut kebiasaan mereka dan filsafat politik. Beberapa negara menekankan pendekatan *Laissez Faire* dan membiarkan pencapaian efisiensi ekonomi diputuskan oleh mekanisme pasar. Ini berarti intervensi

pemerintah untuk menciptakan efisien melalui pengalokasian sumberdaya sangat minim atau sama sekali tidak diperkenalkan. Beberapa Negara lainnya sangat mengharapkan intervensi pemerintah, sehingga peran pemerintah untuk menciptakan efisiensi ekonomi sangat besar. Terkait dengan itu, peraturan pemerintah atau bahkan kepemilikan usaha pemerintah dan keputusan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksi dan kepada siapa diproduksi dan berapa banyak diproduksi semuanya ditentukan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah harus bertindak untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam hal ini ada tiga kegiatan yang terkait dengan fungsi "alokasi pemerintah" (Stiglitz, 2000): (1) membuat peraturan tentang produk dan penyediaan informasi. Justifikasi pentingnya peraturan pemerintah terkait dengan produk dan penyediaan informasi adalah: (i) untuk membantu konsumen dalam memperoleh informasi yang di butuhkan terkait dengan pengambilan keputusan ekonomi di pasar dan (ii) untuk meminimalkan biaya sosial mengumpulkan informasi. (2) Menyediakan barang publik murni (pure public goods), kuasi- publik, dan barang merit. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tingkat produksi lebih dekat ke tingkat yang efisien dan harga yang lebih dekat dengan biaya marjinal (3) Membuat peraturan terkait dengan industri. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur industri agar inefisiensi dapat diminimalkan.

2. **Fungsi distribusi pemerintah.** Fungsi ini terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana mendistribusikan harta milik pemerintah secara efisien, adil dan merata. Kekayaan suatu negara pada dasarnya adalah milik bersama. Oleh karena itu, kekayaan harus merata dinikmati oleh semua warga yang berada di daerah masing-masing. Jika suatu negara menghasilkan output tertentu, siapa yang benar-

benar menikmati hasil ini? Haruskah output dinikmati oleh semua kelompok dalam jumlah yang sama atau seharusnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu? Jika ada sejumlah kelompok yang tidak terlibat dalam proses produksi apakah kelompok tersebut dapat menikmati pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok yang terlibat?

Ketika suatu wilayah menghadapi sejumlah kendala seperti sumber daya alam yang terbatas, populasi yang besar, dan infrastruktur **terbatas** atau bila ada daerah memiliki kekayaan yang berlimpah, seperti sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang baik, apa yang harus pemerintah lakukan? Bagaimana peran pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan tersebut sehingga penduduk yang berada pada wilayah yang kurang beruntung dapat menikmati hasil- hasil pembangunan? Sehubungan dengan fungsi distribusi, pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Beberapa kebijakan terkait dengan pendistribusian kekayaan dalam masyarakat, misalnya perpajakan, subsidi, transfer pendapatan dari daerah kaya ke daerah miskin untuk mengurangi kemiskinan, bantuan pendidikan, bantuan medis,dll.

Aly (2008) mencatat bahwa pemerintah harus berusaha keras untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, orang cacat, dan orang menganggur. Program kesejahteraan, Jaminan Sosial dan program pemeliharaan kesehatan adalah contoh program yang mendukung masyarakat miskin, orang sakit dan lanjut usia. Sumber pembiayaan dari program ini berasal dari hasil transfer pendapatan dari kelompok pendapatan tinggi kepada yang berpenghasilan rendah, melalui pajak progresif.

3. **Fungsi stabilisasi pemerintah:** Dalam konsep ekonomi makro stabilisasi tercapai bilamana permintaan agregat dan penawaran agregat berada dalam keseimbangan.

Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah harus bertindak untuk menstabilkan ekonomi makro ketika tiba-tiba terjadi gangguan ekonomi. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk meminimalkan fluktuasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Terdapat dua kebijakan penting untuk stabilisasi ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan pajak (pendapatan) dan pengeluaran yang dikelola oleh eksekutif. Ketika perekonomian mengalami resesi, pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan, sedangkan saat ekonomi memanas, atau ada inflasi tinggi, pemerintah harus mengurangi pengeluaran atau pemerintah mengumpulkan pajak pendapatan. Kebijakan Moneter mengacu pada penggunaan suku bunga, persyaratan cadangan, dan operasi pasar terbuka. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatur besar kecilnya jumlah uang beredar dimasyarakat. Perubahan jumlah uang beredar akan berdampak pada suku bunga, inflasi, pengangguran, dan variabel makro ekonomi lainnya.

Kehadiran pemerintah dalam menjalankan peran fungsinya sangat dibutuhkan khususnya bagi Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Efisiensi ekonomi yang dicapai melalui mekanisme pasar sebagaimana dalam pandangan Klasik tidak selalu benar dalam praktek. Dalam kenyataannya, banyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh individu, tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini pasar dianggap gagal menciptakan efisiensi ekonomi. Dalam analisis ekonomi, kegagalan pasar berarti bahwa kekuatan penawaran dan permintaan tidak menciptakan titik-titik efisiensi pada kurva kemungkinan produksi. Oleh karena itu, kegagalan pasar itulah yang menyebabkan perlu intervensi pemerintah dalam

perencanaan pembangunan. Singkatnya, kegagalan pasar terjadi ketika ada alokasi sumber daya dalam pasar bebas tidak efisien. Ada banyak sumber kegagalan pasar, namun penyebab utama ada tiga yaitu: **(i) Barang Publik, (ii) Eksternalitas, (iii) Persaingan sempurna.**

1. **Barang Publik** yaitu Barang dan Jasa tidak disediakan oleh pasar secara bebas karena dua karakteristik penting yaitu: tidak ada pengecualian (*Non-Excludability*) dan tidak ada persaingan dalam mengkonsumsi barang dan jasa tersebut (*Non-Rivalry*). *Non-Excludable* adalah barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah ditujukan untuk semua orang tanpa kecuali. Ini berarti bahwa semua orang dapat memperoleh atau menikmati barang dan jasa tersebut. *Non-Rivalry* terjadi di mana konsumsi barang atau jasa oleh satu orang tidak akan mencegah orang lain untuk menikmatinya. Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah Lampu Jalanan, Keamanan Lalu Lintas, pertahanan Nasional, Jalan/jalan raya, sistem pertahanan banjir, taman umum & pantai. Jika pemerintah menyediakan fasilitas lampu jalanan umum, semua orang dapat menggunakan jalanan tersebut tanpa kecuali dan semua orang yang melewati jalan tersebut dapat menikmati cahaya yang terang benderang, artinya cahaya yang dinikmati satu orang tidak berkurang ketika orang lainnya juga turut melintasi jalanan tersebut. Karena itu, pemerintah menyediakan fasilitas tersebut untuk mereka konsumsi secara kolektif dan sumber pembiayaan adalah melalui pajak.
2. **Eksternalitas**; adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang yang akan mempengaruhi tindakan orang lain. Tindakan ini meliputi tindakan konsumsi dan produksi. Mengapa kehadiran eksternalitas merupakan sumber penyebab kegagalan pasar? Misalnya, ketika perusahaan baja memproduksi baja, ia menyerap tenaga kerja, modal

dan input lainnya, dan oleh karena itu perusahaan tersebut harus membayar balas jasa dari penggunaan input tersebut secara tepat dan biaya-biaya itu akan tercermin dalam harga pasar baja. Ketika semua komponen biaya mahal maka harga baja menjadi mahal sehingga kemampuan konsumen untuk membeli baja menjadi berkurang. Itulah dampak negative dari eksternalitas. Jika perusahaan juga mencemari atmosfer, dan jika tidak dipaksa untuk membayar penggunaan sumber daya ini, maka biaya ini akan ditanggung oleh masyarakat bukan oleh perusahaan. Akibat selanjutnya adalah keseimbangan pasar dalam industri baja tidak akan optimal. Ada dua jenis eksternalitas, eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas negative terjadi bilamana biaya sosial lebih besar daripada benefit sosial. Dalam hal ini, untuk mengatasi kegagalan pasar, pemerintah dapat mencoba dan mengurangi permintaan dengan mengenakan pajak yang tepat. Eksternalitas positif terjadi bilamana manfaat sosial lebih besar daripada biaya sosial. Intervensi pemerintah dapat dilakukan apabila barang yang tersedia lebih sedikit sehingga pemerintah perlu mensubsidi untuk meningkatkan ketersediaan barang tersebut.

3. Persaingan tidak sempurna (Monopoli)

Dalam ekonomi pasar modern, persaingan sempurna sangat sulit ditemukan dalam praktek. Monopoli menyebabkan kegagalan pasar karena perusahaan berada dalam posisi untuk menaikkan harga dan lebih efisien dengan mengorbankan konsumen. Kasus ekonomi klasik terhadap monopoli adalah bahwa harga output lebih tinggi daripada di pasar yang kompetitif. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen, surplus konsumen akan berkurang. Bila harga lebih tinggi daripada biaya marjinal, alokasi sumber daya ekonomi menjadi tidak efisien. Untuk menciptakan pengalokasian sumber daya secara efisien maka dibutuhkan campur tangan

pemerintah. Misalnya, pungutan pajak atas keuntungan monopoli pemerintah dan memberikan peraturan pada oligopoly dalam rangka pengendalian harga dan lain-lain.

Sumber kegagalan pasar lainnya selain yang disebutkan di atas adalah informasi asimetris (Wilkinson, 1999; Stiglitz, 2000). Wilkinson menyatakan bahwa ada dua alasan utama untuk intervensi pemerintah ke pasar: (1) untuk mengakomodasi daerah di mana pasar gagal untuk beroperasi secara efisien, dan (2) untuk mencapai tujuan sosial seperti ekuitas dan perlindungan konsumen. Todaro dan Smith (2006) mengemukakan pandangan yang sama tentang alasan pentingnya perencanaan (pentingnya campur tangan pemerintah) yaitu:

1. Adanya Kegagalan Pasar

Pada dasarnya mengapa pembangunan membutuhkan perencanaan tidak terlepas dari pentingnya kehadiran pemerintah. Pemerintah sebagai agen perencana pembangunan hadir karena adanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar pada umumnya disebabkan oleh: **(i) Adanya kekuatan monopoli, (ii) Adanya Eksternalitas, (iii) Adanya Barang Publik, (iv) Informasi tidak sempurna.**

2. Mobilisasi dan Alokasi Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pemanfaatan sumber daya (tenaga kerja, SDA, kapital) harus terjaga dengan baik dalam arti bahwa sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Investasi harus ditentukan secara cermat, dikaitkan dengan tujuan perencanaan secara keseluruhan. Penggunaan tenaga kerja yang trampil harus ditempatkan pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan sumbangan maksimal sehingga nantinya dapat memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Hal yang sama dengan penggunaan modal. Dalam konteks inilah perlunya perencanaan.

3. Dampak Psikologis dan Dampak terhadap Sikap/Pendirian

Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Itu berarti untuk mencapai tujuan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan perencanaan yang lebih baik agar tujuan pembangunan dapat dinikmati oleh b. Dengan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, dari kelompok/kelas /sukubangsa /agama yang berbeda, diharapkan tujuan pembangunan lebih mudah tercapai.

4. Bantuan Luar Negeri

- a. Bantuan dari negara donor akan berpeluang lebih besar, jika disertai dengan rencana kegiatan yang rasional, dan dapat meyakinkan bahwa dana yang diterima akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat.
- b. Ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh negara donor yang berkaitan dengan isu- isu global yang membutuhkan perencanaan yang lebih matang.

14.6 Bagaimana melakukan perencanaan?

Terdapat tiga pertanyaan sebagai titik awal berpikir tentang perencanaan yaitu dimana kita berada (*where we are*), mau kemana (*where we go*) dan bagaimana mencapainya (*how to get there*). Pertanyaan pertama dan kedua seringkali menjadi perdebatan ketika sebuah lembaga ataupun jenjang organisasi akan melakukan perencanaan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa sebuah organisasi harus memikirkan lebih awal tentang dimana posisi atau keberadaan sebuah organisasi. Seberapa besar potensi sumber daya yang dimiliki. Setelah mengetahui kemampuan, tantangan dan hambatan kemudian memikirkan

sasaran dan tujuan apa yang ingin (*where we go*) dan mampu dicapai sesuai dengan kemampuan yang ada. Pandangan lainnya mengatakan bahwa sebuah organisasi harus menetapkan lebih awal sasaran dan tujuan yang akan dicapai di masa depan. Ini berarti, pertanyaan *where we go* merupakan titik awal berpikir perencanaan. Setelah menetapkan sasaran barulah beralih pada pertanyaan pertama tentang *where we are*. Artinya bahwa setelah ada sasaran yang ingin dicapai, mampukah sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Pandangan mana yang tepat tergantung kepada perencanaan atau organisasi memandang sebuah persoalan dalam pencapaian tujuan. Akan tetapi sejauh ini, terdapat kecenderungan pergeseran dari pandangan pertama kepada pandangan kedua yaitu memikirkan atau menetapkan sasaran dengan jelas kemudian mengetahui kemampuannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, ketiga pertanyaan ini sekaligus sebagai langkah-langkah dalam perencanaan.

Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang pemerintahan. Langkah tersebut adalah :

1. Menetapkan sasaran

Kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif.

2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini

Jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui organisasi berada dimana saat ini dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika sebuah organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini.

3. Mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran

Selanjutnya perlu diketahui faktor faktor, baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam tahapan ini adalah pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada saat ini dalam sebuah organisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan meramalkan persoalan atau peluang yang akan terjadi di masa datang. Betapun sulitnya melihat ke depan adalah unsur utama yang paling sulit dalam perencanaan dan hal ini harus dipikirkan oleh sebuah organisasi.

4. Menyusun langkah langkah untuk mencapai sasaran

Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

14.6 Jenis-jenis Perencanaan

Perencanaan dapat dikelompokkan kedalam berbagai sudut pandang misalnya Lincoln Arsyad (1999), membagi perencanaan pada beberapa dimensi yaitu: (i) berdasarkan jangka waktu, (ii)

Berdasarkan sifat perencanaan, (iii) berdasarkan alokasi sumberdaya, (iv) berdasarkan tingkat keluwesan, (v) berdasarkan sistem ekonomi, (vi) berdasarkan cara pelaksanaan (arus informasi).

- (i) Perencanaan berdasarkan jangka waktu. Jika dikaji jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, terdapat tiga jenis perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka

pendek. Perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan yang biasanya berjangka waktu 10-25 tahun. Pada saat Orde baru, perencanaan pembangunan jangka panjang berdimensi 25 tahun yang dikenal dengan istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Saat ini, perencanaan jangka panjang dikenal dengan istilah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional dan RPJP daerah, sementara perencanaan jangka menengah biasanya berdimensi lima tahun yang dikenal dengan istilah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional dan RPJM daerah yang sebelumnya disebut dengan Repelita, perencanaan satu tahun atau perencanaan tahunan yang berdimensi satu tahun dikenal dengan istilah rencana kerja pemerintah (RKP) nasional dan RKP daerah yang dulu dikenal dengan istilah rencana pembangunan tahunan (Repeta) nasional dan Repeta daerah.

- (ii) Perencanaan berdasarkan sifat perencanaan. Ada dua jenis perencanaan berdasarkan sifat yaitu perencanaan komando (planning by direction), dan perencanaan dengan ransangan (planning by inducement). Perencanaan komando yaitu salah satu jenis perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah semata. Pemerintah atau penguasalah yang menetapkan tujuan yang akan dicapai, penguasalah yang melaksanakan dan penguasalah yang mengevaluasi pelaksanaan rencana. Jenis perencanaan komando pada umumnya dipraktekkan pada masyarakat sosialis. Perencanaan dengan ransangan yaitu perencanaan yang memberi kebebasan secara demokratis kepada pelaku pasar untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tidak ada keharusan, tetapi yang ada adalah ajakan. Pengusaha mempunyai kebebasan untuk memproduksi, kebebasan bagi konsumen

untuk memilih jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Jenis perencanaan ini sedikit lebih liberal dan pada umumnya banyak dipraktekkan pada Negara liberal. Meskipun demikian, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan bersama. Misalnya, ketika pemerintah ingin meningkatkan produksi barang khususnya barang-barang publik, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada pengusaha barang tersebut. Pemerintah juga dapat mengenakan pajak untuk menekan inflasi atau ingin meningkatkan penerimaan dari perpajakan.

- (iii) Perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya. Berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan yaitu perencanaan yang mampu mengalokasikan sumber daya keuangan pada program dan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif. Apapun bentuk perencanaan yang telah dilakukan, misalnya tujuan yang ingin dicapai telah dirumuskan secara baik, langkah-langkah untuk mencapai tujuan telah direncanakan, namun jika sumber daya keuangan tidak tersedia maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan pernah tercapai. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang memegang peran penting dalam perencanaan. Dalam perencanaan keuangan, pembiayaan ditetapkan dalam bentuk uang dan perkiraan dibuat atas dasar berbagai hipotesa yang mencakup pertumbuhan pendapatan nasional, konsumsi impor, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan fisik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perencana untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian faktor-faktor produksi dan hasil produksi sehingga memaksimalkan pendaatan dan

pekerjaan. Keseimbangan fisik hanya dapat dicapai melalui perkiraan yang tepat terhadap hubungan antara investasi dan output. Dengan kata lain, perencanaan fisik adalah perencanaan yang disusun untuk menghasilkan produksi berupa barang fisik. Contoh perencanaan fisik adalah perencanaan bangunan, perencanaan jalan, perencanaan gedung sekolah dsb. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya adalah perencanaan yang disusun dengan cara menentukan apakah perencanaan diarahkan pada pengalokasian sumber daya keuangan atau perencanaan yang difokuskan kepada perencanaan fisik. Jika Negara menyusun perencanaan keuangan berarti yang dipikirkan adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya uang atas program dan kegiatan yang direncanakan. Ini berarti uang menjadi unsure penting. Bagi Negara yang mempunyai sumber daya uang yang terbatas maka perencanaan uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi bagi Negara yang mempunyai sumberdaya uang yang cukup maka perencanaan fisik menjadi penting karena uang bukan merupakan kendala. Bagi Negara sedang berkembang, perpaduan antara perencanaan keuangan dan perencanaan fisik harus dipadukan. Sasaran fisik harus seimbang dalam artian sumberdaya keuangan yang tersedia, sementara sumberdaya keuangan yang lebih besar harus dimobilisasi dalam rangka memenuhi sasaran fisik untuk mempercepat laju pembangunan.

- (iv) Perencanaan berdasarkan tingkat keluwesan. Ada dua jenis perencanaan jika ditinjau berdasarkan tingkat keluwesan yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperative. Perencanaan indikatif atau sering disebut sebagai perencanaan lunak adalah salah satu jenis

perencanaan yang ditentukan secara bersama-sama oleh pelaku pembangunan, Swasta dan Pemerintah. Pemerintah dan swasta secara bersama-sama menentukan perekonomian menjadi lebih baik. Pemerintah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh sektor swasta. Sektor swasta diberi kebebasan untuk memproduksi tanpa harus diawasi oleh pemerintah. Perencanaan seperti ini pernah diterapkan di Perancis. Pemerintah tidak mengarahkan sektor swasta sebagaimana yang umumnya terjadi di Negara sedang berkembang lainnya. Di dalam rencana nasional, sasaran produksi dan investasi ditetapkan baik oleh swasta maupun pemerintah. Komisi perencanaan Prancis membahas rencana tersebut bersama wakil-wakil sektor swasta untuk memutuskan bentuk akhir perencanaan. Negara menangani rencana yang sifatnya dasar seperti batu bara, semen, baja, transportasi, bahan bakar, pupuk dan peralatan pertanian dsb. Pada sektor ini, pemenuhan sasaran produksi merupakan keharusan. Di samping ada tindakan pokok tertentu yang dianggap penting bagi kehidupan sektor dasar tersebut dan karenanya langsung ditangani sektor Negara. Sedangkan perencanaan imperative atau perencanaan menyeluruh adalah perencanaan yang biasanya diterapkan di Negara kapitalis dimana Negara adalah penentu segala-galanya. Semua pengarahan sumberdaya diatur oleh komando atau Negara. Ada pengawasan menyeluruh dari Negara atas perilaku sektor swasta dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi. Keseluruhan sumber daya dipakai semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi sasaran rencana. Tidak ada kedaulatan konsumen. Berapa banyak barang dan jasa yang akan diproduksi tergantung pada perintah komando atau manajer perusahaan atau penguasa Negara. Oleh karena biasanya kebijakan

pemerintah dan keputusan pemerintah kaku, maka jumlah produksi tidak dapat diubah dengan mudah. Jika ada kemacetan dalam memenuhi sasaran nasional pada tahun tertentu, kemacetan itu berpengaruh buruk terhadap keseluruhan perekonomian.

- (v) Perencanaan Berdasarkan Sistem Ekonomi. Dalam kaitan ini perencanaan dibagi atas tiga yaitu perencanaan dalam perekonomian kapitalis, perencanaan dalam perekonomian sosialis dan perencanaan dalam perekonomian campuran. Perencanaan dalam perekonomian kapitalis yakni perencanaan yang tidak tersandarkan pada rencana yang terpusat. Pelaku-pelaku ekonomi seperti swasta dan unit individu mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja sesuai dengan apa mereka ingin capai. Swasta biasanya ingin mengejar profit yang semaksimal mungkin, sementara individu yang bertindak sebagai konsumen selalu ingin mengejar kepuasan yang maksimum. Dalam kaitan dengan perencanaan di sini, swasta dan individu dapat menentukan sendiri rencana tanpa diintervensi oleh pemerintah. Segala output yang dihasilkan oleh perusahaan dan household dipasarkan melalui mekanisme pasar. Berapa tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan berapa banyak yang akan diproduksi semua diserahkan atas kesepakatan antara sisi supply dan sisi demand. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah terbatas pada perencanaan yang berfokus pada infrastruktur fisik yang berfungsi untuk memberi kemudahan sector swasta dan pelaku lainnya bekerja. Misalnya pemerintah dapat merencanakan untuk membangun jembatan, membangun jalan, membangun listrik, pemerintah menetapkan peraturan yang sifatnya untuk menjaga agar mekanisme pasar berjalan secara efisien. Kegiatan-kegiatan ini semua diarahkan untuk

memfasilitasi sector swasta agar tidak terjadi kekurangan supply dan masyarakat dapat menikmati sesuai dengan tingkat harga yang berlaku. Namun perlu pula dicermati bahwa dalam perencanaan kapitalis, pemerintah dapat mencegah pemusatan monopoli. Di dalam perencanaan kapitalis, monopoli mengganggu mekanisme harga. Oleh karena itu, biasanya pemerintah menetapkan aturan yang dapat mencegah praktek monopolistic. Perencanaan pada Negara sosialis didasarkan pada rencana yang terpusat. Ada penguasa atau badan perencana pusat yang merumuskan perencanaan secara keseluruhan untuk mensejahterakan masyarakat. Apa, mengapa, untuk apa, kapan, berapa banyak, dan bagaimana barang dan jasa yang akan diproduksi dalam suatu periode tertentu semua ditentukan oleh penguasa (Negara) atau Badan Perencanaan Pusat. Rencana pusat tersebut memuat semua tujuan sosialis ekonomi secara pasti. Tujuan ini mencakup: permintaan agregat, tingkat pengerjaan penuh, pemenuhan permintaan masyarakat, alokasi factor-faktor produksi, distribusi pendapatan nasional, jumlah akumulasi modal, atau pembangunan ekonomi dsb (Asryad, 1999). Pelaku-pelaku ekonomi seperti swasta dan individu diatur oleh Negara. Negara yang menentukan sasaran produksi secara nasional, kemudian sector swasta menyesuaikan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses penentuan harga di bawah perencanaan sosialis tidak berjalan secara bebas tapi bekerja di bawah pengaturan dan pengawasan badan perencanaan pusat atau Negara. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa perencanaan sosialis dan proses penentuan harga tidak bertolak belakang karena memenuhi asas-asas yang saling melengkapi dengan empat cara: (i) untuk memberikan pedoman umum menuju ekonomi sosialis, (ii) membuat keputusan dimana

indikasi pasar kurang, (iii) menghilangkan fluktuasi siklus dalam kegiatan ekonomi,

- (vi) Menghadapi keadaan darurat tertentu. Jadi proses penentuan harga memainkan peranan penting di badan perencanaan. Di Negara seperti ini, terdapat harga pasar yang menjadi dasar penjualan barang-barang konsumsi dan barang investasi, dan pemilihan metode produksi. Proses penentuan harga tersebut tidak mempengaruhi rencana. Sebaliknya proses tersebut tunduk pada rencana yang ditetapkan oleh pusat. Perencanaan sosialis nampaknya lebih unggul daripada perencanaan kapitalis. Penerapan perencanaan di bawah kapitalisme gagal menghasilkan efisiensi ekonomi, gagal menghindarkan pemborosan sumberdaya, gagal menjegah praktek monopolistic hingga gagal mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan. Hal ini terbukti pada semua Negara-negara kapitalis. Pada sisi lain, perencanaan sosialis memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar. Malahan, alat-alat produksi diawasi dan diatur oleh badan perencanaan pusat dengan cara yang paling efisien. Selain itu tercipta kesejahteraan yang lebih besar karena hamper tidak ditemukan kesenjangan. Rencana terpusat bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat secara social. Karena badan perencanaan memiliki, mengawasi dan mengatur semua alat produksi dan distribusi, maka setiap warga Negara digaji sesuai dengan kecakapan, pendidikan dan latihannya sehingga dengan demikian mengurangi ketidakmerataan. Akhirnya, di bawah perencanaan sosialis, badan perencanaan pusat mampu menghindarkan kecenderungan deflasi dan inflasi melalui koordinasi yang lebih baik terhadap

kegiatan berbagai satuan produksi dan memungkinkan penggunaan sumberdaya yang tersedia dengan sepenuhnya (Arsyad, 1999). Perpaduan antara perencanaan dalam sosialis dan kapitalisme maka lahirlah yang disebut dengan perencanaan dalam ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem yang bebas dari kelemahan kapitalisme dan sosialisme dan menyatupadukan semua kebaikan-kebaikan. Jenis perencanaan ini pada dasarnya merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Kelebihan perekonomian sosialisme dikembangkan dan kekurangan perencanaan kapitalisme dihindari. Perlu ditekankan di sini bahwa perencanaan dalam ekonomi campuran, swasta dan pemerintah secara bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakat. Ini berarti tidak ada pelaku ekonomi yang lebih mendominasi kegiatan ekonomi. Untuk tujuan pembangunan ekonomi, sistem perencanaan ini membagi perekonomian Negara ke dalam sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah dibawah pengawasan langsung dari pemerintah, yang mengatur produksi dan mendistribusikannya. Pada umumnya pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar biasanya menjadi tanggungan pemerintah seperti angkutan kereta api, jalan raya, dan udara, pembangkit tenaga listrik, pos dan telekomunikasi dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, industri pertahanan, industri atom, industri besar dan industri strategis semuanya diselenggarakan oleh sektor pemerintah. Dengan demikian, semua alokasi pembiayaan untuk menyediakan barang-barang seperti ini semua ditetapkan oleh pemerintah.

- (vii) Perencanaan berdasarkan cara pelaksanaan (arus informasi). Perencanaan disini dikenal ada dua arus informasi yaitu perencanaan yang berdasarkan pada arus informasi dari bawah atau dikenal dengan perencanaan dari bawah ke atas (*Bottom-Up Planning*), dan perencanaan dari atas ke bawah (*Top-Down Planning*).

14.7 Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari : **(a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional, dan (d) perencanaan mikro.**

1. **Perencanaan pembangunan makro** adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.
2. **Perencanaan sektoral** adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai

sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.

3. **Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional** menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi- instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan

pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor.

4. **Perencanaan mikro** adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek- proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarnya. Keterkaitan perencanaan sektoral, makro dan regional dapat dilihat pada Gambar 14.3.



Gambar 14.3. Koordinasi Perencanaan

Gambar 14.3 menjelaskan bahwa perencanaan makro merupakan perencanaan terbesar yang menaungi perencanaan sektoral, regional dan perencanaan mikro. Keempat bentuk perencanaan tersebut saling berkaitan dan dapat disampaikan dalam 4 metode perencanaan yaitu: **(i) pendekatan Rasional, (ii) Perencanaan Partisipatif, (iii) perencanaan advokasi, dan (iv) Perencanaan Komunikatif.**

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25, Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta 2004
- Aly, Hasan. 2008. *The Role of Government In Market Economy*. Marior Star.Com. <http://www.econ.ohiostate.edu/Aly/docs/The%20role%20of%20government%20MS%20Article%209-27-08.pdf>. Retrieved 29 October 2009.
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja Grafindo Persada Jakarta
- Lincoln Arsyad, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE Yogyakarta
- Nursini, Tawakkal dan Sultan, 2010. *Modeling Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Studi Kasus Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Penelitian tidak dipublikasikan.
- Stiglitz, Joseph E. 2000. *Economics of The Public Sector* Third Edition. Norton: McGraw-Hill
- Surat Edaran No 050/2020/SJ tanggal 11-8-2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM
- Stiftel, Bruce, 2000. "Planning theory. Pp.4-16 in The National AICP Examination Preparation Course Guidebook.
- WD Waterston, Albert 1965. *Development Planning Lessons of Experience*. The Johns Hopkins University Press Baltimore and

BAB 15

EKONOMI MARITIM

Oleh Fabiola Bulimasena Luturmas

15.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu mencapai 17.000 pulau yang tersebar di setiap provinsi, dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Sebagian besar wilayah Indonesia yaitu 75% merupakan wilayah perairan yang mempertegas potensi kemaritiman Indonesia. [1]

Dengan luas wilayah lautan sebesar ini tentunya Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Sumber daya kekayaan laut ini misalnya pada sektor perikanan, ataupun pada sektor pariwisata bahari yang dapat dikembangkan untuk menarik kedatangan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Potensi kekayaan sumber daya laut ini merupakan pendukung bagi sektor ekonomi, khususnya untuk pengembangan ekonomi maritim yang merupakan bagian dari strategi pembangunan kemaritiman yaitu tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

15.2 Ekonomi

Dalam menjalankan kehidupan, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya sebab ada kebutuhan-kebutuhan yang tentunya tidak dapat dipenuhi dari diri manusia itu sendiri. Secara sederhana, manusia harus memenuhi

kebutuhan sandang, pangan dan papan sebelum memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Dalam teori Hirarki Maslow menyatakan terdapat 5 (lima) tingkatan dalam kehidupan manusia, dimulai dari kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan teratas yang akan dipenuhi setelah kebutuhan dasar terpenuhi. ([2])

Terkait pemenuhan kebutuhan tersebut, maka timbul kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia. Ekonomi secara umum digambarkan sebagai aktivitas manusia terkait kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi akan barang dan atau jasa [3] Ekonomi juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku baik secara individu maupun bermasyarakat akan pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang sifatnya terbatas.

Ekonomi merupakan kegiatan yang timbul sebab adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan dan keinginan atau disebut juga kelangkaan. Terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan kelangkaan yaitu terbatasnya sumber daya ekonomi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia dan kebutuhan manusia yang meningkat lebih cepat dari ketersediaan sumber daya tersebut.

Terdapat 5 (lima) masalah ekonomi yang harus dipecahkan masyarakat dalam suatu negara yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang harus diproduksi dan berapa banyaknya jumlahnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk kurang lebih 278 juta orang, hal ini tentunya menjadi salah satu masalah yang dihadapi agar setiap penduduk selalu dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Bagaimana barang-barang pemenuh kebutuhan tersebut diproduksi. Terutama ketika melakukan produksi dengan jumlah besar tentunya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi yang besar.

3. Untuk siapa barang tersebut diproduksi, hal ini menyangkut tentang konsumen yang akan menggunakan barang tersebut, bagi konsumen dengan pendapatan tinggi tentu akan mendapatkan lebih banyak hasil produksi karena ada kemampuan untuk membeli, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan ketidak mampuan masyarakat untuk mendapatkan hasil produksi. Hal ini mempengaruhi distribusi barang yang dihasilkan antara masyarakat.
4. Bagaimana pembagian untuk ketersediaan barang tersebut.
5. Berapa cepat pertumbuhan ekonomi, yaitu terkait tabungan dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya untuk mempertahankan perekonomian bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

15.3 Maritim

Sektor maritim memiliki potensi tinggi, utamanya di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan dikepung oleh lautan. Di Indonesia, secara khusus pada Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla yaitu pada tahun 2014, sektor maritim mendapat perhatian khusus bahkan menjadi anak emas yang diharapkan mampu dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, menciptakan pemerataan ekonomi bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia.

Keseriusan pemerintah ini dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan dilanjutkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Laut kerap kali dianggap memiliki pengertian yang sama dengan maritim, padahal jika dilihat lebih lanjut dengan merujuk definisi secara umum dapat diketahui bahwa terdapat sedikit perbedaan, dimana laut (*marine*) berasal dari bahasa latin *mare*

bermakna kata sifat ‘dari atau berkaitan dengan laut’ sedangkan maritim (*maritime*) berasal dari bahasa latin *maris* bermakna kata sifat ‘dari atau berkaitan dengan obyek atau tindakan yang terkait dengan, atau dilakukan di laut’.

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa laut (*marine*) berhubungan langsung dengan laut, sedangkan maritim (*maritime*) berkenaan dengan aktivitas yang dilakukan manusia dilaut dan berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan laut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maritim didefinisikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terkait dengan pelayaran serta perdagangan dilaut. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa maritim memiliki makna lebih luas daripada laut karena mencakup segi fisik (laut) dan non fisik (pelayaran dan perdagangan) di laut.

Untuk lebih mudah dipahami, suatu contoh nyata yaitu Singapura yang merupakan negara maritim akan tetapi bukan negara kelautan. Hal ini disebabkan, Singapura memanfaatkan lautnya sebagai jalur perdagangan internasional yang dilalui oleh pelaku pelayaran internasional yang digunakan untuk membangun ekonomi negaranya.

15.4 Ekonomi Maritim

Laut Indonesia memiliki potensi maritim yang besar, sehingga seharusnya ekonomi maritim dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya bagi masyarakat pesisir. Sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang perairan, ekonomi maritim dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas perekonomian yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan kegiatan diluar kawasan perairan tetapi memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungan yang asalnya dari perairan. Hal ini termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana Undang-undang No. 27 Tahun

2007, termasuk pula kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna untuk dimanfaatkan di perairan.

Kemajuan sistem perekonomian juga ditandai dengan kepedulian pemerintah terhadap lingkungan, saat ini marak dilakukan *blue economy* yang terkait erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar kegiatan ekonomi yang saat ini dilakukan tidak mendatangkan dampak negatif bagi generasi mendatang [4]

Berdasarkan Klasifikasi Aktivitas Kemaritiman Indonesia Ekonomi Kemaritiman (KBLI), kawasan perairan meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

15.4.1 Peranan Sektor Maritim

Peranan sektor maritim di Indonesia sangatlah penting, yaitu diantaranya dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, sebagai pendukung kegiatan logistik dan perdagangan negara yang akan di jelaskan dibawah ini.

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Potensi besar wilayah maritim di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan di Industri ini, baik dari sektor angkutan laut, sungai, danau bahkan penyeberangan maupun sektor perikanan.

2. Ketenagakerjaan

Pada sektor maritim, tenaga kerja bertumbuh dengan kecenderungan melambat. Saat ini pada sektor baik transportasi atau pergudangan maupun komunikasi masih berpotensi menyerap sumber daya maritim agar dapat mengembangkan perekonomian maritim dengan maksimal misalnya pada sektor pariwisata bahari.

3. Logistik dan Perdagangan

Pembangunan sektor ekonomi khususnya pada sektor pelayaran memberikan nilai positif pada sistem logistik nasional terutama ketika muncul program kerja pada

pemerintahan Presiden Jokowi – JK (Tahun 2014 s.d Tahun 2019)

15.4.2 Manfaat Sektor Maritim

Indonesia merupakan negara kepulauan sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka memperjuangkan batas wilayah laut sebab pada wilayah laut terdapat satu kesatuan yang dilihat baik dari aspek politik, sosial budaya hingga pertahanan keamanan.

Melalui Deklarasi Djuanda, ditetapkan bahwa wilayah laut Republik Indonesia yaitu 12 mili laut ditarik dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik terluar pulau terluar Indonesia. Deklarasi ini merupakan terobosan yang sangat penting sekaligus menandai upaya dan klaim pengakuan yuridis internasional atas status kedaulatan negara kepulauan.

Konvensi Hukum Laut Ketiga (*United Nations Conventions on the Law of the Sea* atau disingkat UNCLOS) tahun 1982 merupakan pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, selanjutnya aturan ini diratifikasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985.

Dengan pemberlakuan UNCLOS, Indonesia diwajibkan untuk memberikan akses hak lintas damai sesuai dengan UNCLOS 1982 pasal 53 ayat 9 dimana Indonesia memiliki kewajiban menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yaitu konsensus yang ditetapkan pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 yang membagi wilayah Indonesia dilewati 3 jalur ALKI [5] yaitu sebagai berikut :

1. ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Selat Sunda
2. ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok

3. ALKI III melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berfungsi sebagai alur transportasi logistik dan perdagangan dunia. Sebagai negara poros maritim, perlu pengembangan berkelanjutan terkait infrastruktur pendukung dunia kemaritiman mengingat terdapat keterkaitan yang kuat antara kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. [6]

15.5 Sektor Pelayaran

Dalam pengembangan sistem logistik nasional, sektor pelayaran merupakan prioritas karena dianggap sektor yang efektif dan efisien dalam rangka proses distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya distribusi barang dalam jumlah besar dibandingkan dengan distribusi barang melalui transportasi darat ataupun udara. [7]

15.5.1 Infrastruktur Pelayaran

Dalam peningkatan lalu lintas barang dan penumpang, infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting, selain itu infrastruktur juga berperan pada perbaikan konektivitas antarpulau di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah harus selalu mengawasi pembangunan dan revitalisasi pelabuhan yang sudah ada agar dapat digunakan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan melibatkan teknologi yang lebih maju misalnya dengan menerapkan sistem Inaportnet agar dapat meningkatkan efektifitas pelayanan kapal dan barang di pelabuhan sehingga dapat juga membantu mengurangi biaya operasional.

15.5.2 Industri Perkapalan

Dalam peningkatan lalu lintas barang dan penumpang, infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting, selain itu infrastruktur juga berperan pada perbaikan konektivitas antarpulau di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah harus selalu mengawasi pembangunan dan revitalisasi pelabuhan yang sudah ada agar dapat digunakan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan melibatkan teknologi yang lebih maju misalnya dengan menerapkan sistem Inaportnet agar dapat meningkatkan efektifitas pelayanan kapal dan barang di pelabuhan sehingga dapat juga membantu mengurangi biaya operasional.

Kebutuhan terkait moda transportasi laut makin meningkat dengan pesanan berbagai ukuran untuk menunjang produktivitas masing-masing negara, ditambah lagi lahirnya kebijakan masing-masing negara yang memberikan keringanan baik pajak maupun menetapkan pelabuhan bebas, perdagangan bebas, zona perdagangan bebas [8]

Salah satu pasar yang paling terbuka di era modern ini adalah industri transportasi laut, hal ini menunjukkan secara lengkap terkait perlindungan pemerintah hingga praktik liberisasi pada industri untuk mendapatkan yang terbaik. Perkembangan perdagangan sudah dilakukan sejak jaman dahulu khususnya melalui kapal modern sebagai sarana angkutan barang dan kegiatan ekonomi. [9]

15.6 Pemberlakuan Asas Cabotage

Transportasi laut merupakan salah satu pendukung perekonomian maritim Indonesia yaitu sebagai sarana pengangkut barang, penumpang maupun penunjang kegiatan lepas pantai di perairan laut Indonesia. Sayangnya, masih banyak kapal-kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut merupakan kapal yang dimiliki oleh pihak asing.

Hal ini disebabkan karena masih belum mampunya perusahaan pelayaran dalam negeri untuk membeli kapal sendiri, adapun perusahaan pelayaran lebih memilih untuk menyewa kapal asing dibandingkan membeli kapal sendiri. Hal ini merupakan salah satu dasar Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. [10]

Lahirnya Undang-undang ini mengharuskan perusahaan pelayaran dalam negeri untuk memiliki kapal berbendara Indonesia atau memiliki kapal sendiri dan menggunakan jasa anak buah kapal dari dalam negeri. Penerapan Asas Cabotage ini adalah agar kapal berbendara Indonesia dapat menguasai perairan Indonesia sendiri serta untuk mengurangi peran pihak asing dalam industri perairan Indonesia.

Terdapat beberapa tujuan dari penerapan Asas Cabotage yaitu antara lain sebagai berikut [10]

1. Mengurangi ketergantungan sistem pelayaran Indonesia akan ketergantungan Kapal-kapal asing;
2. Melancarkan arus pengiriman barang atau jasa dan penumpang ke seluruh wilayah nusantara;
3. Sebagai penunjang sistem perdagangan dan transportasi serta pertahanan dan keamanan nasional.

Selain tujuan penerapan Asas Cabotage yang telah disebutkan diatas, dibawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan Asas Cabotage adalah sebagai berikut:

1. Asas Cabotage merupakan kebutuhan bagi perusahaan angkutan laut nasional sebagai pendorong pertumbuhan pengangkutan laut nasional.
2. Dilakukan Pembentukan tim pengawas sebagai petugas untuk mengidentifikasi kapal baik kontrol ataupun mengawasi kapal yang beroperasi di wilayah perairan di Indonesia.

3. Menyediakan fasilitas penyediaan kapal untuk mendukung proses pemberian izin dan sebagai pusat informasi bagi perusahaan pengangkutan laut nasional.

Adapun yang menjadi faktor penghambat penerapan asas Cabotage yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Belum banyak tersedia kapal berbendera Indonesia untuk melayani kegiatan nasional;
2. Biaya investasi untuk pengadaan kapal termasuk membutuhkan dana yang besar sehingga masih relatif sulit untuk dilakukan
3. Kontrak kerja yang dilakukan antara pemilik kapal dengan pengguna kapal masih termasuk kontrak jangka pendek

Terkait dengan penerapan bahkan faktor penghambat penerapan asas Cabotage yang telah disebutkan diatas, terdapat juga beberapa dampak yang dirasakan dari keberhasilan penerapan asas cabotage yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Mengukuhkan kedaulatan negara
 - b. Terserapnya Sumber Daya Manusia domestik
 - c. Terciptanya keamanan nasional
2. Bagi Perusahaan Pelayaran:
 - a. Tingginya permintaan pasar untuk mengantar muatan domestik
 - b. Tingginya perekonomian nasional dan pertumbuhan muatan domestik
3. Bagi *Indonesian National Ship Owners Association (INSA)*
 - a. Jumlah anggota INSA semakin bertambah
 - b. Meningkatkan pengawasan bagi perusahaan pelayaran dalam negeri

DAFTAR PUSTAKA

- S. Nur and R. D. Siang, "Optimalisasi Pengembangan Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Bisnis Perikanan FPIK UHO*, vol. 3, no. 2, pp. 175–184, 2016.
- A. Bari and R. Hidayat, "TEORI HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MEREK GADGET," *Jurnal MOTIVASI*, vol. 7, no. 1, pp. 1–7, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.um-palembang.ac.id/motivasi>
- M. Tindangen, D. S. Engka, and P. C. Wauran, "PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS: PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no. 03, pp. 79–87, 2020.
- F. B. Luturmas, M. Maulita, and R. Rahmat, "Konsep Blue Economy di Daerah Pesisir Kalimantan Timur," *Jurnal Maritim*, vol. 12, no. 2, pp. 52–59, 2022.
- J. Malisan, "Rendahnya Manajemen Keselamatan Pelayaran Pada Perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III," 2014.
- A. A. Putra and S. Djalante, "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, vol. 6, no. 1, pp. 433–443, 2016.
- A. A. Abulkhair, K. Karmila, N. Nurhayati, A. Zainuddin, and N. C. P. Saharuddin, "Sektor-sektor Ekonomi Maritim yang Potensial di Kembangkan," 2020.
- A. Akhirman, "Study Ekonomi Maritim," Malang, 2020. [Online]. Available: <https://www.google.com>
- L. Lesmini and B. Purwanto, "EKONOMI MARITIM & SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA," 2016.

H. Chandra, S. S. Sukoraharjo, F. B. Hirawan, C. Teto, N. M. Manoppo,
and S. Widjaja, *Industri dan Ekonomi Maritim*. Jakarta:
AMAFRAD PRESS, 2019.

BIODATA PENULIS



Risma Nurhaini Munthe, SE, M.Si.,
Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

Risma Nurhaini Munthe, SE, M.Si., lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 November 1967. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Tahun 1995, serta Program Magister Tahun 2010 dari Program Pasca Sarjana Ilmu Perencanaan Wilayah Universitas Simalungun. Saat ini sebagai Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun dan mendapat tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian di Universitas Simalungun.

BIODATA PENULIS



Mansur, M.H.I., CE., CHCS.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Lahir di Pamekasan, 48 tahun lalu. Sejak tahun 2013 menjadi Dosen Tetap pada IAI Miftahul Ulum Pamekasan Madura dan menjadi Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2016 sampai 2021. Mengampu matakuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah. Menjadi Ketua Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya (2017-2021). Asesor Kewirausahaan BNSP (2021). Ketua UMKM Naik Kelas DPD Kab. Pamekasan (2021-2026). Mentor pada Mercy Corps Indonesia (2021). Relawan Garda Transfumi, Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM R.I. (2021-2022).

Menulis book chapter *"Kewirausahaan (Konsep dan Praktik)"* Nuta Media: Yogyakarta, November 2021; Buku bunga rampai *"Metodologi penelitian ekonomi Islam"*, Niramedia: Tuban, November 2021; book chapter international, *"Research Methodology (Concepts and Cases)"*, Novateur Publication: Maharashtra, India, Juli 2021; Book chapter international, *"Social Work, Law, Economics, Public Administration Community Participation and Welfare Society"*, Novateur Publication:

Maharashtra, India, Agustus 2021, Buku bunga rampai, *"Lembaga Keuangan Syariah"*, Media Sains Indonesia, Bandung, April 2023; Buku bunga rampai, *"Metodologi Penelitian dan Analisis Data Comprehensive"*, Insania, Cirebon, Juli 2021; Buku bunga rampai, *"Memeluk Bumi; Menebarkan Kebaikan: Esai-esai pada Masa Pandemi"*, Ideas Publishing, Bandung, September 2021.

Kritikan dan saran dikirimkan melalui e-mail: elcmansur@gmail.com atau via WA: 0812 3505 2403

BIODATA PENULIS



Dr. E. Suharno, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Magister Ekonomi,
& Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Jenderal Soedirman

Penulis lahir 45 Tahun yang lalu. Penulis saat ini aktif sebagai konsultan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kepakaran *Resources & Development Economics*. Saat ini penulis secara aktif berpengalaman melakukan *research* kompetitif nasional diberbagai level dasar, terapan, dan pengembangan pada lingkup akademik, perusahaan, dan pemerintahan. Penulis juga aktif sebagai reviewer di jurnal nasional & internasional bereputasi, reviewer penelitian kompetitif nasional, dan asesor BNSP. Kiprah penulis dapat ditelusur melalui akun ID Scopus = 57188925915, dan ID Orcid = 0000-0003-2515-2767. Buku ini semoga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Penulis berbagi informasi melalui email: suharno@unsoed.ac.id.

BIODATA PENULIS



Sutrisno, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman

Penulis lahir di Samasundu (Polewali Mandar) tanggal 21 Februari 1988, yang memulai pendidikan sejak SD hingga SMA di desa kelahirannya. Lalu melanjutkan program sarjana di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. dan di Tahun 2015 kembali menempuh program magister pendidikan ekonomi di PPS UNM. Selama menempuh pendidikan penulis aktif sebagai pengurus HIMAPEK FE UNM, sebagai ketua Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM, serta aktif dalam pengembangan koperasi di Sulawesi Selatan yakni pada tahun 2012-2015 sebagai staf pada Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan konsultan PLUT (Program Layanan Usaha Terpadu) KUMKM Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015. Sejak 2019 sampai sekarang penulis aktif sebagai dosen tetap program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman. Saat ini juga penulis menjabat sebagai manajer Koperasi FKIP Universitas Mulawarman serta mendapat

amanah sebagai Asesor Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi Republik Indonesia. Email : sutrisno@fkip.unmul.ac.id

BIODATA PENULIS



Dessy Evianti,SE.M.Ak

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 Desember 1974. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi , Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen dan S2 pada Jurusan Akuntansi. Selain sebagai dosen ,penulis juga sebagai praktisi di salah satu perusahaan swasta di bagian keuangan.

BIODATA PENULIS



Kriepina Fenanlampir, SE., M.Si.

Dosen Program Studi Akuntansi

Penulis lahir di Padang tanggal 08 Agustus 1984. berprofesi sebagai adalah dosen di Universitas Lelemuku Saumlaki. Penulis menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan S1 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Pattimura Ambon. Ini merupakan buku ketiga yang ditulis pada tahun 2023 setelah menyelesaikan S2 pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi pada Universitas Lelelmuku Saumlaki.

BIODATA PENULIS



Tri Widayati

Staf Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang, tanggal 28 April 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang, dan melanjutkan jenjang S2 pada Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Penullis melanjutkan program Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2017. Penulis mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Mikro, Matematika Ekonomi, Ekonomi Makro dan Ekonomi Manajerial.

BIODATA PENULIS



Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, ST., SE., MSi., MSE.

Pendidikan menengah diterima penulis dari SMA Kolese Kanisius Jakarta, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan tinggi S1 di Institut Teknologi Bandung Program Studi Teknik Sipil dengan Konsentrasi Manajemen Proyek yang lulus pada tahun 1997. Penulis juga menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran pada jurusan Manajemen yang lulus pada tahun 1998. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di Prodi Ilmu Manajemen (lulus tahun 2003) dan Prodi Ilmu Ekonomi (lulus tahun 2007) Universitas Indonesia. Program Doktorat di bidang ilmu ekonomi, penulis selesaikan pada tahun 2012 di Universitas Indonesia. Penulis memiliki kompetensi di bidang Ekonomi dan Manajemen. Karir penulis adalah sebagai dosen profesional di berbagai universitas, seperti Universitas Kristen Indonesia, Universitas Pertahanan, Telkom University dan Universitas Maranatha Bandung. Penulis pun aktif sebagai peneliti yang didanai baik oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbudristek.
Email Penulis: posmahutasoit@gmail.com

BIODATA PENULIS



Nova Suryani, S.P., M.P.

Dosen Program Studi Agribisnis
Universitas Adzkia

Penulis lahir di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, tanggal 19 November 1996. Penulis adalah dosen pada Program Studi Agribisnis, Universitas Adzkia, Padang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) di Universitas Andalas dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Pertanian di Universitas Andalas.

BIODATA PENULIS



Arief Yanto Rukmana, S.T., M.M.

Mahasiswa Doktoral Universitas Pendidikan Indonesia
Dosen Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri Bandung
Dosen Universitas Nurtanio Bandung

Penulis sebelumnya telah memegang posisi penting di sejumlah bisnis yang beroperasi pada skala nasional dan dunia. penulis saat ini berprofesi sebagai praktisi bisnis dan akademisi. Penulis mengajar di Universitas Nurtanio Bandung, dan dosen tetap di perguruan tinggi indonesia mandiri (STMIK IM & STIE STAN IM). alumni dari Program Studi Informatika (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK IM), Program Magister Manajemen (S2) di Pasca Sarjana Universitas Widyatama dan sedang melanjutkan studi Pendidikan (S3) Program Doktoral Pendidikan Teknologi dan Vokasional di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pembicara dan narasumber kewirausahaan juga berdedikasi sebagai praktisi bisnis (Owner) di bidang kuliner, fashion hingga pemilik perusahaan jasa digital. serta aktif dalam organisasi nasional maupun internasional. Penulis juga seorang profesional dalam bidang public speaking & sebagai instruktur berpengalaman untuk sertifikasi kompetensi SKKNI BNSP Digital Marketing, Social Media

Marketing dan Metodologi Pelatihan Level III, Graphic Design serta Sertifikasi Kompetensi beberapa lainnya yang diselenggarakan dinas tenaga kerja kota bandung, PT Rice INTI dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung. Selain itu pula penulis produktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri dengan membina dan melatih / coaching, mentoring serta melakukan pendampingan bisnis UMKM untuk mahasiswa yang berminat menjadi seorang entrepreneur tangguh berdayasaing pada kancah internasional.

BIODATA PENULIS



Jeferson Tanesab, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Hukum
Universitas Aryasatya Deo Muri

Penulis lahir di Kupang tanggal 4 Juni 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Aryasatya Deo Muri. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara Fisip Undana pada tahun 2011 dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi pasca sarjana Undana dan selesai pada tahun 2015.

BIODATA PENULIS



Delila Anggelina Nahak Seran, S.Sos.,MAP

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Hukum Universitas Aryasatya Deo Muri

Lahir di Kupang 27 Agustus 1988. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan magister pada Pasca Sarja Program Studi Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang pada Tahun 2016. Tahun 2016 sampai saat ini menjalani aktivitas sebagai dosen tetap Yayasan pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Aryasatya Deo Muri Kupang.

BIODATA PENULIS



Muhammad Yusuf

Dosen Program Studi Manajemen

Penulis Lahir di Bima tanggal 24 April 1989. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen pada Universitas Mataram. Penulis adalah dosen tetap aktif pada Program Studi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima . Penulis Aktif menulis beberapa artikel ilmiah pada jurnal nasional dan jurnal terakreditasi kemendikbud bertemakan manajemen. Untuk keperluan profesional dapat di hubungi melalui yusufzainudin2489@gmail.com

BIODATA iPENULIS



Muhammad Hatta, SE.,M.Si

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare

Penulis lahir di Kota Parepare, 5 Oktober 1965, Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare. Menyelesaikan pendidikan S.1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 1992 ,kemudian melanjutkan studi S2 pada program Studi Pembangunan dan Perencanaan pada Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2015. Sekarang merupakan dosen tetap Program Studi Ekonomi , Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Penulis dapat dihubungi melalui email:muhammadhatta@umpar.ac.id

BIODATA PENULIS



Fabiola Bulimasena Luturmas, S.E., M.M

Dosen Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan
Kepelabuhanan Jurusan Kemaritiman
Politeknik Negeri Samarinda

Penulis lahir di Samarinda tanggal 10 September 1990, merupakan dosen pada Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan (KPNK) Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak James Luturmas, SH dan Ibu Deitje Ch. Manapode. Menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Jurusan Administrasi Bisnis dan melanjutkan pendidikan S1 dan S2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.